



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPD)  
BUPATI FLORES TIMUR  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas tuntunan, bimbingan dan perlindunganNya jualah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Penyusunan LKPJ Tahun 2020 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, serta Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah untuk memantau keberhasilan program dan kegiatan pembangunan pada masing-masing OPD.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disamping sebagai tugas dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, juga mencerminkan tekad, semangat dan wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Flores Timur melalui DPRD Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan pembangunan di Daerah ini.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama yang baik dari semua pihak termasuk jajaran Pemerintah serta masyarakat Kabupaten Flores Timur, yang telah memberikan dukungannya dalam rangka ikut menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Flores Timur.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang positif dan konstruktif demi penyempurnaan LKPJ Bupati Flores Timur Tahun 2020 ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolok ukur dalam memantapkan strategi kebijakan pembangunan Daerah pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demi terwujudnya Flores Timur Sejahtera, dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Mayor) of Flores Timur. The stamp contains the text "BUPATI FLORES TIMUR" at the top and "FLORES TIMUR" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a bird and a shield. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ANTON H. GEGE HADJON, ST" is printed in bold, black, uppercase letters.

**BUPATI FLORES TIMUR,**  
**ANTON H. GEGE HADJON, ST**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Visi dan Misi.....	3
1.4. Gambaran Umum Daerah.....	19
1.4.1.Aspek Geografis Daerah .....	19
1.4.2.Aspek Demografis.....	21
1.4.3. Kepegawaian .....	23
1.4.4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	24
1.4.5. Belanja Daerah.....	35
1.4.6. Pembiayaan Daerah .....	41
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD.....</b>	<b>43</b>
2.1. Pendapatan .....	44
2.2. Belanja .....	45
2.3. Pembiayaan .....	45
<b>BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>47</b>
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..	47
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	47
2. Dinas Kesehatan .....	49
3. Rumah Sakit Umum Daerah .....	53
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..	56
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan .....	58
6. Satuan Polisi Pamong Praja.....	60
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	62
8. Dinas Sosial .....	63
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ....	66
10. Dinas Tenaga Kerja .....	68

11. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA .....	70
12. Dinas Lingkungan Hidup.....	71
13. Dinas Kependudukan dan Capil.....	74
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	76
15. Dinas Perhubungan .....	78
16. Dinas Komunikasi dan Informatika .....	80
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .	81
18. Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....	83
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	84
20. Dinas Perikanan.....	86
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	89
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	91
23. Dinas Perkebunan dan Peternakan .....	93
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	95
25. Sekretariat Daerah .....	97
26. Sekretarian DPRD .....	107
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	109
28. Inspektorat Daerah .....	111
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	114
30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	115
31. Badan Pendapatan Daerah.....	118
32. Kecamatan-Kecamatan.....	119
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan .....	143
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2019	147
<b>BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>156</b>
4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima .....	156
4.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan .....	159
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>160</b>

11. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA .....	70
12. Dinas Lingkungan Hidup.....	71
13. Dinas Kependudukan dan Capil .....	74
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	76
15. Dinas Perhubungan .....	78
16. Dinas Komunikasi dan Informatika .....	80
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .	81
18. Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....	83
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	84
20. Dinas Perikanan.....	86
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	89
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	91
23. Dinas Perkebunan dan Peternakan .....	93
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	95
25. Sekretariat Daerah .....	97
26. Sekretarian DPRD .....	107
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	109
28. Inspektorat Daerah .....	111
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	114
30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	115
31. Badan Pendapatan Daerah.....	118
32. Kecamatan-Kecamatan.....	119
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan .....	143
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2019	147
<b>BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>156</b>
4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima .....	156
4.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan .....	159
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>160</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). LKPJ kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 sebagai penjabaran atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. LKPJ Bupati Flores Timur Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun ketiga RPJMD periode Tahun 2017-2022.

Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2020, mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi otonomi daerah secara keseluruhan. Kewajiban penyampaian LKPJ telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

## 1.2 DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur Tahun 2020, adalah :

1. Undang-undang Nomor: 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten Flores Timur, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: Pem.66/1/32 Tahun 1963 tentang Kecamatan dalam Daerah Swatantra Tingkat II se-Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

### 1.3 VISI DAN MISI

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, masih berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2017-2022. RPJMD ini merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi besar yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing. Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ketiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah: 1) Perekonomian daerah yang tangguh; 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali; 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat; 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah; 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem; 6) Meningkatnya ketahanan pangan; 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

#### 1. Visi

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, adalah: ***Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.***

Makna dari visi tersebut adalah :

- a. Flores Timur Sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.

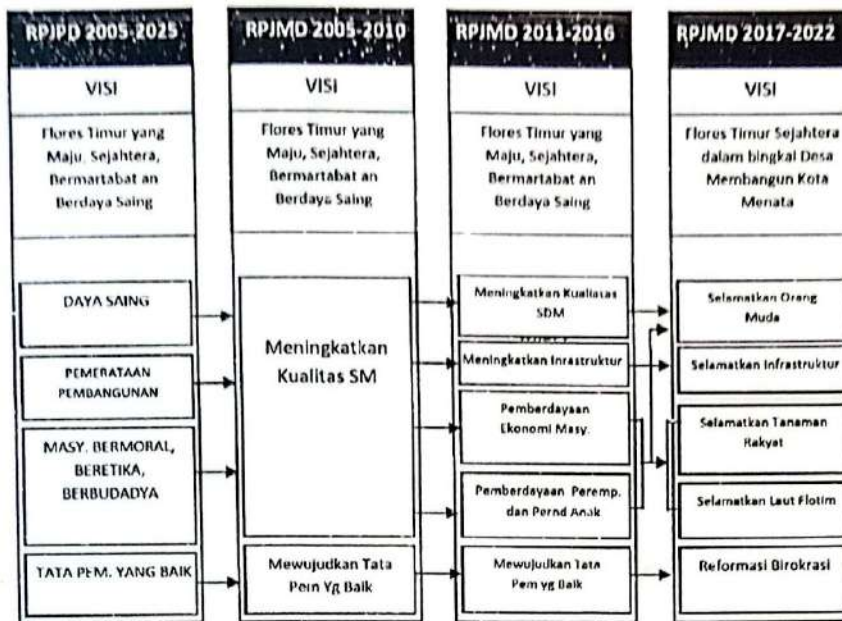
- b. Desa Membangun Kota Menata adalah desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.
- c. Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

## 2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

- a. **Misi Kesatu: Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
- b. **Misi Kedua: Selamatkan Infrastruktur Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
- c. **Misi Ketiga: Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
- d. **Misi Keempat: Selamatkan Laut Flores Timur** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
- e. **Misi Kelima: Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sebagai pelaksanaan periode ketiga RPJPD Tahun 2005-2025, perumusan visi misi RPJMD Tahun 2017-2022 memperhatikan hubungan antara tujuan dan sasaran RPJP, misi pada RPJMD I dan RPJMD II dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar diatas menunjukkan bahwa visi misi RPJMD 2017-2022 merupakan sebuah langkah baru dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Langkah-langkah percepatan melalui misi selamatkan orang muda, selamatkan infrastruktur, selamatkan tanaman rakyat, selamatkan laut Flores Timur dan reformasi birokrasi serta didukung dengan tiga kebijakan strategis yakni kebijakan pembangunan pendidikan, kebijakan pembangunan pariwisata, dan kebijakan pembangunan kesehatan diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran RPJPD pada lima tahun ketiga.

#### A. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta acuan bagi *stakeholders* terkait dalam partisipasi aktif pembangunan melalui spirit *Desa Membangun Kota Menata*.

### A.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, dan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan pertimbangan aspek efektifitas dan efisiensi.

Rumusan capaian tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 tergambar sebagai berikut.

<b>Misi Kesatu : Selamatkan Orang Muda Flores Timur</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terselamatkannya orang muda dari masalah ekonomi	Meningkatnya kemandirian orang muda	Peningkatan motivasi orang muda dalam membangun masa depan;
		Peningkatan bantuan permodalan bagi usaha orang muda;
		Peningkatan <i>life skill</i> orang muda;
		Peningkatan pendampingan usaha orang muda.
	Meningkatnya kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja.
Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	Meningkatnya pembinaan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan pembinaan karakter orang muda dan kelembagaannya;
		Peningkatan rasa kecintaan budaya Lamaholot.
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata serta tingkat pendidikan.
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.	Peningkatan jaminan kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
		Meningkatkan layanan KB.
Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS;	
	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial.	

	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
--	--	--

**Misi Kedua : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya kinerja transportasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	Peningkatan ketersediaan air baku untuk masyarakat secara berkelanjutan
Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	Mengurangi resiko akibat bencana	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengurangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Penyediaan rumah layak huni
		Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

**Misi Ketiga : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya produksi tanaman rakyat	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.	Peningkatan produksi, kualitas produksi dan produktivitas pertanian
		Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
Meningkatnya pemasaran hasil produksi tanaman rakyat	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah.	Perluasan jangkauan pemasaran komoditas pertanian unggulan

<b>Misi Keempat : Selamatkan Laut Flores Timur</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Terselamatkannya ekosistem laut	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	Peningkatan penyelamatan lingkungan laut dari tindakan pengrusakan.	
		Peningkatan pengawasan terpadu kelautan	
		Peningkatan kawasan konservasi laut dan rehabilitasi terumbu karang	
Terpeliharanya potensi laut	Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan	
		Peningkatan industri garam berbasis masyarakat	
		Peningkatan kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan	
		Pembangunan kawasan budidaya perikanan	
<b>Misi Kelima : Reformasi Birokrasi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	
		Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	
		Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;	
	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis	Menata sistem hukum daerah	Meningkatkan kesadaran hukum
			Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

## A.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Rumusan arah kebijakan 5 (lima) tahun harus memperhatikan strategi yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rumusan arah kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>Misi Kesatu : Selamatkan Orang Muda Flores Timur</b>	
Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
Peningkatan motivasi orang muda dalam membangun masa depan	Meningkatkan peran dan fungsi orang muda dalam pembangunan diri serta penumbuhan kewirausahaan
Peningkatan bantuan permodalan bagi usaha orang muda	
Peningkatan <i>life skill</i> orang muda; Peningkatan pendampingan usaha orang muda.	
Perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kesempatan kerja melalui dunia usaha dan program-program pemerintah daerah
	Meningkatkan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
Meningkatkan pembinaan karakter orang muda dan kelembagaannya	Meningkatkan pengembangan kepribadian orang muda sebagai warga negara yang Pancasila
	Meningkatkan prestasi orang muda
Peningkatan rasa kecintaan budaya Lamaholot	Pelestarian seni budaya Lamaholot
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata serta tingkat pendidikan	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan
	Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
	Pemberian beasiswa

Peningkatan jaminan kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas
	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata
	Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas dan merata
	Peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan
Meningkatkan layanan KB	Revitalisasi program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatkan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PMKS.
Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak

<b>Misi Kedua : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur</b>	
Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi	Membangun sistem dan jaringan transportasi yang aman dan layak untuk menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
Peningkatan ketersediaan air baku untuk masyarakat secara berkelanjutan	Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendukung penyediaan air baku bagi masyarakat
	Pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pendukung penyediaan air baku bagi pertanian
	Menyelamatkan mata air dan sumber daya air lainnya.
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	Mengembangkan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi daya rusak air
	Mengembangkan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi bencana longsor
Mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Penyediaan rumah layak huni	Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni



Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman	Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak menuju <i>universal access</i>
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik
Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang kota
	Mengendalikan pemanfaatan ruang kota sesuai arahan tata ruang

<b>Misi Ketiga : Selamatkan Tanaman Rakyat</b>	
Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
Peningkatan produksi, kualitas produksi dan produktivitas pertanian	Meningkatkan kapasitas produksi dengan berbasis kepada kelompok tani
Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.	Mewujudkan ketahanan pangan daerah
Perluasan jangkauan pemasaran komoditas pertanian unggulan	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian unggulan

<b>Misi Keempat : Selamatkan Laut Flores Timur</b>	
Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
Peningkatan penyelamatan lingkungan laut dari tindakan pengrusakan.	Meningkatkan penyelamatan, pengawasan dan konservasi laut
Peningkatan pengawasan terpadu kelautan	
Peningkatan kawasan konservasi laut dan rehabilitasi terumbu karang	
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana penangkapan dan budi daya ikan	Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya
Peningkatan industri garam berbasis masyarakat	Intensifikasi dan ekstensifikasi industri garam
Peningkatan kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan	Peningkatan kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus
Pembangunan kawasan budidaya perikanan	Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

<b>Misi Kelima : Reformasi Birokrasi</b>	
Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan
	Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel
	Penataan sistem administrasi ASN
	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu
	Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
	Peningkatan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan
	Penguatan fungsi Litbang daerah
	Penyusunan dan pelaksanaan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur
Menata sistem hukum daerah	Menyiapkan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Meningkatkan kesadaran hukum	Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.
Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajiban politik sebagai warga negara	Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik;
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan peran <i>quality assurance</i> dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APIP)

Sebagai upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan tahun 2017-2022 dirumuskan pula kebijakan strategis pembangunan yang dilaksanakan melalui spirit ***Desa Membangun Kota Menata***. Kebijakan strategis tersebut yakni 1) *Kebijakan Pembangunan Pendidikan*; 2) *Kebijakan Pembangunan Pariwisata*; 3) *Kebijakan Pembangunan Kesehatan*;

Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, membangun prasarana dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honor, peningkatan kemampuan guru dan pemberian beasiswa khusus bagi mahasiswa asal Flores Timur yang kuliah di perguruan tinggi yang ada di Flores Timur.

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa desa wisata dan kawasan wisata.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk penempatan tenaga kesehatan yang memadai untuk setiap desa (gizi, bidan dan perawat), peningkatan fungsi Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, dan peningkatan kapasitas pelayanan RSUD.

## **B. Prioritas Daerah**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan umum guna operasionalisasinya oleh Organisasi Perangkat Daerah, maka disusun program-program pembangunan daerah. Program-program tersebut dapat merupakan program kerja Organisasi Perangkat Daerah maupun program kerja lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program-program kewilayahan dengan rincian rencana kerja dan rencana kegiatan baik dalam kerangka pendanaan yang disusun bersifat indikatif dan kerangka regulasi selama lima tahun.

Berikut adalah program prioritas pembangunan kabupaten yang merupakan penjabaran dari misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan untuk periode 2017-2022.

### **1. Misi Selamatkan Orang Muda Flores Timur**

**Tujuan : 1. Terselamatkannya Orang Muda dari Masalah Ekonomi**

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kemandirian Orang Muda**

1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah;
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
6. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
8. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kesempatan Kerja**

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

**Tujuan 2 : Terselamatkan Orang Muda Dari Masalah Sosial Budaya**

**Sasaran 1 : Meningkatkan Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan**

1. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
5. Program Pengembangan Nilai Budaya;
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan**

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Kerjasama Kemitraan.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya;
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
9. Program Keluarga Berencana.

### **Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Anak Terlantar;
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya);
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

### **Sasaran 5 : Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**

1. Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

## **2. Misi Selamatkan Infrastruktur Flores Timur**

### **Tujuan 1. Tersedianya Infrastruktur Daerah yang Mampu Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

#### **Sasaran 1: Meningkatnya kinerja transportasi**

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3. Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas-fasilitas LLAJ;
5. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

**Sasaran 2 : Pemenuhan Air Baku untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya**

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya air lainnya;
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

**Tujuan 2 : Mempertahankan daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana**

**Sasaran 1 : Mengurangi Resiko Akibat Bencana**

1. Program Pengendalian Banjir;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

**Tujuan 3 : Terwujudnya Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Berkualitas**

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman**

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
3. Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan**  
**Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota**

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

### **3. Misi Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur**

**Tujuan 1 : Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat**

**Sasaran : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal**

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan;
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan;
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

**Tujuan 2 : Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat**

**Sasaran : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah**

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

### **4. Misi Selamatkan Laut Flores Timur**

**Tujuan 1 : Terselamatkannya Ekosistem Laut**

**Sasaran :Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut**

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
3. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan;
5. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut.

**Tujuan 2 : Terpeliharanya Potensi Laut**

**Sasaran : Meningkatkan Produksi Perikanan**

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar;
4. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah;
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
10. Program Pengembangan Kemitraan.

**5. Misi Reformasi Birokrasi**

**Tujuan : Mengembangkan Birokrasi yang semakin Profesional dan Akuntabel**

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
2. Program Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
7. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
8. Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan;
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
13. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH);
14. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.



**Sasaran 2 : Meningkatnya Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang Dinamis**

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
2. Program Pengembangan Data/Informasi;
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan efektif**

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

**1.4 GAMBARAN UMUM DAERAH**

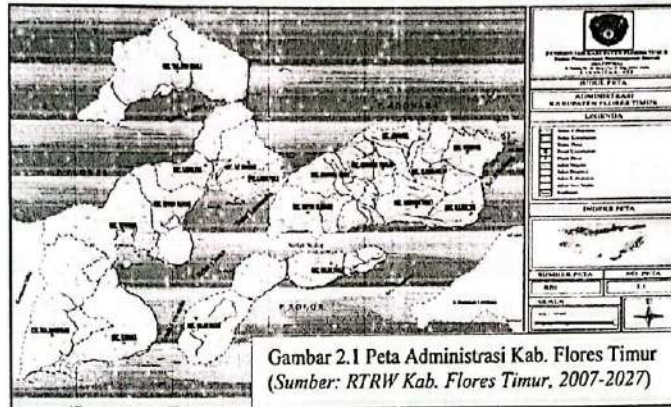
Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Flores, dengan ibu kotanya Larantuka. Kabupaten Flores Timur terbentuk dengan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten Flores Timur, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: Pem.66/1/2/1962 tentang Pembentukan Kecamatan di Provinsi Daerah Swatantra Tingkat I NTT. Sejak berdirinya hingga sekarang, Kabupaten Flores Timur memiliki 19 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 229 Desa yang tersebar di 3 (tiga) pulau besar, yakni pulau Flores bagian timur, pulau Adonara dan pulau Solor. Jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2020 sebanyak 298.822 jiwa.

Berikut kondisi umum daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari beberapa aspek.

**1.4.1 Aspek Geografis Daerah**

Kabupaten Flores Timur adalah kabupaten yang terletak antara 08° 04'-08° 40' LS dan 122°38'-123° 57' BT dengan topografi bergunung dan berbukit dengan kemiringan yang lebih dominan > 40°, dengan musim hujan ± 3 bulan dan musim kemarau 9 bulan membawa suatu kendala tersendiri. †

Selain itu, seiring dengan perubahan iklim global, pergantian musim menjadi tidak menentu dan anomali cuaca yang sulit diprediksi, membawa implikasi tersendiri terhadap berbagai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah ini.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Flores Timur  
(Sumber: RTRW Kab. Flores Timur, 2007-2027)

Kabupaten Flores Timur memiliki luas wilayah 5.983,38 Km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 1.812,85 Km<sup>2</sup> (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 4.170,53 Km<sup>2</sup> (69% luas wilayah), dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lembata.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sikka

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 Kecamatan, 229 Desa dan 21 Kelurahan. Luas wilayah perkecamatan dan luas pulau dalam wilayah Kabupaten Flores Timur seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Luas Daerah Kabupaten Flores Timur  
Menurut Pulau dan Kecamatan

Pulau	Kecamatan	Jumlah		Luas Daerah Area (Km <sup>2</sup> )	Luas (%)
		Desa	Kelurahan		
	1. Wulangitang	11	-	255,85	12,46
	2. Titehena	14	-	154,84	8,54
	3. Tanjung Bunga	16	-	257,57	14,21
	4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
	8. Lewolema	7	-	92,84	5,12
	<b>Pulau Flores Bagian Timur</b>	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>1.056,49</b>	<b>58,28</b>
	9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
	10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
	11. Solor Selatan	7	-	31,85	1,74
	<b>Pulau Solor</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>226,61</b>	<b>12,50</b>

12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
16. Witihama	16	-	79,43	4,38
17. Klubagolit	12	-	44,41	2,46
18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
19. Adonara	8	-	56,80	3,13
<b>Pulau Adonara</b>	<b>119</b>	<b>2</b>	<b>529,75</b>	<b>29,23</b>
<b>Flores Timur</b>	<b>229</b>	<b>21</b>	<b>1.812,85</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa persebaran 19 kecamatan dan 250 desa/kelurahan yakni (a) daratan pulau Flores bagian timur terdapat 8 kecamatan, 72 desa dan 18 kelurahan; (b) daratan pulau Solor terdapat 3 kecamatan, 38 desa dan 1 kelurahan; dan (c) daratan pulau Adonara terdapat 8 kecamatan, 119 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Tanjung Bunga merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas, yaitu 257,57 Km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan Larantuka dengan wilayah paling sempit yakni 48,91 Km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur (19 Desa dan 2 Kelurahan) dan Kecamatan Ile Boleng (21 Desa).

#### 1.4.2 Aspek Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur sampai 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 298.822 jiwa, dengan rincian sebagai berikut; laki-laki sebanyak 146.639 jiwa atau 49,07% dan perempuan sebanyak 152.183 jiwa atau 50,93%. Sedangkan Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Larantuka sebanyak 42.721 jiwa atau 14,30% disusul Kecamatan Adonara Timur sebanyak 32.575 jiwa atau 10,90 % dan Kecamatan Ile Boleng sebanyak 19.225 jiwa atau 6,43 %

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				L	P	L + P
1	Wulanggitang	11	4.029	7.848	7.913	15.761
2	Ile Bura	7	2.082	4.083	4.009	8.092
3	Titehena	14	3.697	6.948	7.038	13.986
4	Demon Pagong	7	1.415	2.645	2.735	5.380
5	Larantuka	20	11.634	21.311	21.410	42.721
6	Ile Mandiri	8	3.187	6.111	6.180	12.291
7	Lewolema	7	2.586	5.213	5.216	10.429
8	Tanjung Bunga	16	3.700	7.739	7.655	15.394
9	Solor Barat	15	3.132	5.931	6.276	12.207
10	Solor Timur	17	4.483	8.575	8.919	17.494
11	Solor Selatan	7	1.767	3.630	3.865	7.495
12	Adonara Barat	18	3.588	7.344	7.350	14.694
13	Adonara Tengah	13	3.657	7.157	7.340	14.497
14	Adonara Timur	21	8.969	15.780	16.795	32.575
15	Ile Boleng	21	5.662	9.132	10.093	19.225
16	Witihama	16	5.922	9.106	9.966	19.072
17	Kelubagolit	12	4.330	6.581	7.352	13.933
18	Adonara	8	3.652	6.158	6.698	12.856
19	Wotan Ulumado	12	2.702	5.347	5.373	10.720
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>80.194</b>	<b>146.639</b>	<b>152.183</b>	<b>298.822</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Flotim Tahun 2020

Berdasarkan data sebagaimana tersajikan diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 5.768 jiwa atau 1,97% dibandingkan dengan penduduk tahun 2019 sebesar 293.054 jiwa.

Berdasarkan interval umur, jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur usia produktif (15-64 tahun) di tahun 2020 berjumlah 202.656 jiwa atau 67,81% dari jumlah penduduk kabupaten Flores Timur. Sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) berjumlah 96.166 jiwa atau 32,19%. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur berada dalam kategori kabupaten yang memperoleh Bonus Demografi, yang berarti bonus yang dinikmati oleh suatu negara/daerah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk pada rentang usia produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Berikut disajikan data jumlah penduduk berdasarkan interval umur.

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur  
Interval 4 Tahun Tahun 2020

No	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00-04	7.754	6.991	14.745
2	05-09	13.549	12.191	25.740
3	10-14	14.731	13.777	28.508
4	15-19	15.606	14.550	30.156
5	20-24	15.104	13.946	29.050
6	25-29	12.083	11.898	23.981
7	30-34	11.096	10.953	22.049
8	35-39	9.833	9.904	19.737
9	40-44	8.746	9.605	18.351
10	45-49	8.742	9.446	17.688
11	50-54	7.262	8.639	15.901
12	55-59	6.157	7.561	13.718
13	60-64	5.261	6.764	12.025
14	65-69	3.757	5.014	8.771
15	70-74	2.809	4.293	7.102
16	> 75	4.649	6.651	11.300
<b>TOTAL</b>		<b>146.639</b>	<b>152.183</b>	<b>298.822</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Flotim Tahun 2020

Bonus demografi menjadi sebuah keuntungan jika penduduk usia produktif berkualitas, tetapi sebaliknya akan menjadi sebuah ancaman ketika penduduk pada usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, kesehatan buruk, keahlian rendah yang membuat tidak dapat berproduksi secara optimal.

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur  
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak/Belum Sekolah	25.800	26.408	52.208
2	Belum Tamat SD/Sederajat	22.962	21.203	44.165
3	Tamat SD/Sederajat	43.516	53.082	96.598
4	Tamat SLTP/Sederajat	18.599	17.757	36.356
5	Tamat SLTA/Sederajat	26.337	24.163	50.500
6	Tamat Diploma I-II	216	237	453
7	Tamat Akademi/D.III/SARMUD	1.745	2.743	4.488
8	Tamat Doploma IV/Strata I	7.308	6.501	13.809
9	Tamat Strata II	150	88	238
10	Tamat Strata III	6	1	7
<b>TOTAL</b>		<b>146.639</b>	<b>152.1830</b>	<b>298.822</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Flortim Tahun 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Flores Timur terbesar adalah tamat SD/MI sederajat yakni sebesar 96.598 jiwa atau 32,32%. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan generasi masa depan Kabupaten Flores Timur yang berkualitas.

#### 1.4.3 Kepegawaian

Berdasarkan data per 31 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki 4.952 orang pegawai, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 2.248 orang dan Perempuan sebanyak 2.703 orang. Lebih lanjut, kondisi pegawai Kabupaten Flores Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Jumlah PNS Kabupaten Flores Timur  
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	30	4	34
2	SLTP	41	5	46
3	SLTA	747	577	1.324
4	D.I	17	116	133
	D.II	166	124	290
	D.III	213	650	863
5	S.1	984	1.216	2.200
6	S.2	50	12	62
7	S.3	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.248</b>	<b>2.703</b>	<b>4.952</b>

Sumber : BKPSDM Kab.Flortim Tahun 2020

Berdasarkan sajian tabel diatas, menggambarkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Flores Timur dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah S.1 yakni sebesar 2.200 orang atau 44,41%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah SDM Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Flores Timur telah menunjukkan peningkatan dari sisi pendidikan yang tentunya dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun masa depan Kabupaten Flores Timur yang lebih berkualitas.

Tabel 1.6  
Jumlah PNS Kabupaten Flores Timur  
Menurut Golongan Tahun 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Gol. I	35	6	41
2	Gol. II	533	575	1.108
3	Gol. III	1.221	1.821	3.042
7	Gol. IV	459	302	761
<b>TOTAL</b>		<b>2.248</b>	<b>2.703</b>	<b>4.952</b>

Sumber : BKPSDM Kab.Flotim Tahun 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa Jumlah PNS Kabupaten Flores Timur menurut Golongan terbanyak ada pada Golongan III yakni sebesar 3.042 orang atau 61,42%. Tentu menjadi perhatian kita bahwa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Flores Timur yang secara kepangkatan telah memenuhi syarat untuk menduduki sebuah jabatan.

#### 1.4.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sesuai dengan pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
  - (1) Hasil Pajak Daerah;
  - (2) Hasil Retribusi Daerah;
  - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - (4) Lain - lain PAD yang Sah
- b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
  - (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
  - (2) Dana Alokasi Umum;
  - (3) Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari :
  - (1) Pendapatan Hibah;
  - (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
  - (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

#### A. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.063.896.043.160,47,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.114.118.360.584,41,- atau 95,49% (sebelum diaudit oleh BPK RI).

Rincian target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7  
Target dan Realisasi Anggaran TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	64.253.713.857,-	48.983.753.693,06,-	76,23
2	Dana Perimbangan	784.620.182.396,-	777.272.447.989,-	99,06
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	265.244.464.331,41,-	237.639.841.478,41,-	89,59
	<b>Jumlah</b>	<b>1.114.118.360.584,41,-</b>	<b>1.063.896.043.160,47,-</b>	<b>95,49</b>

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.48.983.753.693,06,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.64.253.713.857,- atau mencapai 76,23%.

Tabel 1.8  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Pajak Daerah	13.244.589.179,00	9.493.649.173,55	71,68
2	Hasil Retribusi Daerah	23.303.648.400,00	19.801.102.078,00	84,97
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.488.206.825,00	4.788.206.825,21	73,80
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.217.269.453,00	14.900.795.616,30	70,23
	<b>Jumlah</b>	<b>64.253.713.857,00</b>	<b>48.983.753.693,06</b>	<b>76,23</b>

Rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

❖ Hasil Pajak Daerah.

Target hasil pajak daerah dalam tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.13.244.589.179,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.493.649.173,55,- atau mencapai 71,68%.

Rincian hasil pajak daerah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.9  
Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	96.150.000,00	54.625.759,00	56,81
2	Pajak Restoran	917.120.000,00	1.201.708.606,00	131,03
3	Pajak Reklame	236.261.000,00	114.197.500,00	48,34
4	Pajak Penerangan Jalan	5.700.000.000,00	4.646.013.371,00	81,51
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.190.241.950,00	755.521.656,55	34,49
6	Pajak Air Tanah	5.651.000,00	6.043.400,00	106,94
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.749.165.229,00	2.285.778.831,00	60,97
8	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00	429.760.050,00	122,79
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.244.589.179,00</b>	<b>9.493.649.173,55</b>	<b>71,68</b>

❖ Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur yang berkaitan langsung dengan pelayanan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan hasil retribusi daerah dilakukan oleh OPD terkait yang berhubungan langsung dengan pemungutan retribusi daerah.

Target retribusi daerah dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp.23.303.648.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.801.102.078,- atau mencapai 84,97%.

Rincian hasil retribusi daerah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.10  
Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>21.545.538.900,00</b>	<b>18.443.687.527,00</b>	<b>85,60</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan -- Puskesmas	2.250.000.000,00	1.957.670.982,00	87,01
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	18.528.972.100,00	16.040.136.645,00	86,57
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	47.000.000,00	50.549.000,00	107,55
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	89.885.000,00	5.400.000,00	6,01
	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	120.000.000,00	43.336.500,00	36,11
	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	72.917.000,00	30.195.000,00	41,41
	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	219.756.000,00	223.698.000,00	101,79
	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	1.920.000,00	0,00	-
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	215.088.800,00	92.701.400,00	43,10
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.334.984.500,00</b>	<b>966.281.851,00</b>	<b>72,38</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	364.942.500,00	287.793.701,00	78,86
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	15.480.000,00	2.700.000,00	17,44
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	535.500.000,00	264.307.000,00	49,36
	Retribusi Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	1.000.000,00	
	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	0,00	6.600.000,00	
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	2.000.000,00	2.650.000,00	132,50
	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	2.000.000,00	11.930.000,00	596,50
	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	16.800.000,00	800.000,00	4,76
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	29.112.000,00	18.816.000,00	64,63



	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	11.950.000,00	2.758.000,00	23,08
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	0,00	288.000,00	
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	69.200.000,00	84.904.650,00	122,69
	Retribusi Tempat Pariwisata	60.000.000,00	64.484.000,00	107,47
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	10.488.000,00	69,92
	Retribusi Jasa Usaha Lainnya	213.000.000,00	206.762.500,00	97,07
<b>3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>423.125.000,00</b>	<b>391.132.700,00</b>	<b>92,44</b>
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	140.000.000,00	154.034.500,00	110,02
	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	33.125.000,00	0,00	-
	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	145.000.000,00	82.165.000,00	56,67
	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	105.000.000,00	154.933.200,00	147,56
	<b>TOTAL</b>	<b>23.303.648.400,00</b>	<b>19.801.102.078,00</b>	<b>84,97</b>

❖ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.488.206.825,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.788.206.825,21,- atau mencapai 73,80%.

Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11  
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	6.488.206.825,00	4.788.206.825,21	73,80
	<b>Jumlah</b>	<b>6.488.206.825,00</b>	<b>4.788.206.825,21</b>	<b>73,80</b>

❖ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditargetkan dalam tahun 2020 sebesar Rp.21.217.269.453,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.900.795.616,39,- atau mencapai 70,23%.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12  
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	43.000.000,00	23.731.000,00	55,19
2	Penerimaan Jasa Giro	600.000.000,00	1.149.916.758,40	191,65
3	Penerimaan Bunga Deposito	4.694.000.000,00	2.065.440.393,72	44,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.750.000.000,00	408.641.883,45	23,35
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	177.192.592,00	310.495.475,01	175,23
6	Pendapatan Denda Pajak	0,00	4.749.224,00	-
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	-
8	Pendapatan Dari Pengembalian	3.250.000.000,00	963.256.481,72	29,64
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	13.300.000,00	0,00	-
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
11	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	25.000.000,00	30.995.000,00	123,98
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10.449.776.861,00	9.716.733.150,00	92,99
13	Pendapatan atas Bunga Tabungan	15.000.000,00	26.836.250,00	178,91
<b>Jumlah</b>		<b>21.217.269.453,00</b>	<b>14.900.795.616,30</b>	<b>70,23</b>

**b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan yang ditargetkan dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp. 784.620.182.396,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 777.272.447.989,00 atau mencapai 99,06%, dengan rincian sebagai berikut :

❖ Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP orang pribadi dalam negeri. Sedangkan bagi hasil bukan pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari bagi hasil sumber daya alam kehutanan, royalti, perikanan, pertambangan panas bumi, pertambangan umum dan bagi hasil dari cukai tembakau.

Target dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak adalah sebesar Rp. 10.340.835.608,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.468.765.037,00 atau mencapai 81,90%.

Rincian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana terdapat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 1.13  
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>8.252.359.525,00</b>	<b>7.564.444.326,00</b>	<b>91,66</b>
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.079.458.000,00	4.005.651.458,00	98,19
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.430.353.426,00	3.095.594.203,00	90,24
	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	16.873.300,00	-
	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	742.548.099,00	446.325.365,00	60,11
<b>2</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>2.088.476.083,00</b>	<b>904.320.711,00</b>	<b>43,30</b>
	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.647.661.150,00	788.276.289,00	7,84
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	436.841.933,00	113.399.950,00	25,96
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.346.000,00	1.261.072,00	93,69
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	2.627.000,00	1.383.400,00	52,66
	<b>JUMLAH (1+2)</b>	<b>10.340.835.608,00</b>	<b>8.468.765.037,00</b>	<b>81,90</b>

❖ Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.595.654.496.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.593.304.944.000,00 atau mencapai 99,61%.

❖ Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.178.624.850.788,00 dengan realisasi sebesar Rp.175.498.738.952,00 atau mencapai 98,25%.

Rincian Dana Alokasi Khusus sebagaimana terdapat pada tabel di halaman berikut ini.

Tabel 1.14  
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>DAK Fisik - Reguler</b>	<b>71.474.857.568,00</b>	<b>71.474.857.568,00</b>	<b>100,00</b>
	DAK Bidang Pendidikan PAUD	3.441.450.000,00	3.441.450.000,00	100,00
	DAK Bidang Pendidikan SD	13.285.842.622,00	13.285.842.622,00	100,00
	DAK Bidang Pendidikan SMP	13.408.631.930,00	13.408.631.930,00	100,00
	DAK Bidang Pendidikan SKB	336.133.000,00	336.133.000,00	100,00
	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar	6.274.470.522,00	6.274.470.522,00	100,00
	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Kefarmasian	2.003.147.440,00	2.003.147.440,00	100,00
	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Rujukan	7.164.165.119,00	7.164.165.119,00	100,00
	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.479.469.435,00	1.479.469.435,00	100,00
	DAK Bidang Sosial	0,00	1.197.914.000,00	-
	DAK Bidang Sanitasi	1.625.000.000,00	427.086.000,00	26,28
	DAK Bidang Jalan	22.456.547.500,00	22.456.547.500,00	100,00
2	<b>DAK Fisik - Penugasan</b>	<b>19.264.621.220,00</b>	<b>19.264.621.220,00</b>	<b>100,00</b>
	DAK Bidang Kesehatan- Penurunan Stunting	1.499.237.900,00	1.499.237.900,00	100,00
	DAK Bidang Kesehatan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.590.740.384,00	2.590.740.384,00	100,00
	DAK Bidang Air Minum	3.333.819.000,00	3.333.819.000,00	100,00
	DAK Bidang Sanitasi	1.194.305.000,00	1.194.305.000,00	100,00
	DAK Bidang Irigasi	4.612.241.000,00	4.612.241.000,00	100,00
	DAK Bidang Pertanian	1.710.365.250,00	1.710.365.250,00	100,00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.419.343.836,00	2.419.343.836,00	100,00
	DAK Bidang Pariwisata	1.904.568.850,00	1.904.568.850,00	100,00
	DAK Bidang Transportasi Laut	0,00	0,00	-
	DAK Bidang Jalan-Keselamatan Jalan	0,00	0,00	-
3	<b>DAK Non Fisik - Bidang Pendidikan</b>	<b>54.063.653.000,00</b>	<b>54.516.846.000,00</b>	<b>100,84</b>
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.079.600.000,00	4.959.600.000,00	97,64
	Tunjangan Profesi Guru	45.801.562.000,00	45.801.562.000,00	100,00
	Tambahan Penghasilan Guru	2.169.750.000,00	2.496.099.000,00	115,04
	Tunjangan Khusus Guru	551.741.000,00	845.335.000,00	153,21
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	461.000.000,00	414.250.000,00	89,86
4	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan dan KB</b>	<b>31.882.937.000,00</b>	<b>28.304.597.000,00</b>	<b>88,78</b>
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.198.939.000,00	25.418.353.000,00	105,04
	Akreditasi Puskesmas	357.920.000,00	0,00	-
	Jaminan Persalinan (Jampersal)	2.277.166.000,00	0,00	-
	Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	0,00	-
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.889.584.000,00	2.886.244.000,00	59,03
5	<b>DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.177.374.000,00</b>	<b>1.176.433.914,00</b>	<b>99,92</b>
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.177.374.000,00	1.176.433.914,00	99,92

<b>6</b>	<b>DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM</b>	<b>417.358.000,00</b>	<b>417.358.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	417.358.000,00	100,00
<b>7</b>	<b>DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata</b>	<b>344.050.000,00</b>	<b>344.025.250,00</b>	<b>99,99</b>
	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	344.025.250,00	99,99
<b>Jumlah</b>		<b>178.624.850.788,00</b>	<b>175.498.738.952,00</b>	<b>98,25</b>

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah dari sumber-sumber lain yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp.265.244.464.331,41,- dengan realisasi sebesar Rp.237.639.841.478,41,- atau mencapai 89,59%.

Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15  
Target dan Realisasi lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	68.551.126.890,00	41.993.695.000,00	61,26
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.222.432.441,41	20.892.743.078,41	94,02
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.470.905.000,00	174.753.403.400,00	100,16
<b>Jumlah</b>		<b>265.244.464.331,41</b>	<b>237.639.841.478,41</b>	<b>89,59</b>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

#### ❖ Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri yang berupa hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Target pendapatan hibah dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp. 68.551.126.890,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.993.695.000,00 atau mencapai 61,26%

Tabel 1.16  
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	<b>40.789.994.026,00</b>	<b>15.674.995.000,00</b>	<b>38,43</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	40.789.994.026,00	15.674.995.000,00	38,43
2	<b>Pendapatan Hibah Dana Bos</b>	<b>27.761.132.864,00</b>	<b>26.318.700.000,00</b>	<b>94,80</b>
	Hibah Dana Bos	27.761.132.864,00	26.318.700.000,00	94,80
	<b>Jumlah</b>	<b>68.551.126.890,00</b>	<b>41.993.695.000,00</b>	<b>61,26</b>

❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Dana bagi hasil pajak dari provinsi merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah.

Target dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp. 22.222.432.441,41,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.892.743.078,41 atau mencapai 94,02% Rinciannya terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.17  
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.513.516.697,00	2.681.208.679,00	76,31
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.492.806.343,00	5.356.010.215,00	214,86
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.894.232.422,00	0,00	-
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	0,00	-
5	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	25.634.182,41	17.987.247,41	70,17
6	Bagi Hasil Pajak Rokok	11.296.242.797,00	12.837.536.937,00	113,64
	<b>Jumlah</b>	<b>22.222.432.441,41</b>	<b>20.892.743.078,41</b>	<b>94,02</b>

❖ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dialokasikan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta Dana Desa. d

Target dana penyesuaian dan otonomi khusus dalam tahun 2020 adalah sebesar Rp.174.470.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 174.753.403.400,00 atau mencapai 100,16%. Rinciannya terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.18  
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	-
2	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>174.470.905.000,00</b>	<b>174.753.403.400,00</b>	<b>100,16</b>
	Dana Otonomi Khusus	174.470.905.000,00	174.753.403.400,00	100,16
	<b>Jumlah</b>	<b>174.470.905.000,00</b>	<b>174.753.403.400,00</b>	<b>100,16</b>

## B. Permasalahan dan Solusi

### 1. Permasalahan

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah yang sejalan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya untuk menggali potensi dan sumber-sumber penerimaan baru untuk membiayai kebutuhan akan pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Namun disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, hal ini disebabkan karena belum semua permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan dimaksud adalah:

- a. Belum optimalnya penerimaan daerah, baik pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah;
- c. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD;
- d. Koordinasi secara integratif antara institusi pengelola pendapatan daerah belum berjalan maksimal;

- e. Konsistensi penerapan peraturan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal sehingga daerah kehilangan potensi sumber-sumber penerimaan daerah;
- f. Pendapatan yang bersumber dari piutang daerah belum dikelola dengan baik bagi peningkatan pendapatan daerah;
- g. Masih terbatasnya kualitas dan sarana prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi;
- h. Keterbatasan *skill* aparat dalam pengelolaan administrasi pendapatan daerah;
- i. Manajemen pengelolaan pada beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- j. Beberapa jenis potensi yang menjadi sumber pendapatan daerah belum ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai landasan hukumnya seperti pengenaan retribusi terhadap izin budidaya dibidang perikanan dan retribusi terhadap izin tinggal bagi tenaga kerja asing;
- k. Masih lemahnya mitra Pemerintah dalam hal ini pihak ketiga yang dipercayakan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak/retribusi daerah;
- l. Potensi pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, belum digali secara maksimal baik sektor perdesaan maupun sektor perkotaan;
- m. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari dana bagi hasil baik pusat maupun provinsi sering terlambat dan terhambat karena tidak akuratnya besaran alokasi yang ditetapkan dan sering berubah dari alokasi defenitif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sehingga dapat mengganggu stabilitas anggaran daerah;
- n. Kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu masih rendah, sehingga memperbesar tunggakan pajak;
- o. Peran aparat khususnya di tingkat desa/kelurahan belum maksimal dalam mengelola sumber pendapatan daerah.
- p. Adanya wabah virus corona yang mengakibatkan menurunnya pendapatan daerah.



## 2. Solusi

Berdasarkan persoalan-persoalan sebagaimana tersebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Mengkaji dan menetapkan potensi penerimaan daerah secara optimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengkaji dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi guna mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi antara OPD pengelola pendapatan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah;
- e. Meningkatkan penegakan disiplin atas penerapan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah.
- f. Mengoptimalkan pengendalian atas pengelolaan piutang daerah.
- g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perpajakan dan retribusi daerah;
- h. Meningkatkan kapasitas aparaturnya pengelola pajak dan retribusi daerah;
- i. Meningkatkan pengendalian serta mendorong kinerja para mitra pemerintah daerah di bidang penagihan pajak dan retribusi daerah;

### 1.4 5. Belanja Daerah

#### A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah diprioritaskan dan diarahkan untuk mendukung kebijakan strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (*added value*), berdasarkan sasaran dan capaian target sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020.

Kebijakan Anggaran Belanja disusun berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi dari perangkat daerah yang bersangkutan atau melaksanakan kebijakan lainnya tanpa melalui proses perencanaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu belanja juga diarahkan untuk peningkatan kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah demi tercapainya sasaran pembangunan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Tahun 2020 adalah tahun ketiga dari pelaksanaan periode 2017-2022 yang mengacu pada Visi Daerah **"Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata"** yang diwujudkan melalui pelaksanaan 5 Misi pembangunan daerah yakni :

1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Alokasi belanja pada setiap program dan kegiatan harus jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya, untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022.

#### **B. Target dan Realisasi Belanja Daerah**

Jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Flores Timur (anggaran setelah perubahan) dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.19  
Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	694.954.801.596,18	509.526.720.849,00	73,32
2	Belanja Langsung	459.947.047.684,15	374.981.295.057,50	81,53
<b>Jumlah</b>		<b>1.154.901.849.280,33</b>	<b>884.508.015.906,50</b>	<b>76,59</b>

Rincian alokasi dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 berdasarkan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung untuk tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 694.954.801.596,18 dengan realisasi sebesar Rp. 509.526.720.849,00 atau mencapai 73,32%, yang rinciannya terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.20  
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	408.153.888.861,18	399.995.710.772,00	98,00
2	Belanja Hibah	14.814.056.695,00	13.643.483.900,00	92,10
3	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	123.500.000,00	24,70
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.508.308.910,00	1.413.585.213,00	93,72
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	251.978.547.130,00	77.493.802.406,00	30,75
6	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,00	16.856.638.558,00	93,65
<b>Jumlah</b>		<b>694.954.801.596,18</b>	<b>509.526.720.849,00</b>	<b>73,32</b>

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

❖ Belanja Pegawai

Target belanja pegawai yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 408.153.888.861,18 dengan realisasi sebesar Rp. 399.995.710.772,00 atau mencapai 98% dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.21  
Target dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	324.495.724.346,98	319.543.037.839,00	98,47
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	78.874.870.110,20	75.703.583.729,00	95,98
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.356.880.000,00	3.356.800.000,00	100,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	34.125.200,00	0,00	-
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	438.386.310,00	438.386.310,00	100,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	953.902.894,00	953.902.894,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>408.153.888.861,18</b>	<b>399.995.710.772,00</b>	<b>98,00</b>

❖ Belanja Hibah

Belanja hibah yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.14.814.056.695,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.643.483.900,00 atau mencapai 92,10% dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.22  
Target dan Realisasi Belanja Hibah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.990.311.695,00	10.172.938.400,00	92,56
3	Belanja Hibah kepada kelompok/anggota Masyarakat	2.353.745.000,00	2.000.545.500,00	84,99
<b>Jumlah</b>		<b>14.814.056.695,00</b>	<b>13.643.483.900,00</b>	<b>92,10</b>

❖ Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja bantuan sosial yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.500.000,- atau mencapai 24,70%.

❖ Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa.

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.508.308.910,00 dengan realisasi Rp.1.413.585.213,00 atau mencapai 93,72%.

❖ Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.251.978.547.130,00 dengan realisasi Rp.77.493.802.406,00 atau mencapai 30,75%, dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.23  
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan  
Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	174.767.243.124,00	282.498.400,00	0,16
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	76.753.987.477,00	76.753.987.477,00	100
3.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	457.316.529,00	457.316.529,00	100
<b>Jumlah</b>		<b>251.978.547.130,00</b>	<b>77.493.802.406,00</b>	<b>30,75</b>

❖ Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya atau diluar kendali untuk pencegahan terhadap gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Anggaran yang dialokasikan untuk belanja tak terduga pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.18.000.000.000,- dengan realisasi Rp.16.856.638.558,00 atau mencapai 93,65%.

## 2. Belanja Langsung

Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp.459.947.047.684,15,00 dengan realisasi Rp.374.981.295.057,50 atau mencapai 81,53%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.24  
Target dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	74.410.570.715,00	69.264.593.422,00	93,08
2	Belanja Barang dan Jasa	201.524.101.598,65	182.805.287.649,00	90,71
3	Belanja Modal	184.012.375.370,50	122.911.413.986,50	66,80
<b>Jumlah</b>		<b>459.947.047.684,15</b>	<b>374.981.295.057,50</b>	<b>81,53</b>

## C. Permasalahan dan Solusi

### 1. Permasalahan

Dalam upaya pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, masih ditemui sejumlah permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut adalah :

- a. Adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga alokasi belanja diutamakan pada program kegiatan yang masuk skala prioritas sehingga kuantitas dan kualitas layanan publik yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Efektifitas pemanfaatan belanja belum optimal, yang disebabkan oleh pemanfaatan belanja yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Masih adanya kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja daerah.
- d. Masih adanya kelemahan pada sumberdaya aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- e. Adanya program dan kegiatan pemerintah pusat yang pendanaannya melalui DAK yang tidak disertakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) secara tepat waktu sehingga menghambat progress penyelesaian program dan kegiatan tersebut.
- f. Adanya *refocusing* dan realokasi akibat pandemi Covid-19.

### 2. Solusi

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, upaya atau solusi yang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut adalah :

- a. Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka perlu dilakukan berbagai upaya yang bersifat koordinatif maupun teknis, untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD, Alokasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pembiayaan alternatif untuk membiayai proyek-proyek strategis daerah.
- b. Meningkatkan pengendalian belanja daerah yang ditujukan untuk mewujudkan prioritas-prioritas pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah pada seluruh level struktur dan fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana DAK maupun alokasi pemerintah pusat lainnya.

e. Melakukan penyesuaian target anggaran dan output sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### 1.4.6 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan daerah yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu Pembiayaan daerah terdiri dari 2 komponen utama yakni :

- Penerimaan Pembiayaan Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah

##### A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (Silpa) maupun penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 43.783.488.695,92 dengan realisasi sebesar Rp. 43.786.038.695,92 atau mencapai 100,01% dengan rincian:

Tabel 1.25  
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.683.488.695,92	43.683.488.695,92	100
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	102.550.000,00	102,55
<b>Jumlah</b>		<b>43.783.488.695,92</b>	<b>43.786.038.695,92</b>	<b>100,01</b>

##### B. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penguatan modal terhadap perusahaan daerah, pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa pembayaran pokok utang yang jatuh tempo

kepada lembaga keuangan maupun pemberian pinjaman daerah kepada kelompok dan UKM.

Anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.000.000.000,- atau mencapai 100% dengan rincian :

Tabel 1.26  
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2020  
(sebelum diaudit oleh BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,-	3.000.000.000,-	100
<b>Jumlah</b>		<b>3.000.000.000,-</b>	<b>3.000.000.000,-</b>	<b>100</b>

### C. Permasalahan dan Solusi

#### 1. Permasalahan

Permasalahan utama dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembiayaan daerah adalah belum optimalnya investasi pemerintah dalam bentuk dana bergulir yang dikelola oleh pihak ketiga. Dana bergulir dimaksud, diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sesuai visi pembangunan daerah. Selain itu ada kecenderungan alokasi pembiayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah, tidak sepenuhnya dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif melainkan pemanfaatannya pada sektor konsumtif yang pada gilirannya menghambat pengembalian dana pinjaman.

#### 2. Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pembiayaan adalah meningkatkan upaya pengendalian dan pembinaan bagi masyarakat atau kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang menerima dana bergulir, serta melakukan pengendalian dan penagihan piutang daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan.



## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam perjalanan APBD ini mengalami perubahan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai upaya menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka otonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan berbagai perkembangan yang terjadi seperti tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi, baik dilingkungan internal maupun eksternal. Perkembangan-perkembangan ini tentunya bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran atau sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, maka disamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan, juga berimplikasi pada program kegiatan yang semula ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengalami perubahan yang disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan refocusing dan realokasi dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, sehingga program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memiliki kontribusi dalam pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan penanganan pandemi covid-19.

Perubahan APBD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 02 Nopember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 03 Nopember 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.1. Pendapatan

Anggaran Pendapatan sebelum perubahan adalah sebesar Rp.1.159.472.638.995,61 mengalami penurunan sebesar (Rp.45.354.278.411,20) menjadi Rp.1.114.118.360.584,41 atau (3,91%). Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Target Pendapatan Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran TA 2020

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>77.253.999.180,00</b>	<b>64.253.713.857,00</b>	<b>(13.000.285.323,00)</b>	<b>(16,83)</b>
	Hasil Pajak Daerah	14.108.416.380,00	13.244.589.179,00	(863.827.201,00)	(6,12)
	Hasil Retribusi Daerah	36.143.212.400,00	23.303.648.400,00	(12.839.564.000,00)	(35,52)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	6.488.206.825,00	1.488.206.825,00	29,76
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.002.370.400,00	21.217.269.453,00	(785.100.947,00)	(3,57)
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>856.532.920.000,00</b>	<b>784.620.182.396,00</b>	<b>(71.912.737.604,00)</b>	<b>(8,40)</b>
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.934.508.000,00	10.340.835.608,00	406.327.608,00	4,09
	Dana Alokasi Umum	664.193.435.000,00	595.654.496.000,00	(68.538.939.000,00)	(10,32)
	Dana Alokasi Khusus	182.404.977.000,00	178.624.850.788,00	(3.780.126.212,00)	(2,07)
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>225.685.719.815,61</b>	<b>265.244.464.331,41</b>	<b>39.558.744.515,80</b>	<b>17,53</b>
	Pendapatan Hibah	23.338.600.000,00	68.551.126.890,00	45.212.526.890,00	193,72
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.401.411.815,61	22.222.432.441,41	(3.178.979.374,20)	(12,51)
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	176.945.708.000,00	174.470.905.000,00	(2.474.803.000,00)	(1,40)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.159.472.638.995,61</b>	<b>1.114.118.360.584,41</b>	<b>(45.354.278.411,20)</b>	<b>(3,91)</b>

## 2.2. Belanja

Anggaran Belanja sebelum perubahan adalah sebesar Rp.1.161.572.638.995,61 mengalami penurunan sebesar (Rp.6.670.789.715,28) menjadi Rp.1.154.901.849.280,33 atau (0,57%). Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Target Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan  
Anggaran TA 2020

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>692.475.282.664,21</b>	<b>694.954.801.596,18</b>	<b>2.479.518.931,97</b>	<b>0,36</b>
	Belanja Pegawai	412.319.686.635,21	408.153.888.861,18	(4.165.797.774,03)	(1,01)
	Belanja Hibah	18.004.300.000,00	14.814.056.695,00	(3.190.243.305,00)	(17,72)
	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)
	Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	1.506.500.000,00	1.508.308.910,00	1.808.910,00	0,12
	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	258.644.796.029,00	251.978.547.130,00	(6.666.248.899,00)	(2,58)
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	18.000.000.000,00	17.000.000.000,00	1.700,00
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>469.097.356.331,40</b>	<b>459.947.047.684,15</b>	<b>(9.150.308.647,25)</b>	<b>(1,95)</b>
	Belanja Pegawai	72.763.522.022,00	74.410.570.715,00	1.647.048.693,00	2,26
	Belanja Barang dan Jasa	237.720.176.747,90	201.524.101.598,65	(36.196.075.149,25)	(15,23)
	Belanja Modal	158.613.657.561,50	184.012.375.370,50	25.398.717.809,00	16,01
	<b>Jumlah</b>	<b>1.161.572.638.995,61</b>	<b>1.154.901.849.280,33</b>	<b>(6.670.789.715,28)</b>	<b>(0,57)</b>

## 2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari 2 komponen utama yakni :

- Penerimaan Pembiayaan Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah

### 2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebelum perubahan adalah sebesar Rp.5.100.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.38.683.488.695,92 menjadi Rp.43.783.488.695,92 atau 758,50%.

### 2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebelum perubahan adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- tidak mengalami perubahan.

Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Target Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan  
Anggaran TA 2020

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.100.000.000,00</b>	<b>43.783.488.695,92</b>	<b>38.683.488.695,92</b>	<b>758,50</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.000.000.000,00	43.683.488.695,92	38.683.488.695,92	773,67
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.100.000.000,00</b>	<b>46.783.488.695,92</b>	<b>38.683.488.695,92</b>	<b>477,57</b>

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya																																																													
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran																																																															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																																													
<b>1.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b> (Urusan Pendidikan,Urusan Kepemudaan dan Olahraga)																																																																					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 156 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2020</li> <li>Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 288 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2020</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik</li> </ul>	<p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>250 lembar</td> <td>2.200.000</td> <td>250 lembar</td> <td>2.196.700</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td> <td>4 jenis</td> <td>41.028.000</td> <td>4 jenis</td> <td>40.664.050</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td> <td>17 orang</td> <td>83.400.000</td> <td>17 orang</td> <td>83.400.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</td> <td>23 jenis</td> <td>7.171.350</td> <td>23 jenis</td> <td>7.080.500</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td> <td>43 jenis</td> <td>116.858.650</td> <td>43 jenis</td> <td>116.848.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>338500 lembar</td> <td>139.825.000</td> <td>338500 lembar</td> <td>139.680.750</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td> <td>8 jenis</td> <td>3.096.900</td> <td>8 jenis</td> <td>3.058.900</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td> <td>3 jenis</td> <td>2.580.000</td> <td>3 jenis</td> <td>1.685.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td> <td>1.500 orang</td> <td>69.150.000</td> <td>1.500 orang</td> <td>69.144.500</td> </tr> <tr> <td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi</td> <td>76 kali</td> <td>311.237.600</td> <td>76 kali</td> <td>311.112.600</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran</td> <td>844 orang</td> <td>11.578.200.000</td> <td>844 orang</td> <td>11.569.000.000</td> </tr> </table> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td> <td>2 unit</td> <td>4.704.250</td> <td>2 unit</td> <td>4.522.500</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td> <td>1 unit</td> <td>34.405.000</td> <td>1 unit</td> <td>33.765.050</td> </tr> </table>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 lembar	2.200.000	250 lembar	2.196.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	41.028.000	4 jenis	40.664.050	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17 orang	83.400.000	17 orang	83.400.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23 jenis	7.171.350	23 jenis	7.080.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43 jenis	116.858.650	43 jenis	116.848.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	338500 lembar	139.825.000	338500 lembar	139.680.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	3.096.900	8 jenis	3.058.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	2.580.000	3 jenis	1.685.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.500 orang	69.150.000	1.500 orang	69.144.500	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	76 kali	311.237.600	76 kali	311.112.600	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	844 orang	11.578.200.000	844 orang	11.569.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit	4.704.250	2 unit	4.522.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	34.405.000	1 unit	33.765.050	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyusunan program dan kegiatan serta pendampingan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan</li> <li>Terlambatnya penetapan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2020</li> <li>Terlambatnya penetapan petunjuk teknis penggunaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah – sekolah penerima manfaat</li> <li>Terlambanya proses pengadaan barang atau jasa terutama yang bersumber dari DAK untuk pengadaan peralatan pembelajaran dan peralatan pendidikan lainnya karena keterlambatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalokasian anggaran dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan, pembinaan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>Ketaatan pelaksanaan program atau kegiatan sesuai kalender kerja tahunan yang telah ditetapkan</li> <li>Perlu adanya koordinasi yang terintegrasi sejak awal tahun anggaran dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana BOS</li> <li>Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan</li> <li>Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara interen</li> </ul>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 lembar	2.200.000	250 lembar	2.196.700																																																																		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	41.028.000	4 jenis	40.664.050																																																																		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17 orang	83.400.000	17 orang	83.400.000																																																																		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23 jenis	7.171.350	23 jenis	7.080.500																																																																		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	43 jenis	116.858.650	43 jenis	116.848.000																																																																		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	338500 lembar	139.825.000	338500 lembar	139.680.750																																																																		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	3.096.900	8 jenis	3.058.900																																																																		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	2.580.000	3 jenis	1.685.000																																																																		
Penyediaan Makanan dan Minuman	1.500 orang	69.150.000	1.500 orang	69.144.500																																																																		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	76 kali	311.237.600	76 kali	311.112.600																																																																		
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	844 orang	11.578.200.000	844 orang	11.569.000.000																																																																		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit	4.704.250	2 unit	4.522.500																																																																		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	34.405.000	1 unit	33.765.050																																																																		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	4.600.000	6 jenis	4.600.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>penetapan barang maupun penyedia pada sistem tersebut</li> <li>Penyelesaian sejumlah paket pekerjaan tidak tepat waktu</li> <li>Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS pada satuan pendidikan negeri dan swasta belum tertib dan tepat waktu</li> <li>Terbatasnya sarana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan</li> <li>Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur SKPD dinas PKO ( aspek jumlah, pendidikan, disiplin dan kinerja)</li> <li>Pengendalian dan pengawasan internal SKPD belum maksimal Adanya refocusing anggaran karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ditiadakan.</li> </ul>	Menegakkan integritas, nilai etika dan praktik pembinaan sumber daya manusia melalui penyusunan dan penerapan aturan perilaku serta kebijakan lain berisi tentang standar perilaku etis serta tindak disiplin yang tepat
		Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 157 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Operasioanal Pendidikan Kesetaraan Tahap I	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
			Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Pamong Belajar	2.200 orang	44.852.050	2200 orang	44.850.000		
		Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 289 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Operasioanal Pendidikan Kesetaraan Tahap II	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	40 buku	36.485.999	40 buku	36.243.600		
			<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>						
			Penyelenggaraan PAUD Non Formal	266 lembaga	782.189.500	266 lembaga	778.100.000		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD	46 paket	3.863.209.400	46 paket	3.774.038.900		
			<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>						
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP	192 sekolah	44.861.336.443	192 sekolah	32.036.168.810		
			Penyelenggaraan Paket A Setara SD	1 kelompok belajar	76.044.850	1 kelompok belajar	74.041.850		
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	75 warga belajar	228.745.925	75 warga belajar	221.227.750		
			Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	187 Lembaga	23.267.900	187 Lembaga	22.017.900		
			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	343 sekolah	99.030.000	343 sekolah	93.927.000		
			Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional/Ujian Sekolah SD/MI/SDLB	6085 siswa	199.087.000	6085 siswa	199.083.000		
			Ujian Nasional/Ujian Sekolah UN/US SMP/MTs	5133 siswa	622.560.250	5133 siswa	622.538.000		
			Olimpiade Sains Tingkat SMP	228 Siswa	22.241.000	228 Siswa	22.241.000		
			Olimpiade Sains Nasional SD	596 Siswa	52.955.100	596 Siswa	52.955.100		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu	122 Paket	27.355.679.457	122 Paket	27.154.463.176		
			<b>Program Pendidikan Non Formal</b>						
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	3 Paket	355.167.300	3 Paket	346.962.300		
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C	440 warga belajar	42.225.000	440 warga belajar	42.225.000		
			Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	87 warga belajar	276.046.450	87 warga belajar	218.890.000		
			<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>						
			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	130 orang	6.153.050	130 orang	6.153.050		
			Diklat Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI, SMP/MTs)	240 orang	9.239.000	240 orang	9.239.000		
			<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>						
			Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	20 buku	43.260.000	20 buku	42.993.000		
			<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>						
			Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	25 orang	1.000.000	25 orang	1.000.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>						
			Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Lapangan	8.553.459.646	1 Lapangan	8.055.425.730		
<p>Dari seluruh gambaran program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas dan juga sejalan dengan misi Daerah Flores Timur Selamatkan Orang Muda Flores Timur dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan program kegiatan berdasarkan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) melalui Dokumen Perencanaan Anggaran. Dapat dikatakan bahwa terdapat kesesuaian antara target kinerja yang sudah dibuat melalui perjanjian kerja dengan berbagai indikator kinerja dengan Realisasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebesar Rp. 97.369.300.335,- dari target Rp. 103.653.203.120- atau sebesar 93,94%.</p>									
2.	<b>DINAS KESEHATAN</b> (Urusan Kesehatan)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada program upaya Kesehatan masyarakat kegiatan peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan, beberapa kegiatan di Puskesmas tidak dilakukan sebanyak yang direncanakan akibat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2020 akan ditindaklanjuti di tahun 2021</li> <li>Penyelesaian fisik rehab puskesmas direncanakan selesai di</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 lembar	2.751.000	450 lembar	2.751.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	183.000.000	12 bulan	182.976.902		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 stnk dan Pajak	10.300.000	3 stnk dan pajak	7.317.030		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8 orang	49.200.000	8 orang	44.400.000	<p>pandemi Covid-19 dan juga dana BOK tambahan untuk insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 tidak semua tersalurkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada program pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya pada kegiatan rehabilitasi sedang/berat/total Puskesmas, Pustu dan jaringannya dengan target rehab puskesmas sebanyak 2 unit, baru 1 unit yang terealisasi 100% sedangkan 1 unit fisiknya belum selesai 100%</li> <li>• Kapasitas berbasis kinerja tidak tercapai, bisa karena jumlah nakes utamanya dokter terkadang kosong beberapa bulan, karena kontrak habis atau karena ijin/cuti, adanya penonaktifan peserta pusat sehingga jumlah peserta turun.</li> </ul>	<p>awal tahun 2021 dan sisa keuangan akan dianggarkan kembali di tahun 2021</p>	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 jenis	4.718.000	16 jenis	4.718.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	13 jenis	25.920.000	13 jenis	25.919.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.015 lbr	32.040.000	104.500 lbr	31.242.600			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	13.904.100	7 jenis	13.904.000			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	15.300.000	7 jenis	15.300.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	325 kali	16.125.000	293 kali	16.115.000			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	70 kali	113.887.466	60 kali	111.631.811			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	479 orang	7.913.400.000	479 orang	7.684.720.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit AC	15.097.000	2 unit AC	14.747.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	27.875.000	1 paket	27.875.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	80.432.500	5 unit	80.413.645			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 unit (AC)	6.000.000	9 unit (AC)	6.000.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7 unit laptop	3.000.000	4 unit laptop	3.000.000			
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
			Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional	100 orang	77.770.796	100 orang	75.970.796			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 dokumen	30.722.000	25 dokumen	30.642.000			



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>									
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	274 item obat, BMPH 170, 2 jenis vaksin	4.185.977.105	274 item obat, BMPH 170, 2 jenis vaksin	4.084.511.170		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 puskesmas	8.160.500	5 puskesmas	8.145.000		
			Pengadaan Alat Kesehatan	1 set	368.154.681	1 set	368.154.681		
			Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan	21 puskesmas	339.158.750	21 puskesmas	263.839.805		
<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>									
			Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	69.740 orang	18.783.582.000	65.389 orang	18.486.330.300		
			Dukungan Biaya Operasional Dana Kapitasi JKN Puskesmas	21 puskesmas	11.683.376.063	21 puskesmas	9.584.126.025		
			Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BOK)	21 puskesmas	25.906.813.250	21 puskesmas	23.277.119.919		
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>									
			Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makan Hasil Produksi Rumah Tangga	19 kecamatan	159.328.000	19 kecamatan	147.517.000		
<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>									
			Pembinaan Program Desa Siaga	40 desa	15.360.000	12 desa	15.360.000		
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>									
			Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	247 balita stunting, 236 bumil kel	490.250.000	247 balita stunting, 236 bumil kel	490.225.000		
			Pengadaan Alat Antropometri	179 unit	1.502.902.400	179 unit	1.502.902.400		
<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>									
			Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman	25 stbm	220.128.750	23 stbm	178.263.541		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan	15 unit	1.354.999.685	15 unit	1.342.999.685		
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>									
			Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	20 desa	43.347.500	25 desa	42.665.008		
			Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	1 unit	47.710.000	1 unit	42.010.000		
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2 kecamatan	134.750.000	19 kecamatan	133.135.000		
			Peningkatan Imunisasi	4 kali	66.240.000	4 kali	39.494.378		
			Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	5 kasus	33.254.000	1 kasus	33.170.000		
			Penyediaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit Menular	4 unit	798.774.371	4 unit	798.729.371		
<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>									
			Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	20 unit	529.316.699	20 unit	528.816.699		
			Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah	1 kali	4.580.000	1 kali	4.580.000		
			Pendampingan Akreditasi Puskesmas	19 puskesmas	228.585.000	2 puskesmas	220.299.000		
<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>									
			Pembangunan Puskesmas	1 unit	85.265.000	1 unit	83.900.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	2 unit	1.444.127.438	2 unit	1.423.817.438		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	1 unit	168.200.062	1 unit	168.200.062		
			Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Para Medis Puskesmas	1 unit	354.553.548	1 unit	354.553.548		
			Rehabilitasi Sedang/Berat/Total Puskesmas, Pustu dan jaringannya	3 unit	4.434.928.500	2 unit	3.833.041.799		
<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata</b>									
			Pembangunan Rumah Sakit	1 paket	11.507.114.012	1 paket	4.921.081.652		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular</b>							
			Pemeriksaan IVA Test	1 kali	21.753.500	1 kali	21.706.000			
			Penyediaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	82 unit	564.072.886	82 unit	564.072.886			

Pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat memperhatikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp.82.068.936.501,- dari target Rp. 94.107.106.562,- atau sebesar 87,06. %

**3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA**  
(Urusan Kesehatan)

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4.912.500	12 bulan	4.751.033
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	540.000.000	12 bulan	528.567.476
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	17.250.000	12 bulan	13.555.070
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	74.887.500	12 bulan	74.887.500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	180.000	12 bulan	120.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	114.667.000	12 bulan	114.549.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	48.232.500	12 bulan	47.945.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	114.860.500	12 bulan	114.860.380
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	12 bulan	16.960.000	12 bulan	16.750.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	402.825.000	12 bulan	393.870.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	163.896.823	12 bulan	163.671.423
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	5.490.960.000	12 bulan	5.346.210.000

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		(9)	(10)	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pembangunan Rumah Dinas	1 unit	300.115.189	1 unit	293.449.491			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	270.099.000	2 unit	270.099.000			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	74.450.000	3 unit	740.350.000			
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 paket	33.400.000	6 paket	33.375.250			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	62.961.000	1 paket	62.106.500			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	81.940.000	10 unit	81.921.029			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	62.403.500	12 bulan	56.325.272			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.800.000	12 bulan	1.800.000			
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	21 orang	127.205.000	20 orang	115.747.573			
			Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	28 orang	14.915.000	28 orang	14.915.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	8 dokumen	27.719.850	8 dokumen	26.947.650			
			<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>							
			Pelayanan Klinik VCT	6 jenis	59.293.000	6 jenis	59.293.000			
			Pelayanan Penderita TBC	1 jenis	72.482.147	1 jenis	72.482.050			
			<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>							
			Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan	4 kali	80.247.500	4 kali	80.152.500			
			Penilaian dan Survey Akreditasi Rumah Sakit	21 kali	94.382.500	2 kali	94.373.950			
			Review Master Plan Rumah Sakit	1 dok	228.531.750	1 dok	228.206.750			
			Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	1 paket	128.965.000	1 paket	127.807.860			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata</b>							
			Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	4 pktet	29.462.843.045	4 paket	4.590.304.019			
			Pengadaan Obat-Obatan dan Kelengkapan Rumah Sakit	4 jenis	8.861.595.200	4 jenis	8.840.103.597			
			Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	2 jenis	93.995.500	2 jenis	93.095.000			
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	20 jenis	459.833.356	20 jenis	448.249.333			
			Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	50 jenis	3.626.105.600	50 jenis	3.481.208.195			
			Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	109.jenis	368.545.000	109.jenis	368.545.000			
			Pengadaan Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	100 %	864.333.292	100%	861.933.292			
			Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Neo Natal Intensive Care Unit (NICU)	100 %	1.731.987.808	100 %	1.729.577.708			
			Pembangunan Gedung Instalasi Laboratorium	100 %	417.954.000	100 %	417.925.000			
			<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	5 jenis	421.906.750	5 jenis	386.648.800			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Mobil Jenazah	4 jenis	250.000.000	4 jenis	249.993.500			
			Pemeliharaan Alat Elektro Medik dan Penyediaan Gas Medik	1 unit	122.701.000	1 unit	122.602.840			
			<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>							
			Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	75 kali	218.100.000	55 kali	160.453.551			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 kali	42.880.000	4 kali	40.076.777			
			Kerjasama Pelayanan Dokter Spesialis	4 orang	1.802.490.400	4 orang	1.769.886.577			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah Rp. 32.073.692.217,- dari target Rp. 57.455.813.210,- atau sebesar 55,82%.									
<b>4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)									
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								<ul style="list-style-type: none"> <li>Masalah Dana masih terbatas untuk bisa memenuhi prioritas usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat</li> <li>Kurangnya perhatian mengenai kesesuaian antara Renstra, Tapkin dan data untuk penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah</li> <li>Adanya wabah virus Corona-19 yang sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk sektor Infrastruktur</li> <li>Masih banyak sarana dan prasarana apatur yang belum dibangun dan yang rusak</li> <li>Persoalan lahan yang sering menjadi kendala dalam pembangunan</li> <li>Keadaan topografi dan belum seimbangnnya pembangunan transportasi darat antara perkotaan dan perdesaan</li> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga Daerah Aliran Sungai/ Kali</li> <li>Masih banyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kerjasama lintas sektor maupun pendekatan ke lembaga adat dan tokoh adat dan tokoh masyarakat demi kelancaran Program Kegiatan</li> <li>Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pemenuhan data yang melibatkan Bagian-Bagian di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya kedepan perlu diadakan persamaan persepsi melalui peningkatan pemahaman seluruh bidang mengenai akuntabilitas kinerja terutama Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah</li> <li>Meningkatkan komunikasi dan pola pendekatan kepada masyarakat</li> </ul>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.625.000	12 bulan	730.600					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	66.720.000	12 bulan	42.180.500					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	3.700.000	12 bulan	3.700.000					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	16.360.000	12 bulan	7.024.220					
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	70.221.000	12 bulan	63.000.000					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	5.712.414	12 bulan	5.695.225					
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	67.688.650	12 bulan	67.624.455					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	42.631.750	12 bulan	42.628.800					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.346.562	12 bulan	2.298.750					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	86.925.000	12 bulan	86.915.000					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.440.000	12 bulan	680.000					
Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	7.695.000	12 bulan	7.658.500					
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	153.534.693	12 bulan	152.539.643					
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	45 orang	621.021.000	45 orang	616.400.000					
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	74.496.000	2 unit	74.496.000					
Pengadaan Mebeleur	1 unit	6.000.000	1 unit	5.250.000					

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	59.300.000	1 unit	55.316.116	<p>Infrastruktur yang perlu dibangun dalam konsep Desa Membangun kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kesadaran masyarakat serta persoalan penguasaan lokasi yang sering menjadi konflik</li> </ul>	
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	6 dokumen	26.961.400	6 dokumen	18.418.850		
			<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>						
			Pembangunan Jalan	40 Km	3.327.835.686	40 Km	3.315.370.002		
			Pembangunan Jembatan	30	312.716.183	1 unit (1,50 M <sup>1</sup> )	311.179.783		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	12.925.000		
			Peningkatan Jalan	17,24 KM	40.722.481.154	17,24 KM	40.699.757.352		
			<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>						
			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	20 dokumen	91.176.000	20 dokumen	86.318.050		
			<b>Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>						
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3 Km	628.877.750	3 Km	618.163.450		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>						
			Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	3 unit	86.650.000	1 unit	86.249.970		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	15 unit	307.375.500	14 unit	305.416.218		
			<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya</b>						
			Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1000 M <sup>1</sup>	635.885.633	484,60 M <sup>1</sup>	630.296.483		
			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	5000 M <sup>1</sup>	5.280.344.323	20474,62 M <sup>1</sup>	5.275.708.263		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	13.250.000	12 bulan	12.930.000		
			<b>Program Pengendalian Banjir</b>						
			Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	1875 M <sup>1</sup>	2.613.127.150	335,60	2.613.049.850		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	59.300.000	1 unit	55.316.116	<p>Infrastruktur yang perlu dibangun dalam konsep Desa Membangun kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kesadaran masyarakat serta persoalan penguasaan lokasi yang sering menjadi konflik</li> </ul>	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	6 dokumen	26.961.400	6 dokumen	18.418.850		
<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>									
			Pembangunan Jalan	40 Km	3.327.835.686	40 Km	3.315.370.002		
			Pembangunan Jembatan	30	312.716.183	1 unit (1,50 M')	311.179.783		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	12.925.000		
			Peningkatan Jalan	17,24 KM	40.722.481.154	17,24 KM	40.699.757.352		
<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>									
			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	20 dokumen	91.176.000	20 dokumen	86.318.050		
<b>Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>									
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3 Km	628.877.750	3 Km	618.163.450		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>									
			Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	3 unit	86.650.000	1 unit	86.249.970		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	15 unit	307.375.500	14 unit	305.416.218		
<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya</b>									
			Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1000 M <sup>1</sup>	635.885.633	484,60 M <sup>1</sup>	630.296.483		
			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	5000 M <sup>1</sup>	5.280.344.323	20474,62 M <sup>1</sup>	5.275.708.263		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	13.250.000	12 bulan	12.930.000		
<b>Program Pengendalian Banjir</b>									
			Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	1875 M <sup>1</sup>	2.613.127.150	335,60	2.613.049.850		



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pembangunan Talud Pengamanan Pemukiman	1.125 M <sup>1</sup>	226.894.000	81,35M <sup>1</sup>	226.103.900		
<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>									
			Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	12 bulan	103.102.944	12 bualn	103.102.944		
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>									
			Revisi Rencana Tata Ruang	4 dok	1.093.590.000	1 dok	1.091.092.968		
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>									
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	31.246.575	100%	31.005.000		
<b>Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi</b>									
			Pembangunan Jaringan air Bersih/Air Minum	100%	2.225.212.690	100%	2.217.515.940		
<p>Pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat memperhatikan berbagai infrastruktur yang ada di daerah. Hal ini tergambar dari misi Daerah Flores Timur yaitu Selamatkan Ifranstruktur Flores Timur, melalui program kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Dari berbagai indikator yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja, maka realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung misi Selamatkan Infrastruktur pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 58.888.741.832,- Dari target Rp. 59.027.144.057,- atau sebesar 99,77 %.</p>									
<b>5.</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b> (Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan)								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Bupati Flores Timur Nomor. 110 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur</li> </ul>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran dialokasikan Rp. 75.100.000 untuk kegiatan ini dipangkas untuk pembiayaan Covid-19 menjadi 45.517.00</li> <li>Anggaran ini pagu awal Rp. 75.220.000 untuk kegiatan ini dipangkas untuk pembiayaan Covid-19 menjadi 17.140.000</li> <li>Anggaran dialokasikan Rp. 813.655.000 untuk kegiatan RP3KP dipangkas untuk pembiayaan Covid-19 menjadi 14.244.100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan di usulkan kembali di tahun berikut</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	752 Kali	1.633.000	752 Kali	1.626.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	17.837.401		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	2.100.000	4 Unit	1.196.250		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Kali	40.339.000	12 Kali	40.339.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18 Jenis	2.857.000	18 Jenis	2.852.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	29 Jenis	20.000.000	29 Jenis	19.955.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1112 Buku	15.138.500	1112 Buku	15.135.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Komponen	3.720.000	3 Komponen	3.610.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	480 Eksampler	3.840.000	480 Eksampler	3.365.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1821 Dos	19.000.000	1821 Dos	18.977.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	125 Kali	113.336.048	125 Kali	113.276.048		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	28 Orang	387.510.000	28 Orang	387.396.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	53.200.000	4 Jenis	53.200.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	11.000.000	4 Unit	10.930.451		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	30 Buku	32.110.000	30 Buku	31.953.000		
<b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>									
			Koordinasi Pendaftaran Tanah	20 Desa	45.517.000	5 Kecamatan	44.809.337		
			Penyusunan Database Bidang pertanahan	1 Buku	17.140.000	Dalam Tahap Pengumpulan Data	16.690.000		
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>									
			Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	50 Rumah	884.465.750	50 Rumah	884.361.000		
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)	1 Buku	14.244.100	Dalam Tahap Pengolahan Data	14.244.100		
<b>Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan</b>									
			Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	2 Desa	27.628.000	2 Desa	27.217.500		
			Penyuluhan Hukum Pertanahan	5 Kecamatan	20.040.000	5 Kecamatan	20.015.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>							
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Pemukiman	2 Lokasi	526.720.500	2 Lokasi	526.384.000			
			Pembangunan Talud Pengaman Lingkungan	1 Lokasi	148.251.000	1 Lokasi	148.020.000			
			<b>Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi</b>							
			Peningkatan Pelayanan Air Bersih	1092 SR	3.613.651.000	1092 SR	3.582.500.600			
			Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik	552 Unit	3.037.544.800	552 Unit	3.034.768.150			

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebesar Rp.9.020.658.337,- dari target Rp.9.066.985.698,- atau sebesar 99,49%.

#### 6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur</li> </ul>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian dana dialihkan ke Covid-19 sehingga beberapa program dan Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020.</li> <li>Kualitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai, oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas SDM baik melalui pembinaan dan pelatihan internal.</li> <li>Kehadiran POL PP Kab. Flotim masih belum dipahami dan dikenal oleh Instansi atau Unit Kerja lainnya.</li> <li>Adanya Image yang kurang kondusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa Dana disetor ke Kas Daerah</li> <li>Pemerintah Kab. Flotim memberikan penegasan kepada para pemimpin SKPD dan Instansi terkait lainnya yang mempunyai Perda bersifat mengatur agar proses penyelidikan terhadap masalah-masalah pelanggaran Perda dan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi di Wilayah Flotim untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan</li> </ul>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 lembar	1.170.000	195 lembar			1.169.800
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	15.000.000	12 bulan			14.639.835
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit roda 6, 1 unit roda 4 dan 13 unit roda 2	7.056.770	2 unit roda 6, 1 unit roda 4 dan 13 unit roda 2			7.056.770
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6 orang	46.200.000	6 orang			46.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18 jenis	2.838.500	18 jenis			2.838.500
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	28.050.250	40 jenis			28.050.250
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000 lbr dan 242 buku	12.745.600	26.000 lbr dan 242 buku			12.745.600
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	2.521.350	10 jenis			2.521.350
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	3.660.000	3 jenis			3.085.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	500 dos	25.135.000	500 dos	25.135.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	67.376.230	12 bulan	67.376.230	terhadap keberadaan Sat. Pol. PP • Kurangnya keterlibatan aktif dari Sat. Pol. PP dgn Banpol PP Kecamatan sehingga dalam hal koordinasi antar wilayah berjalan lambat dan kurang responsive.	melibatkan PNS yang berada di Sat. Pol. PP Kab. Flotim • Mengadakan pelatihan dan bimtek bagi anggota Sat. Pol. PP Kab. Flotim guna meningkatkan Sumber Daya Aparatur bagi kelancaran Pelaksanaan tugas • Lebih mengutamakan upaya preventif dari pada upaya represif dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya para pengunjung rasa yang menyalurkan aspirasinya agar tidak berbuat anarkis guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	70 orang	943.200.000	70 orang	943.200.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20 jenis	22.988.950	20 jenis	22.974.500			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	74.344.000	12 bulan	74.274.685			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	5.000.000	5 jenis	3.700.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	16 dokumen	43.031.200	16 dokumen	42.998.200			
			<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>							
			Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	7 kegiatan	159.460.000	7 kegiatan	158.910.000			
			<b>Program Pemeliharaan Keamanan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>							
			Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	12 bulan	20.920.100	12 bulan	20.435.100			
			Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah	2 perda	8.432.000	2 perda	8.322.000			
			Operasi Gabungan	2 kegiatan	31.400.000	2 kegiatan	31.290.000			
			Pengamanan Demonstrasi	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.285.000			
			Pengawasan/ Pengamanan Pejabat dan Tamu-Tamu	12 bulan	16.000.000	12 bulan	15.970.000			
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>							
			Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas LINMAS	12 bulan	2.000.000	12 bulan	1.880.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 1.536.561.590,- dari target Rp. 1.540.929.950,- atau sebesar 99,72 %										

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> (Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)									
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	145 lembar	744.000	145 lembar	600.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	22.890.000	12 bulan	20.276.040			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 berkas	11.514.500	12 berkas	10.307.310			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 orang	41.400.000	12 orang	41.400.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15 jenis	3.417.700	15 jenis	3.410.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	41 jenis	22.415.000	41 Jenis	22.400.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	10.295 lembar	13.550.000	10.295 lembar	13.546.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	1.310.000	1 jenis	1.310.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	1.500.000	3 jenis	1.110.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	115 porsi	8.595.000	115 porsi	8.250.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	138 kali	114.809.250	138 kali	114.548.000			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	6 orang	82.800.000	6 orang	82.800.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	3 jenis	2.000.000	3 jenis	1.750.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3 jenis	2.000.000	3 jenis	2.000.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	5 dokumen	15.725.000	5 dokumen	15.680.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> (Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)									
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	145 lembar	744.000	145 lembar	600.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	22.890.000	12 bulan	20.276.040			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 berkas	11.514.500	12 berkas	10.307.310			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 orang	41.400.000	12 orang	41.400.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15 jenis	3.417.700	15 jenis	3.410.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	41 jenis	22.415.000	41 Jenis	22.400.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.295 lembar	13.550.000	10.295 lembar	13.546.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	1.310.000	1 jenis	1.310.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	1.500.000	3 jenis	1.110.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	115 porsi	8.595.000	115 porsi	8.250.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	138 kali	114.809.250	138 kali	114.548.000			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	6 orang	82.800.000	6 orang	82.800.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	3 jenis	2.000.000	3 jenis	1.750.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3 jenis	2.000.000	3 jenis	2.000.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	5 dokumen	15.725.000	5 dokumen	15.680.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>						
			Fasilitasi KOMINDA dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	20 kali	71.654.350	20 kali	70.627.000		
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aktual	5 kali	187.036.250	5 kali	183.515.000		
			Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	10 kali	103.942.700	10 kali	102.885.000		
			<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>						
			Rapat Koordinasi Rutin dan Insidental bersama Lembaga Kemitraan	3 kali	29.503.000	3 kali	28.895.000		
			<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>						
			Peningkatan Penataan Administrasi Bantuan Keuangan dan Penguatan Kelembagaan	10 kali	18.937.000	10 kali	18.937.000		

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya karakter orang muda dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.744.246.350,- adalah dari target Rp. 755.743.750,- atau sebesar 98,48%

**8. DINAS SOSIAL**  
(Urusan Sosial)

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian keluarga miskin belum tersentuh bantuan</li> <li>Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Warga KAT masih dalam tahap seleksi, dikarenakan Pandemi Covid-19 maka dana bantuan pemberdayaan dihalikan untuk mengatasi Pandemi Covid-19.</li> <li>Kegiatan ini masih dalam tahap persiapan, dikarenakan Pandemi Covid-19 maka dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dilakukan pendataan langsung ke masyarakat dan hasil data langsung di-entry di dalam aplikasi SIKS_NG</li> <li>direncanakan kembali di tahun anggaran berikut</li> <li>Untuk tenaga psikolog masih menggunakan para rohaniwan baik katolik maupun islam (sesuai kejadian)</li> <li>Perlu ditingkatkan</li> </ul>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6.140.000	400 lembar perangko dan 500 lembar materai			4.853.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	56.250.000	12 Bulan			53.659.675
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	9.610.000	Pengurusan surat kendaraan roda 2 (4 unit) dan roda 4 (4 unit)			7.672.810
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6 Orang	34.450.000	6 Orang			34.450.000

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18 Jenis	4.684.250	18 Jenis	4.684.000	bantuan pemberdayaan dialihkan untuk mengatasi Pandemi Covid-19 • Kekurangan tenaga ahli khususnya psikolog dan kurangnya sarana komputer untuk mendukung administrasi RPTC • Kekurangan tenaga ahli khususnya psikolog dan kurangnya sarana komputer untuk mendukung administrasi RPTC • Bantuan yang diberikan kepada masyarakat sangat terbatas • Masih banyak rumah tangga miskin (RTM) belum terakomodir dalam program PKH • Kegiatan rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti masih dalam tahap persiapan, dikarenakan pandemi Covid-19 maka dana ini dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 • Dari target, para penyandang cacat yang seharusnya di bantu 150 orang, tetapi terealisasi hanya 24,27 % saja dari target yang ditentukan di karenakan dana sebagian dialihkan ke Covid-19 • 3 ODK dikirim ke balai besar rehabilitasi sosial	pengadaan bantuan sosial untuk masalah ini • Dapat dilakukan pendataan langsung kemasyarakat dan hasil pendataan langsung di-entry dalam aplikasi SIKS-NG
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	35 Jenis ATK	35.025.379	35 Jenis ATK	34.980.000			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	27.072.500	Penggandaan sebanyak 49.945 dan 105 penjiilan buku	27.072.400			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7.081.373	12 Jenis	6.994.000			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	900.000	12 Bulan	900.000			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12.015.000	271 kotak nasi dan 259 air minum	12.015.000			
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	134.297.800	152 kali	133.857.400			
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	20 Orang	273.350.000	20 Orang	271.050.000			
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	91.019.250	12 Bulan	91.005.500			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	58.217.500	2 unit roda 2, 4 unit roda 4 dan 3 speedboat	57.979.000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	26.575.000	12 Bulan	26.575.000			
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	32 Buku	41.494.000	32 Buku	41.324.000			
		<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>							
		Pemberdayaan Bagi Keluarga Fakir Miskin	14.108 KPM, UEP 98 kelompok, rehab rumah 7 unit	1.494.141.100	Bantuan sembako 16.431 KPM, rehab 7 unit rumah, rehab	1.491.818.900			



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya		
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
						rumah adat 2 unit, kube UEP sebanyak 126 kelompok (1.260 orang)		penyangang disabilitas (BBRSPD) di Solo tp karena Pandemi Covid-19, 3 ODK tersebut di kembalikan.			
			Pendampingan Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100 KK di 2 desa	13.700.600	0	13.700.600				
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>											
			Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	300 siswa/i	6.000.000	0	6.000.000				
			Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre termasuk Bagi Korban Bencana	25 Klien	132.850.000	13 Klien	131.793.800				
			Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Beras Bansos 8.000 Kg	186.169.000	Bantuan beras 6.000 Kg (untuk 35 KK / 232 jiwa)	185.382.300				
			Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di Daerah Konflik/Perbatasan	2 Desa	131.161.800	2 Desa	131.094.300				
			Pemberian Bantuan Bagi PMKS pada Panti dan Orsos	6 Panti	119.351.750	6 Panti	119.155.800				
			Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	12.042 KPM	175.533.000	11.601 KPM	175.457.000				
			Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Luar Panti	600 lansia	28.455.000	0	28.455.000				
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>											
			Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	150 Orang	30.310.000	16 orang (alat bantu kursi roda sebanyak 4 buah, tongkat ketiak sebanyak 3	30.290.000				

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						pasang, alat bantu dengar sebanyak 8 buah			
			Pengobatan Orang dengan Kecacatan yang Sakit, Bantuan Pendidikan Bagi ODK, Pengiriman dan Pemberdayaan ODK	50 Orang	37.042.900	3 ODK	37.022.900		
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>									
			Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	19 orang TKSK, 18 kelompok/11 orang	1.506.303.900	19 orang TKSK 31 kelompok KT/191 orang	1.485.747.600		

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kerja adalah Rp.4.644.989.985,- dari target Rp.4.679.201.102,- atau sebesar 99,27%.

**9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
(Urusan Sosial)

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Hibadan Pengelolaan Hiba.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 741 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hiba</li> </ul>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya pengurangan anggaran pada setiap sub kegiatan kegiatan karena adanya Pandemi Covid-19</li> <li>Waktu penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan sangat pendek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk program yang tidak diakomodir serta program yang diakomodir namun volume anggaran dikurangi akan ditindaklanjuti di tahun anggaran yang akan datang</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 kali	1.998.000	450 kali	1.996.200		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	52.200.000	12 bulan	51.946.279		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	7.500.000	20 unit	7.055.770		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	39.215.000	12 bulan	39.215.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 jenis	5.761.500	16 jenis	5.761.500		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis	43.893.500	50 jenis	43.840.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	26.190.200	2 paket	26.190.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	1.320.250	8 jenis	1.309.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.095 exemplar	2.820.000	1.095 exemplar	2.820.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						pasang, alat bantu dengar sebanyak 8 buah			
			Pengobatan Orang dengan Kecacatan yang Sakit. Bantuan Pendidikan Bagi ODK, Pengiriman dan Pemberdayaan ODK	50 Orang	37.042.900	3 ODK	37.022.900		
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>									
			Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	19 orang TKSK, 18 kelompok/11 orang	1.506.303.900	19 orang TKSK 31 kelompok KT/191 orang	1.485.747.600		

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kerja adalah Rp.4.644.989.985,- dari target Rp.4.679.201.102,- atau sebesar 99,27%.

**9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
(Urusan Sosial)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Hibadan Pengelolaan Hiba.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 741 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hiba</li> </ul>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 kali	1.998.000	450 kali	1.996.200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya pengurangan anggaran pada setiap sub kegiatan kegiatan karena adanya Pandemi Covid-19</li> <li>Waktu penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan sangat pendek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk program yang tidak diakomodir serta program yang diakomodir namun volume anggaran dikurangi akan ditindaklanjuti di tahun anggaran yang akan datang</li> </ul>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	52.200.000	12 bulan	51.946.279		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	7.500.000	20 unit	7.055.770		
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	39.215.000	12 bulan	39.215.000		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 jenis	5.761.500	16 jenis	5.761.500		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis	43.893.500	50 jenis	43.840.500		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	26.190.200	2 paket	26.190.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	1.320.250	8 jenis	1.309.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.095 exemplar	2.820.000	1.095 exemplar	2.820.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Makanan dan Minuman	500 dos	13.860.000	500 dos	13.860.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	11 kali	154.810.300	11 kali	154.810.300		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	20 orang	289.800.000	20 orang	289.800.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pengadaan peralatan gedung kantor	2 jenis	44.679.000	2 jenis	44.679.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1.780.000	1 unit	1.780.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	136.130.000	7 unit	136.106.334		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	53 unit	4.800.000	53-unit	4.794.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	8 dokumen	30.000.000	8 dokumen	30.000.000		
			<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana</b>						
			Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana	19 kecamatan	139.845.500	19 kecamatan	139.759.700		
			Bimtek dan Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 Orang	56.916.500	30 orang	54.275.000		
			Pengadaan Stock Penyanggah (Buffer Stock) Bagi Korban Bencana	19 jenis	168.543.000	19 jenis	168.243.000		
			Penanganan Bencana Kekeringan	19 kecamatan	24.336.000	14 kecamatan	24.336.000		
			<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>						
			Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	19 kecamatan	46.617.000	19 kecamatan	46.611.000		
			Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	3 kecamatan	16.132.768.000	2 kecamatan	246.455.700		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>							
			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	19 kecamatan	10.450.000	19 kecamatan	10.450.000			
			Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat	1 dokumen	49.770.500	1 dokumen	49.770.400			
			Koordinasi dan Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	19 kecamatan	25.793.000	19 kecamatan	24.875.200			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebesar Rp.1.620.739.883,- dari target Rp. 17.511.797.250- atau sebesar 9,26										
<b>10.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b> (Urusan Tenaga Kerja, Urusan Transmigrasi)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116 lembar	701.250	100 lembar	600.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang PMI asal Kabupaten Flores Timur tentang pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja masyarakat lokal kita</li> <li>• Beberapa usulan program kegiatan digeser atau ditunda dalam pelaksanaan karena adanya Pandemi Covid-19</li> <li>• Pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di Dalam Negeri (AKAD) maupun Luar Negeri (AKAN) tidak melalui proses sehingga kesulitan dalam pendapatan PMI asal Kabupaten Flores Timur</li> <li>• Kurangnya pemahaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan serangkaian sesi pelatihan dapat dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan, sehingga pembekalan yang dikasih dapat berguna bagi calon PMI</li> <li>• Melakukan pendataan PMI asal Kabupaten Flores Timur baik yang telah berangkat maupun yang telah kembali ke Kabupaten Flores Timur</li> <li>• Sosilasi dan pendampingan harus dilakukan beberapa kali, sehingga masyarakat lebih memahami dan bersedia untuk ikut bertransmigrasi</li> <li>• Perlu adanya</li> </ul>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	23.193.500	12 bulan	21.845.400			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit	3.200.000	5 unit	1.852.500			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6 orang	31.800.000	5 orang	31.800.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20 jenis	3.925.000	20 jenis	3.925.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	22.774.500	35 jenis	22.728.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.629 lembar	14.799.600	36.993 lembar	14.797.100			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	5.192.155	12 jenis	5.190.500			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2.395.800	1 jenis	900.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	450 dos	10.815.000	450 dos	10.810.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	55 kali	137.333.225	55 kali	136.296.705			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	23 orang	316.250.000	23 orang	311.850.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						masyarakat tentang transmigrasi baik transmigrasi umum maupun transmigrasi lokal • Pengusaha tidak menerapkan aturan ketenagakerjaan	pembinaan/sosialisasi • Perlu adanya pementauan atau monitoring
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 gedung kantor	3.750.000	2gedung kantor	3.750.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	24.681.500	9 unit	24.155.500			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	3.875.000	5 jenis	3.875.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	28.116.500	5 dokumen	28.092.500			
			<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>							
			Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	100 orang	7.410.000	0 orang	7.160.000			
			<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>							
			Semenisasi Lorong dan Gang Desa Sistim Padat Karya	87 orang	212.208.000	81 orang	212.121.100			
			Kerjasama Kemitraan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	35 orang	149.035.050	35 orang	148.832.200			
			<b>Program Transmigrasi Lokal</b>							
			Sosialisasi Peraturan Hukum tentang Ketransmigrasian	100 orang di 1 kecamatan	17.089.400	100 orang di 1 kecamatan	17.089.400			
			<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>							
			Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	10 kasus	10.211.000	26 kasus	9.940.000			
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	2 perusahaan, 5 kecamatan	32.710.000	2 perusahaan, 5 kecamatan	32.709.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.1.050.319.905. adalah dari target Rp. 1.061.466.480,- atau sebesar 98,95%										

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> (Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)								
	• PERDA Perlindungan Anak No 14 Tahun 2014	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	417 lembar	2.250.000	109 lembar	657.500			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	58.150.000	12 bulan	56.165.250			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	12.000.000	5 unit	7.867.376			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	34.800.000	7 orang	34.800.000			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15 jenis	4.326.000	15 jenis	4.326.000			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	45 jenis	40.171.800	45 jenis	40.170.000			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132.000 lembar	21.844.800	54.500 lembar	21.800.000			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	900 OMM	19.845.000	440 OMM	19.835.000			
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 kali	91.525.600	23 kali	90.829.600			
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	74 orang	1.021.200.000	74 orang	1.021.200.000			
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	12.409.000	5 jenis	9.750.000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	10.517.500	12 bulan	10.200.000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 jenis	63.055.000	4 jenis	62.804.000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	10.370.000	12 bulan	10.055.000			
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	4 dokumen	19.984.250	4 dokumen	19.956.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>Program Keluarga Berencana</b>						
			Pembinaan Keluarga Berencana	15.585 orang	69.886.000	980 orang	68.271.000		
			Penyediaan Pelayanan KB Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	5 jenis	4.889.517.000	5 jenis	4.805.779.650		
			Peningkatan Daya Jangkau Dan Kualitas Penyuluhan Serta Pengadaan Perlengkapan Sarana Kerja	3 unit	1.640.035.435	3 unit	1.634.571.122		
			Review Kemitraan dalam Pelayanan Program KBKR	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000		
			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak</b>						
			Pembentukan dan Fasilitasi Forum Anak	20 orang	36.704.800	1 orang	35.975.800		
			<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>						
			Dukungan Operasional Bagi Klinik KB (Kecamatan dan Rumah Sakit)	63 klinik	75.653.000	63 klinik	75.300.000		
			Dukungan Operasional Bagi PLKB	78 PLKB	109.906.000	74 PLKB	106.950.000		
Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.8.138.767.298,- dari target Rp.8.245.651.185,- atau sebesar 98,70%									
<b>12.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> (Urusan Lingkungan Hidup)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	3.750.000	12 bulan	3.248.800		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	38.760.000	12 bulan	38.571.510		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12.600.000	12 bulan	8.935.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	44.580.000	12 bulan	44.561.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18 jenis	4.519.500	18 jenis	4.514.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	61.093.750	40 jenis	61.076.000		



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	39.525.000	12 bulan	39.523.650		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor	7 jenis	11.988.084	7 jenis	11.987.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.275.000	12 bulan	1.275.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	65.750.000	12 bulan	65.749.500		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	213.245.000	12 bulan	212.658.600		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	3.284.218.300	12 bulan	3.279.912.150		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	17.200.000	1 paket	16.220.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit	98.703.000	2 unit	98.703.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 roda 6, 1 roda 4, 18 roda 3 dan 5 roda 2	42.293.745	5 roda 6, 1 roda 4, 18 roda 3 dan 5 roda 2	42.281.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8 unit	3.300.000	8 unit	3.295.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 unit	5.900.000	15 unit	5.900.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	4 unit	21.628.000	4 unit	21.621.000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	7 dokumen	29.240.000	7 dokumen	29.221.000		
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>									
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	6 unit	69.807.600	6 unit	69.599.050		
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 paket	534.666.500	1 paket	534.632.137		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	75 orang	38.774.500	75 orang	38.740.900		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19 kelurahan, 2 desa	44.450.675	19 kelurahan, 2 desa	44.441.500		
			Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1 TPA	81.071.675	1 TPA	80.961.525		
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>									
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	1 laporan pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL di 19 kecamatan	24.263.400	1 laporan pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL di 19 kecamatan	24.255.250		
			Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	10 usaha di 19 kecamatan	40.848.150	10 usaha di 19 kecamatan	40.832.500		
			Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	19 kecamatan	7.694.550	19 kecamatan	7.650.950		
			Pengkajian Dampak Lingkungan	Dok, (KLHS dan IKPLH)	897.860.600	Dok, (KLHS dan IKPLH)	896.308.350		
			Koordinasi Penyusunan AMDAL	154 jenis usaha	26.096.999	168 jenis usaha	22.036.250		
			Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	15 kasus	56.855.124	15 kasus	56.783.950		
			Pengendalian Pencemaran Air	10 titik sumber air	34.781.549	10 titik sumber air	34.768.650		
			Pengelolaan Laboratorium	1 paket	106.088.859	1 paket	102.728.400		
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3	1 dokumen	17.699.069	1 dokumen	17.666.000		
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>									
			Pantai dan Laut Lestari	2 Ha	9.777.787	2 Ha	9.717.500		
<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>									
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3 lokasi (8 Ha)	228.267.910	3 lokasi (8 Ha)	227.609.250		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>							
			Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	600 orang	139.261.875	600 orang	136.536.500			
			Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	1 dokumen	20.846.380	1 dokumen	20.839.000			
			<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>							
			Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 lokasi	21.666.897	1 lokasi	19.311.500			
			Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 lokasi	261.306.607	1 lokasi	260.995.250			
<p>Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran, antara lain mendukung tercapainya sasaran Pemenuhan Kebutuhan Air Baku, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman, Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.6.635.667.622,- dari target Rp.6.661.656.085,- atau sebesar 99,61%</p>										
<b>13.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> (Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil)									
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejak tahun 2020 pungutan retrebusi pengganti biaya cetak KTP, KK dan Akta sudah tidak ada</li> <li>PERDA Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PERDA Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li> </ul>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung kantor tempat pelayanan yang tidak layak lagi (rusak)</li> <li>Kurangnya ketersediaan tinta ribbon pencetakan KTP sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat</li> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat pelayanan harus di bangun baru untuk memenuhi standar pelayanan minimal</li> <li>Pelayanan langsung dokumen kependudukan sampai ketingkat desa/kelurahan</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 lembar	1.272.000	250 lembar	1.272.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	66.992.000	12 bulan	65.774.723			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 unit roda 2, 1 unit roda 4	3.500.000	12 unit roda 2, 1 unit roda 4	2.723.030			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	30.000.000	7 orang	28.800.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 jenis	3.171.000	16 jenis	3.170.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	31 jenis	78.987.500	31 jenis	78.954.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000 lembar	29.775.000	60.000 lembar	29.761.600			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	1.785.000	2 jenis	1.785.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 surat kabar	1.800.000	2 surat kabar	1.740.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1.083 porsi	8.925.000	1.083 porsi	8.925.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	30 kali	76.595.000	30 kali	76.437.662		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	54 orang	745.200.000	54 orang	729.100.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 jenis	65.000.000	1 jenis	64.899.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit roda 2, 1 unit roda 4	15.300.000	10 unit roda 2, 1 unit roda 4	13.995.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 unit	52.475.000	15 unit	52.450.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja, dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	7 dokumen	59.141.058	7 dokumen	58.977.000		
			<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	19 kecamatan	14.621.900	19 kecamatan	14.621.900		
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	2 kali rapat	12.087.042	2 kali rapat	12.087.042		
			Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	20.000 Kartu Keluarga, 15.000 KTP, 13.200 KIA, 40.000 Akta	1.032.025.300	20.000 Kartu Keluarga, 15.000 KTP, 13.200 KIA, 40.000 Akta	1.030.004.447		
			Pengembangan Data Base Kependudukan	50 lembaga pemerintah/ non pemerintah	272.613.700	50 lembaga pemerintah/ non pemerintah	271.903.700		
			Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	19 kecamatan	33.720.000	19 kecamatan	33.680.000		
			Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.2.581.061.104,- dari target Rp. 2.604.986.500,- atau sebesar 99,08%						

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
14.	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> (Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)									
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya aloksi anggaran khususnya dana pendampingan, pembinaan ,monitoring dan evaluasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.</li> <li>• Terbatasnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan pelaku- pelaku program kegiatan.</li> <li>• Terbatasnya kualitas SDM kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif desa/kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketersediaan dan dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.</li> <li>• Meningkatkan intensitas kegiatan (Monitoring dan Evaluasi) yang mendukung pencapaian sasaran serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa maupun kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.237.500	12 bulan	679.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	22.032.000	12 bulan	21.654.620			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	2.950.000	12 bulan	2.336.500			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	54.132.000	12 bulan	54.132.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	4.101.000	12 bulan	4.101.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	29.948.062	12 bulan	29.984.062			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	34.594.500	12 bulan	34.585.127			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3.939.011	12 bulan	3.939.011			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	2.280.000	12 bulan	2.025.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	63.680.000	12 bulan	63.680.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	119.225.000	12 bulan	118.969.751			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	23 orang	317.400.000	23 orang	316.250.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	17.059.925	12 bulan	17.059.925			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	30.015.000	7 dokumen	30.008.000		
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>									
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Jejaring Desa Siaga	38 desa	24.170.000	19 desa	24.170.000		
			Pendampingan dan Pembinaan Kader Posyandu	653 kader	40.265.000	290 kader	40.265.000		
			Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	229 desa	65.570.000	229 desa	65.555.000		
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>									
			Pendampingan Usaha Desa dan Kelompok Ekonomi Masyarakat	176 kelompok	21.010.000	32 kelompok	20.960.000		
			Fasilitasi Pembentukan BUMDES/BUMDES Bersama	22 bumdes	31.993.325	12 bumdes	31.943.600		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>									
			Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	50 orang	56.740.500	50 orang	56.740.500		
			Pendampingan dan Pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan BPD	229 desa	76.851.000	229 desa	76.626.000		
			Pendampingan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa	229 desa	35.687.600	229 desa	35.548.500		
			Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APBDes	229 desa	29.998.675	229 desa	29.988.675		
			Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	229 desa	31.435.975	229 desa	31.435.975		
			Evaluasi RKPDesa	229 desa	41.940.000	229 desa	41.940.000		
<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesan</b>									
			Peningkatan Kapasitas Organisasi PKK	190 orang	112.521.500	95 orang	112.521.500		
			Pelatihan Usaha Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K) PKK	10 kelompok	79.227.400	10 kelompok	79.227.400		
<p>Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.1.354.290.146,- dari target Rp.1.358.004.973,- atau sebesar 99,73%</p>									

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya																																																																												
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran																																																																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																																																												
15.	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b> (Urusan Perhubungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.</li> <li>Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan.</li> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang : Pelayaran</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang : Alat Penerangan Jalan</li> <li>Peraturan Dirigen Perhubungan Darat Nomor : KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tentang Atat Cara Kaligrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor</li> </ul>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>12 Bulan</td> <td>1.248.000</td> <td>12 Bulan</td> <td>961.200</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td> <td>12 Bulan</td> <td>20.400.000</td> <td>12 Bulan</td> <td>16.574.283</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</td> <td>7 Unit</td> <td>5.750.000</td> <td>7 Unit</td> <td>2.584.405</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td> <td>8 Orang</td> <td>41.206.000</td> <td>8 Orang</td> <td>41.206.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</td> <td>20 Jenis</td> <td>10.168.125</td> <td>20 Jenis</td> <td>10.168.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td> <td>32 Jenis</td> <td>29.095.461</td> <td>32 Jenis</td> <td>29.078.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>57.500 Lembar</td> <td>11.745.000</td> <td>57.500 Lembar</td> <td>11.745.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td> <td>8 Komponen</td> <td>13.198.000</td> <td>8 Komponen</td> <td>13.198.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td> <td>300 Porsi</td> <td>18.000.000</td> <td>300 Porsi</td> <td>18.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi</td> <td>16 Kali</td> <td>139.827.000</td> <td>16 Kali</td> <td>139.691.996</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran</td> <td>47 Orang</td> <td>625.600.000</td> <td>47 Orang</td> <td>625.600.000</td> </tr> </table> <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <table border="1"> <tr> <td>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</td> <td>2 Unit</td> <td>82.263.000</td> <td>2 Unit</td> <td>82.263.000</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</td> <td>8 Unit</td> <td>67.125.000</td> <td>8 Unit</td> <td>67.125.000</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</td> <td>7 Unit</td> <td>48.000.000</td> <td>7 Unit</td> <td>48.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td> <td>2 Unit</td> <td>44.326.000</td> <td>2 Unit</td> <td>44.326.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td> <td>7 Unit</td> <td>143.734.000</td> <td>7 Unit</td> <td>132.165.050</td> </tr> </table>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.248.000	12 Bulan	961.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20.400.000	12 Bulan	16.574.283	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	5.750.000	7 Unit	2.584.405	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8 Orang	41.206.000	8 Orang	41.206.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	10.168.125	20 Jenis	10.168.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis	29.095.461	32 Jenis	29.078.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.500 Lembar	11.745.000	57.500 Lembar	11.745.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Komponen	13.198.000	8 Komponen	13.198.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	300 Porsi	18.000.000	300 Porsi	18.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	16 Kali	139.827.000	16 Kali	139.691.996	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	47 Orang	625.600.000	47 Orang	625.600.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	82.263.000	2 Unit	82.263.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	67.125.000	8 Unit	67.125.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 Unit	48.000.000	7 Unit	48.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	44.326.000	2 Unit	44.326.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	143.734.000	7 Unit	132.165.050	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya dilakukan sedapatnya karena dan pembatasan kegiatan pada masa pandemi covid 19</li> <li>Pengamanan kegiatan keagamaan hanya dilakukan terhadap kegiatan Natal dan Tahun baru karena Pandemi covid 19</li> <li>Perbaikan 3 unit alat pengujian kendaraan bermotor</li> <li>Teknis pengujian kendaraan tidak dilakukan dan tuntutan regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan dilakukan perbaikan untuk menormalkan fungsi peralatan</li> <li>Akan dilakukan uji berkala kendaraan secara mekanik</li> </ul>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.248.000	12 Bulan	961.200																																																																																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20.400.000	12 Bulan	16.574.283																																																																																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	5.750.000	7 Unit	2.584.405																																																																																	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8 Orang	41.206.000	8 Orang	41.206.000																																																																																	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	10.168.125	20 Jenis	10.168.000																																																																																	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis	29.095.461	32 Jenis	29.078.000																																																																																	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.500 Lembar	11.745.000	57.500 Lembar	11.745.000																																																																																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Komponen	13.198.000	8 Komponen	13.198.000																																																																																	
Penyediaan Makanan dan Minuman	300 Porsi	18.000.000	300 Porsi	18.000.000																																																																																	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	16 Kali	139.827.000	16 Kali	139.691.996																																																																																	
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	47 Orang	625.600.000	47 Orang	625.600.000																																																																																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	82.263.000	2 Unit	82.263.000																																																																																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	67.125.000	8 Unit	67.125.000																																																																																	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 Unit	48.000.000	7 Unit	48.000.000																																																																																	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	44.326.000	2 Unit	44.326.000																																																																																	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	143.734.000	7 Unit	132.165.050																																																																																	

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PM30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3 Unit	2.600.000	3 Unit	2.589.000		
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	8 Orang	11.837.167	1 orang	11.837.167		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	11 Dokumen	39.211.000	11 Dokumen	39.197.900		
			<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>						
			Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Unit	35.969.450	2 Unit	35.644.900		
			<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>						
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	3 Unit	56.165.920	3 Unit	56.085.000		
			Rehabilitasi dan Peningkatan Terminal Angkutan Darat	1 Unit	499.327.000	1 Unit	497.396.000		
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>						
			Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	5 Lokasi	33.886.000	5 Lokasi	33.885.000		
			Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	135 Dokumen	21.65 5.000	2 Dokumen	21.654.000		
			Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	6 Kali	27.488.000	6 kali	25.342.700		
			Pengawasan Lalu-lintas Kapal Laut dan Muatan Dalam Batas Bandar	12 Kali	44.394.500	7 kali	44.394.250		
			<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas</b>						
			Pengawasan Lalu lintas dan Kegiatan Keagamaan	16 kali	26.950.000	2 Kali	26.925.000		
			Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	12 Unit	35.329.187	12 Unit	35.013.900		
			<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>						
			Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	13 Unit	201.162.000	13 Unit	201.162.000		
		Pengujian Kendaraan Bermotor	630 Kali	19.135.000	630 Kali	19.095.000			



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran meningkatkan kinerja transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.2.332.907.751,- dari target Rp. 2.356.795.810,- atau sebesar 98,99%</p>									
16.	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> (Urusan Komunikasi dan Informatika)								
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				• Akibat pandemi Covid-19 berakibat pada Rasionalisasi Anggaran		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	750.000	12 bulan	745.700		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	40.200.000	12 bulan	38.346.621		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	3.700.000	4 unit	1.477.550		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	54.000.000	7 orang	53.400.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	3.919.000	12 bulan	3.918.500		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	24.189.500	12 bulan	24.189.400		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.100 lembar	30.000.000	5.100 lembar	29.974.900		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	6.110.169	12 bulan	6.109.700		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	600 OM	28.250.000	600 OM	28.228.500		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	139.396.000	12 bulan	137.695.700		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	15 orang	207.000.000	15 orang	207.000.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	31.350.000	4 unit	31.349.223		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	10.950.000	12 bulan	10.936.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	19.856.000	10 dokumen	19.582.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
			<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>									
			Optimalisasi Peran RSPD	4320 jam	84.266.900	4320 jam	83.516.406					
			Revitalisasi Website Pemerintah Daerah	12 bualn	98.075.000	12 bulan	96.152.492					
			Perluasan Jaringan Komunikasi Data	19 kecamatan	194.984.000	19 kecamatan	193.879.700					
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.967.402.392,- dari target Rp. 977.896.569,- atau sebesar 98,93%												
<b>17.</b>	<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b> (Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.200.000	12 bulan	2.180.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan pengurus koperasi/KUD belum maksimal</li> <li>• Keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembinaan dan pendampingan ke UKM kurang efektif</li> <li>• Banyak kelompok pra koperasi yang belum memahami tentang prinsip-prinsip koperasi</li> <li>• Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi</li> <li>• Kurang ada kesadaran (kelalaian) para pengurus dan pengawas koperasi sehingga sering tidak melaksanakan amanah sesuai ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi</li> <li>• Koperasi-koperasi kurang pro aktif untuk memperbaharui Nomor Induk Koperasi (NIK) yang sudah jatuh tempo/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diberikan sosialisasi kepada kelompok atau embrio prakoperasi yang ingin mengusulkan koperasinya menjadi koperasi yang berbadan hukum</li> <li>• Pembinaan pengawasan dan pendampingan koperasi secara berkala sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat</li> <li>• Pembinaan pengawasan dan pendampingan koperasi secara berkala sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat</li> <li>• Koperasi yang sudah jatuh tempo/ kadaluarsa sertifikasi NIK nya agar segera memperbaharui setifikat NIK dan</li> </ul>			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	25.754.000	12 bulan	23.926.210					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	2.993.000	10 unit	2.488.220					
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	54.600.000	7 orang	52.600.000					
			Penyediaan Jasa Kebersihan Ka	24 jenis	9.224.300	24 jenis	9.224.000					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis	29.220.700	38 jenis	29.220.700					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.250 lembar	42.867.200	75.250 lembar	42.866.950					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	21.508.439	12 bulan	21.508.000					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 bahan baca dan peraturan	2.000.000	2 bahan baca dan peraturan	1.500.000					
			Penyediaan Makanan dan Minuman	310 dos	11.460.000	310 dos	11.451.000					
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 kali	172.486.500	12 kali	172.425.000					
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	410.550.000	12 bulan	409.400.000					
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>									
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	15.148.900	1 unit	15.145.000					

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	25.507.570	12 bulan	25.498.259	kadaluarsa sebab NIK hanya berlaku 2 tahun/ • Koperasi yang belum mempunyai sertifikat NIK tidak proaktif mengajukan proses penerbitan sertifikat NIK	koperasi yang belum mempunyai sertifikat NIK agar segera mendaftarkan koperasi untuk diproses sertifikat NIK nya • Dinas koperasi selalu dan senantiasa melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara lebih intensif sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih maksimal.	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	2.970.000	10 unit	2.955.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	12 bulan	36.410.000	12 bulan	36.301.000			
			<b>Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif</b>							
			Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	168 UKM	217.880.513	6 UKM	214.835.000			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	84 UKM	39.881.000	35 UKM	39.851.000			
			<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>							
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	50 koperasi/3 kali	417.358.000	65 koperasi	383.867.100			
			Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Pemula Pasca Pelatihan	476 wirausaha pemula/19 kecamatan	43.155.000	116 wirausaha pemula/19 kecamatan	43.080.000			
			Identifikasi dan Pengembangan Motivasi Wirausaha Pemula/Wirausaha Baru	150 wirausaha pemula/ wirausaha baru	11.269.000	113 wirausaha pemula/ wirausaha baru	9.590.000			
			<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>							
			Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	10 kelompok pra koperasi	8.125.201	7 kelompok pra koperasi	8.120.000			
			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	10 koperasi yang berbadan hukum	11.944.500	9 koperasi yang berbadan hukum	11.739.500			
			Rapat Anggota Tahunan Koperasi/KUD	84 koperasi yang berbadan hukum	35.635.000	35 koperasi yang berbadan hukum	35.600.000			
			Pembinaan, Pengawasan KSP dan KJKS	84 koperasi yang berbadan	12.510.000	12 koperasi yang berbadan	12.305.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya kemandirian orang muda yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.1.617.677.439,- dari target Rp.1.662.658.823,- atau sebesar 97,29%

**18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
(Urusan Penanaman Modal)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.807.200	12 bulan	1.802.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	101.497.992	12 bulan	93.243.592
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	1.726.520	12 bulan	1.694.150
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	31.200.000	7 orang	31.200.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	13.049.000	12 bulan	13.049.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	34.496.590	12 bulan	34.496.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	17.220.000	12 bulan	17.210.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	6.435.428	8 jenis	6.435.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.400.000	12 bulan	1.400.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	7.006.000	12 bulan	6.994.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	125.219.717	12 bulan	125.121.564
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	11 orang	147.199.932	11 orang	147.199.932
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	10.781.500	1 unit	10.686.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	27.920.000	12 bulan	27.908.198
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	8.400.000	12 bulan	8.397.000

- Program dan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk covid-19

- Adanya memaksimalkan anggaran dalam program dan kegiatan

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 orang	11.965.000	6 orang	11.626.300			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan Dan Laporan Tahunan	8 dokumen	58.913.300	8 dokumen	58.898.000			
			<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>							
			Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	1 paket (video promosi)	13.492.000	1 paket (video promosi)	13.480.000			
			Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	2 kali	20.422.200	2 kali	20.421.600			
			Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kali	38.412.000	4 kali	37.571.100			
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	1 kali	535.000	1 kali	535.000			
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>							
			Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	4 kali	64.009.300	2 kali	63.318.600			
			Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	4 kali	26.139.700	2 kali	25.510.000			
			<b>Program Pelayanan Perizinan Terpadu</b>							
			Pelayanan Perizinan	12 bulan	102.378.750	12 bulan	98.829.900			
			Sosialisasi Perizinan	12 bulan	3.635.000	12 bulan	3.635.000			
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.860.662.936,- dari target Rp.875.262.129,- atau sebesar 98,33%							
19.	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b> (Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan)									
	Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar	600.000	100 lembar	600.000		• STNK Mobil Bantuan	• Sedang Dalam Proses	

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Tentang: Penyelenggaraan Kearsipan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	34.800.000	12 bulan	29.752.139	dari Perpusnas Masih Dalam Proses, Sehingga Pajak Mobil tersebut Belum Bisa Dibayar • Mengalami Refokusing	Pengurusan STNK	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	13.750.000	8 unit	12.599.285			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	46.200.000	12 bulan	46.200.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21 Jenis	6.022.200	21 jenis	6.011.300			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	56 Jenis	24.510.750	56 Jenis	24.509.600			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24 buku, 45.000 lemabr dan 40 buku	15.528.000	600 lembar, 40,000 lemabr dan 90 buku	15.518.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Komponen	5.815.524	11 Komponen	5.815.524			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	3.480.000	12 bulan	2.640.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	500 dos	9.562.500	400 dos	9.546.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 paket	97.252.800	2 paket	96.922.800			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	13 orang	179.400.000	13 orang	179.400.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	72.198.500	7 unit	71.951.431			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit	7.221.200	2 unit	7.200.700			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21 unit	5.750.000	11 unit	5.740.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 dokumen	30.651.600	9 dokumen	30.651.600			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>							
			Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	10,000 orang	44.408.550	1,000 orang	44.143.550			
			Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	90 Perpustakaan	25.601.400	45 populasi orang	24.970.000			
			Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	122 Perpustakaan	27.300.000	122 Perpustakaan	27.294.000			
			Pengolahan dan Penataan Koleksi Perpustakaan	2.527 Eks	9.090.250	500 Eks	9.090.250			
			<b>Program pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	697 Box	15.585.750	697 Box	15.578.750			
			<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>							
			Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	5 Perbup	30.048.500	5 Perbup	30.048.500			
			Bimbingan Teknis Kearsipan	19 orang pengelola arsip kecamatan	7.421.000	19 orang pengelola arsip kecamatan	7.410.503			
			Pembinaan Kearsipan	30 OPD/ Kec/ Desa/ Kel	35.464.375	3 OPD, 2 Desa	35.364.375			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.738.958.307,- dari target Rp. 747.662.899,- atau sebesar 98,84%										
20.	<b>DINAS PERIKANAN</b> (Urusan Kelautan dan Perikanan)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		• Perda perubahan APBD Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 2 November 2020	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	3.977.250	12 bulan	3.950.400			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	94.700.000	12 bulan	71.407.753			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit roda 4 29 unit roda 2	11.400.000	4 unit roda 4 29 unit roda 2	6.851.105			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	55.200.000	12 bulan	55.200.000			

No	OPD Pelaksana/ Urutan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	10.320.000	12 bulan	10.300.450		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	31.168.150	12 bulan	31.154.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		26.650.000	12 bulan	26.647.750		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.855.000	12 bulan	1.797.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	960.000	12 bulan	900.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	10.500.000	12 bulan	10.499.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	230.544.485	12 bulan	229.652.426		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	36 orang	469.200.000	36 orang	466.900.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1.500.000	1 unit	996.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	120.000.000	3 unit	119.960.066		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2 jenis	15.000	2 jenis	15.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 jenis	8.500.000	2 jenis	8.482.500		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	12 bulan	56.800.000	12 bulan	56.749.650		
			<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>						
			Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	19 kecamatan	30.933.687,50	27 desa/ke	30.925.000		
			<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan</b>						
			Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan	25 pokmaswas	27.731.755	35 pokmaswas	27.526.300		



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut</b>							
			Koordinasi Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	60 kali	55.694.900	60 kali	54.955.000			
			Gelar Operasi Pengamanan Sumber Daya Laut Wilayah Perairan	10 kasus	82.948.880	127 desa/kel.	82.763.800			
			<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>							
			Pengembangan Bibit Ikan Unggul	2 jenis	20.315.000	2 jenis	20.155.000			
			Pembinaan Petani Ikan serta Pengembangan Data dan Informasi Budi Daya	10 kecamatan	32.641.560	10 kelompok	32.625.000			
			<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>							
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	15 jenis	2.899.221.926	14 jenis	2.893.065.366			
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4 buah (es tambah tabuh, parkir	1.011.481.999,10	4 buah (es tambah tabuh, parkir	969.869.651			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3 dok	80.924.525	7 dok	80.766.400			
			Pengembangan Data dan Informasi Perikanan Tangkap	1 dok, 120 kelompok	78.430.000	1 dok, 120 kelompok	78.360.000			
			<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>							
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	250 unit cool box	33.854.200	250 unit cool box	33.731.700			
			Fasilitasi Pemberian Izin dan Pengawasan Mutu Produk Perikanan	50 pemasaran dan pengepulan ikan, 45 pengeloh ikan	28.596.672,50	50 pemasaran dan pengepulan ikan, 45 pengeloh ikan	28.540.900			
			<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>							
			Perlindungan Sumber Daya Laut dan Perikanan		27.560.000		27.285.000			
<p>Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut dan Meningkatnya produksi perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.5.462.032.717,- dari target Rp. 5.543.625.010,- atau sebesar 98,53%</p>										

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21.	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b> (Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan)								
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan pengetahuan para Jupel yang usia lanjut.</li> <li>• Masih terdapat kekurangan dan keterbatasan SDM sebagai tenaga teknis dalam program pengembangan nilai budaya sehingga koordinasi kurang efektif, tidak dapat mengikuti pelaksanaan ritual masyarakat secara sempurna</li> <li>• Rendahnya tingkat promosi destinasi pariwisata masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang ritual Semana Santa secara menyeluruh (satu data /informasi) tentang Semana Santa buku ini wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat dan stakeholder khususnya dan generasi penerus.</li> <li>• Diharapkan kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah dapat memanfaatkan sebagai bagian pengetahuan dalam pembelajaran pendidikan Agama Katolik.</li> <li>• Menyesuaikan standar kebutuhan sarana dan prasarana wisata untuk lebih dioptimalkan penggunaannya demi memperoleh kepuasan dan kenyamanan bagi wisatawan. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190 lembar	1.026.200	190 lembar	1.025.900		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	39.252.000	12 bulan	37.075.835		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda 4, 6 unit roda 2	4.000.000	1 unit roda 4, 4 unit roda 2	2.953.480		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	45.800.000	12 bulan	45.800.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12.605.000	12 bulan	12.605.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	2 paket	20.654.000	2 paket	20.654.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	303 buku	19.775.000	303 buku	19.775.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	6.706.000	2 paket	6.706.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 buah	7.892.500	3 buah	7.892.500		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	4.140.000	12 bulan	4.140.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	171 OM	14.060.000	171 OM	14.060.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	111 OH, 15 OK, 67 OT	141.380.000	111 OH, 15 OK, 67 OT	141.240.800		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	21 orang	317.400.000	21 orang	317.400.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 unit	10.475.000	1 unit	10.475.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	9.381.510	12 bulan	9.381.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	42.500.000	5 unit	42.423.419		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8 unit	4.000.000	8 unit	3.994.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16 unit	6.375.000	16 unit	6.375.000		keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya • Perlu diadakan perlombaan promosi wisata di setiap daerah yang memiliki potensi wisata agar ada persaingan sehat dan penghargaan
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	13.279.147,50	6 dokumen	13.272.000		
			<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>						
			Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	520 buku	94.903.000	520 buku	94.738.000		
			<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>						
			Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	3 paket	2.163.798.894,50	3 paket	2.137.638.393,50		
			Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	35 usaha jasa	108.121.625	35 usaha jasa	108.104.500		
			<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>						
			Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga lainnya	7 kegiatan	344.068.000	7 kegiatan	344.068.000		
			<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>						
			Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	10 objek	111.399.750	10 objek	110.898.750		
			<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>						
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	1 event promosi	102.312.700	1 event promosi	102.212.700		
			Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata	2 kegiatan	4.545.000	2 kegiatan	4.545.000		
			<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>						
			Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	4 festival	27.583.100	1 festival (persiapan festival bale nagi/pra festival)	27.503.100		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.3.646.957.377,- dari target Rp.3.677.433.227,- atau sebesar 99,17%						
<b>22.</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b> (Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan)			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya refocusing angrgan karena adanya Pandemi Covid-19</li> <li>• Adanya serangan hama tikus dan ulat</li> <li>• Kurang tersedianya benih unggul, pupuk dan obat-obatan pengendali hama dan penyakit</li> </ul>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 : 345 lbr dan pengiiman surat 1 paket	2.567.500	Materai 6000 : 345 lbr dan pengiiman surat 1 paket	2.567.500			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	35.881.000	12 bulan	30.888.130			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 2 dan roda 4	5.352.500	Roda 2 dan roda 4	2.523.965			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	41.400.000	7 orang	41.400.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14 jenis	6.194.100	14 jenis	6.194.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	44 jenis	50.895.100	44 jenis	50.885.975			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.000 lembar dan 265 buku	29.930.000	64.000 lembar dan 265 buku	29.928.300			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 jenis	5.516.950	50 jenis	5.502.940			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	2.620.000	12 bulan	1.970.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1.061 HOK	24.165.000	1.061 HOK	24.045.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	35 kali	249.074.000	35 kali	249.039.000			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	60 orang	848.575.000	60 orang	831.324.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	143.314.110	12 bulan	137.260.400			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 unit	4.000.000	15 unit	4.000.000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	8 dokumen	22.734.025	8 dokumen	22.692.000		
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>									
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	19 kecamatan	600.500	19 kecamatan	600.500		
			Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	19 kecamatan	33.832.875	19 kecamatan	33.680.000		
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	19 desa	11.272.800	19 desa	11.272.800		
			Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	20 kali	20.723.500	20 kali	20.723.500		
			Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).	19 kecamatan	39.666.500	19 kecamatan	39.666.500		
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>									
			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi/Palawija	155 ha	12.910.850	155 ha	12.686.400		
			Pengembangan Pembenihan/Perbibitan	Padi sawah 1,5 ha, jagung komposit 1,5 ha,	61.307.077	Padi sawah 1,5 ha, jagung komposit 1,5 ha,	54.806.300		
			Pencegahan dan Penanggulangan OPT Tanaman Pangan	350 ha	23.991.450	350 ha	23.977.400		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19 kecamatan dan 1 dokumen	40.812.805	19 kecamatan dan 1 dokumen	40.686.950		
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	3 unit	703.788.800	3 unit	681.522.900		
			Pembuatan Embung	2 unit	431.093.000	2 unit	428.311.500		
			Perluasan Areal Lahan Kering	75 ha	7.060.000	75 ha	6.905.500		
			Pembangunan / Rehap Saluran Irigasi	2 paket	4.430.000	2 paket	4.430.000		
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	3 unit	730.853.800	3 unit	728.321.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pembangunan Long Storage	1 unit	1.455.000	1 unit	1.370.000		
			<b>Program Peningkatan Diversifikasi Pangan</b>						
			Penganekaragaman Pangan	1 kali	3.580.000	1 kali	3.580.000		
			<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>						
			Pengembangan Hortikultura	14 ha	19.010.000	14 ha	18.820.000		
			Pencegahan dan Penanggulangan OPT Tanaman Hortikultura	70 ha	8.085.075	70 ha	8.080.600		
			Pembangunan Jalan Usaha Tani (lanjutan).	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000		
			<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>						
			Rapat Koordinasi dan Temu Teknis Penyuluh Pertanian	3 kali	34.483.750	3 kali	29.333.000		
			Penguatan Kelembagaan BPP, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA	19 BPP	36.305.650	19 BPP	36.127.200		
			Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten	19 BPP	81.850.000	19 BPP	81.722.300		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 unit	217.403.993,50	1 unit	217.061.600		
			Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	19 BPP	22.467.000	19 BPP	22.297.000		
			<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>						
			Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan	2 unit	12.573.000	2 unit	12.573.000		
<p>Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.3.961.776.660,- dari target Rp.4.034.776.710,- atau sebesar 98,19%.</p>									
<b>23.</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b> (Urusan Perkebunan dan Urusan Peternakan)								
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya refocusing anggaran karena adanya Pandemi Covid-19</li> <li>• Belum ada pembibitan ternak milik pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelaksanaan pelatihan/bimtek/maganng dan demonstrasi menggunakan</li> </ul>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	942.500	12 bulan			931.500
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	32.060.000	12 bulan			24.544.100

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit	6.935.500	11 unit	3.472.770	<p>sehingga menyulitkan perternak mendapatkan bibit ternak dalam jumlah dan mutu yang baik dan dengan harga yang terjangkau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) di lokasi strategis dengan fasilitas yang memadai, sehingga jumlah jenis hewan yang di potong bisa terdata seta penjagal dapat memanfaatkan RPH secara nyaman dan sehat</li> <li>• Adanya wabah ASF yang secara masif menyerang ternak babi menyebabkan fokus pelaksanaan kegiatan menjadi terbagi</li> <li>• Belum berkembangnya kelembagaan tani yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri</li> </ul>	<p>teknologi berusahatani secara baik dan benar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusahakan fasilitas pendukung kegiatan kegiatan dan biaya operasional dalam memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan dinas</li> <li>• Meningkatkan pemantauan/monitoring dan pembinaan penggunaan prasarana dan sarana bagi petani dan kelompok tani penerima manfaat.</li> <li>• Berkoordinasi dengan pemegang kebijakan di sektor SDM dinas untuk tambahan personil teknis yang berkualitas di bidang perkebunan dan peternakan</li> </ul>	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	41.400.000	7 orang	41.400.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14 jenis	4.831.200	14 jenis	4.831.200			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	44 jenis	26.839.900	44 jenis	26.836.900			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.050 lembar	17.264.000	54.050 lembar	17.264.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	3.431.000	5 jenis	3.431.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	900.000	1 jenis	900.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	8.537.500	12 bulan	7.338.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 kali	151.503.947	3 kali	150.502.826			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	44 orang	589.550.000	44 orang	589.550.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	36.950.000	3 jenis	36.826.000			
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 jenis	23.950.000	4 jenis	23.850.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 jenis	11.945.375	1 jenis	11.942.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit kendaraan roda 4	29.989.000	1 unit kendaraan roda 4	24.338.163			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	1 unit	3.000.000	1 unit	2.975.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan Dan Laporan Tahunan	8 dokumen	31.120.400	8 dokumen	27.760.000			
			<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>							
			Pemberdayaan Kelompok Tani Tembakau	3 kecamatan ( 14 poktan)	61.267.600	3 kecamatan ( 9 poktan)	59.053.200			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani Tembakau	2 kecamatan (2 poktan)	70.379.880	1 kecamatan (1poktan)	69.520.100			
<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>										
			Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	1 paket	39.213.675	1 paket	37.887.300			
			Peremajaan, Pemangkasan, Penjarangan Jambu Mete	480 ha	1.675.174.750	334.82 ha	1.241.633.206			
			Pencegahan dan Penanggulangan OPT Tanaman Perkebunan	620 ha	19.759.547,50	594 ha	18.932.000			
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>										
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	80 %	164.470.125	77 %	152.759.200			
<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>										
			Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	5 kelompok	17.653.375	5 kelompok	17.353.000			
			Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi	200 ekor	53.508.000	80 ekor	50.549.600			
			Peningkatan Mutu Ternak	10 ekor	3.285.000	10 ekor	3.285.000			
Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.2.649.576.065,- dari target Rp.3.125.774.274,50,- atau sebesar 84,77%										
<b>24.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> (Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.041.800	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan rutin di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur pada tahun anggaran 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar disesuaikan dengan pendanaan yang tersedia, namun ada pembangunan konstruksi sarana pasarana pasar rabat jalan pasar Waiwerang dan sumur bor pasar Waiwadan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan beberdayaan industri yang menitikberatkan pada industri kecil menengah dan peranserta meningkatkan peran serta masyarakat dalam tercapainya pelayanan teknologi industri</li> </ul>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	34.200.000	12 bulan	26.861.041			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	5.525.000	12 bulan	5.076.184			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	41.100.000	12 bulan	40.650.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	1.447.000	12 bulan	1.447.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	15.399.300	12 bulan	15.392.500			



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	11.475.000	12 bulan	11.460.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan sidang tera tera ulang masih terdapat banyak peralatan UTTP yang belum ditera karena kurangnya pemahaman dari para pelaku usaha dan masyarakat terkait pentingnya tera peralatan UTTP terdapat kepentingan dunia usaha terdapat perlindungan konsumen</li> <li>• Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar adalah masih kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha dalam mengawasi barang jualan yang sudah habis masa berlakunya</li> <li>• Consigne yang keberatan memberikan data realisasi muatan dengan berbagai alasan, sehingga petugas kesulitan mengirim data yang dibutuhkan kementerian.</li> <li>• Waktu atau jadwal pembongkaran kontener tidak menentu sehingga petugas kesulitan melakukan pengawasan penjual/pemakai jasa tol laut.</li> <li>• Adanya refocusing anggaran karena adanya Pandemi Covid-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusulkan dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah sehingga tahun berikutnya sidang tera ulang dapat dilakukan di 19 kecamatan sehingga dapat menjangkau semua peralatan UTTP di wilayah untuk di tera</li> <li>• Melakukan pengawasan BDKT dengan memberikan sosialisasi langsung agar pelaku usaha dan masyarakat memahami dan menyadari bahaya dari barang-barang kadaluasa</li> <li>• Memberikan himbauan untuk selalu melaporkan aktivitas pemanfaatan tol laut baik realisasi muatan bongkar maupun muatan balik</li> <li>• Melakukan rapat evaluasi bersama pelaku pengguna jasa tol laut</li> <li>• Mengajukan usulan dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah sehingga tahun berikutnya kegiatan teknis yang tertunda di tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana</li> </ul>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.076.750	12 bulan	2.070.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.740.000	12 bulan	1.260.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	7.980.000	12 bulan	7.980.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	166.500.900	12 bulan	166.049.900			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	400.200.000	12 bulan	400.200.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	4.030.000	12 bulan	4.030.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	12 bulan	43.528.000	12 bulan	42.301.624			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.600.000	12 bulan	2.600.000			
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 bulan	12.909.800	12 bulan	12.909.800			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	29.251.000	12 bulan	29.203.000			
			<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>							
			Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetropolitan Daerah	12 jenis peralatan UTTP	51.353.500	12 jenis peralatan UTTP	51.348.500			
			Peningkatan Pengawasan Barang Beredar (BDKT) dan Pompa Ukur BBM	19 Kecamatan	63.425.800	19 Kecamatan	63.312.800			
			<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>							
			Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	7 IKM	22.980.000	14 IKM	22.630.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>							
			Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	11 IKM	14.922.500	5 IKM	14.922.500			
			<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>							
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	19 kecamatan	27.954.600	19 kecamatan	27.904.600			
			Pengambilan Data dan Publikasi Informasi Perdagangan	1 dokumen	44.308.900	1 dokumen	37.103.900			
Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, adalah sebesar Rp.987.755.149,- dari target Rp. 1.006.435.050,- atau sebesar 98,14%										
25.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b> (Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan)									
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KHD</b>							
			Koordinasi Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial dan Bencana Alam	19 kali	86.952.000	19 kali	86.948.400			
			Koordinasi Penyelenggaraan Manasik Haji dan Pemberangkatan Haji	1 kali	21.840.000	1 kali	21.840.000			
			Koordinasi Bidang Keagamaan	19 kali	145.385.000	19 kali	145.090.000			
			Koordinasi Bidang Pendidikan	19 kali	210.752.500	19 kali	203.551.700			
			<b>Program Kerjasama Kemitraan Bidang Pendidikan</b>							
			Kerjasama Kemitraan Bidang Pendidikan	2 kali	3.076.500.000	2 kali	3.051.076.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 3.508.506.100,- dari target Rp. 3.541.429.500,- atau sebesar 99,07%										
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>							
			Penyusunan Naskah Sambutan KDH	175 Sambutan	53.400.000	160 Sambutan	52.149.400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materi/ pokok-pokok pikiran untuk penyusunan naskah sambutan sambutan terlambat diantar ke Bagian Humas</li> <li>Materi pemberitaan yang di kirim ke media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan penegasan pada pihak yang melaksanakan kegiatan untuk menyerahkan pokok pikiran kepada Bagian Humas paling lama 1 minggu sebelum</li> </ul>	
			Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers	16 kali pemberitaan	228.595.400	16 kali pemberitaan	224.326.400			
			Penerbitan Buletin Warta Flotim	2 Edisi	100.025.000	2 Edisi	96.349.850			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>					di kirim ke media terlambat di publikasi • Materi untuk buletin warta Flotim terlambat dicetak oleh pihak ketiga. • Kurangnya koordinasi dari penyelenggara kegiatan kepada Bagian Humas	minggu sebelum kegiatan dilaksanakan • Memberikan penegasan kepada pihak media agar materi yang telah di kirim segera di publikasi • Memberikan penegasan kepada pihak ketiga agar materi yang dikirim segera dihimpun dan di cetak dalam bentuk majalah buletin warta Flotim • Memberikan penegasan pada penyelenggara kegiatan untuk berkoordinasi secara intens dengan Bagian Humas	
			Pelayanan Kegiatan Kedinasan/Protokoler Bupati dan Wakil Bupati	350 Kegiatan	430.293.250	320 Kegiatan	429.764.400			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Humas pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.802.590.050,- dari target Rp.812.313.650,- atau sebesar 98,80%										
<b>BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>							
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19 kecamatan	49.950.000	19 kecamatan	49.519.500			
			Koordinasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 kali	19.908.000	4 kali	19.632.500			
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), EKPPD dan ILPPD Kabupaten Flores Timur	15 Buku LPPD dan 1 Buku ILPPD	130.138.400	15 Buku LPPD	129.753.400			
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur	2 dokumen dan 75 Buku	68.650.000	2 dokumen dan 75 Buku	68.650.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Pembinaan dan Pengawasan Batas Wilayah Kabupaten Flores Timur, Sikka dan Lembata	6 kali	48.710.650	6 kali	48.571.000			
			Fasilitasi Penyelenggaraan FORKOMPIMDA Kabupaten Flores Timur	12 Bulan	2.994.618.000	12 Bulan	2.982.983.000			
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	19 kecamatan	64.564.350	19 kecamatan	64.201.500			
			Persehatian dan Pengawasan Batas Wilayah Desa Antar Kecamatan	19 kecamatan	32.527.000	19 kecamatan	31.468.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.3.394.778.900,- dari target Rp.3.409.066.400,- atau sebesar 99,58%										
<b>BAGIAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>							
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	3 dokumen	65.849.000	3 dokumen	65.620.400			
			Koordinasi dan Monitoring Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	3 dokumen	41.790.500	3 dokumen	41.773.000			
			Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Dampak Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	3 dokumen	40.595.000	3 dokumen	40.470.000			
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	5 dokumen	65.304.500	5 dokumen	65.150.600			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.213.014.000,- dari target Rp.213.539.000,- atau sebesar 99,75 %										
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>			<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &amp; Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>							
			Koordinasi dan Pengendalian Bidang Koperasi dan Industri Perdagangan	3 kali	21.003.000	2 kali	20.923.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya dana untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>Kurangnya Tenaga Fungsional Umum dan Sarana Penunjang dalam bekerja misalnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu penambahan anggaran untuk Monitoring Evaluasi</li> <li>Penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan agar</li> </ul>	
			Koordinasi dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal	3 kali	17.215.000	2 kali	17.210.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Koordinasi dan Pengendalian Badan Usaha Daerah	2 kali	73.663.750	2 kali	73.663.500	; komputer dan Laptop	tercapai tujuan sesuai target anggaran yang ada
			Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Raskin	2 kali	18.766.023	2 kali	18.765.273		
			Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tata Niaga BBM	3 kali	27.404.500	3 kali	27.369.500		
			Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	1 kali	2.775.000	1 kali	2.775.000		
			Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	2 kali	28.250.000	2 kali	28.250.000		
			Koordinasi dan Konsultasi Tanggung Jawab Sosial	2 kali	15.425.000	2 kali	15.385.000		
			Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Pertanian	2 kali	26.407.105	2 kali	26.407.105		
			Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan	2 kali	16.115.395	2 kali	16.020.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.246.768.378,- dari target Rp.247.024.773,- atau sebesar 99,90%									
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &amp; Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>				Banyak OPD yang belum secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan APBD baik paket pekerjaan fisik maupun DAK secara rutin		Surat penegasan kepada seluruh OPD agar tertib menyampaikann laporan pelaksanaan paket pekerjaan fisik dan DAK secara rutin.	
		Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	4 kali, rapat, 12 kali monev pengendalian pembangunan 20 OPD	228.440.400	4 kali, rapat, 12 kali monev pengendalian pembangunan 20 OPD	227.630.800			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.227.630.800,- dari target Rp.228.440.400,- atau sebesar 99,65%									
<b>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>				• Dari hasil monitoring dan evaluasi vendor ditemukan bahwa banyak penyedia yang belum memiliki kantor secara mandiri, tetapi masih gabung dengan rumah tinggal, data peralatan masih banyak yang disewa bukan milik sendiri, banyak penyedia		• Pada saat melakukan monev vendor tim sekaligus memberikan masukan dan pembinaan terkait masalah yang ditemukan dilapangan • Bersurat kepada OPD segera • Mengakomodir kebutuhan terkait	
		Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	8 kali rapat koordinasi	66.754.500	Monitoring dan evaluasi pada vendor sebanyak 38 vendor, monitoring penginputan data RUP pada 30	66.754.500			

No	OPD Pelaksana/ Urutan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						OPD, dan 8 kali rapat koordinasi (Vidcom) dengan LKPP di Jakarta		yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ijin-ijin yang dimiliki. <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada OPD yang terlambat menginput data RUP pada aplikasi SIRUP</li> <li>Terbatasnya dukungan anggaran sehingga masih sulit mencapai 17 standar LKPP. LPSE Kabupaten Flores Timur sudah memenuhi 12 standar LKPP</li> <li>Tingkat Kematangan ULP Kabupaten Flores Timur masih dalam level 1 dari 3 level yang ditetapkan LKPP dikarenakan</li> <li>Terbatasnya SDM pada ULP Kabupaten Flores Timur termasuk ASN dengan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Darang/Jasa.</li> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana seperti : Bangunan Gedung/Kantor yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP (termasuk sarana pelengkap bangunan gedung/kantor), Terbatasnya laptop, printer, lemari arsip, kursi, meja, dan lain-lain</li> </ul>	dukungan pencapaian standar LPSE berstandarisasi LKPP dalam penyusunan Rencana Kerja Untuk peningkatan level kematangan ULP perlu penambahan ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, ASN bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Jabatan Fungsional PPBJ dengan metode inpassing, dan peningkatan sarana dan prasarana gedung.
<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>									
			Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	70 paket	426.429.200	61 paket	419.109.600		
			Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	70 paket	333.295.000	61 paket	311.828.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin e-monev kurang responsive terhadap penginputan data pada aplikasi e-monev terkait pelaksanaan kontrak kerja untuk semua paket pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</li> <li>• Pokja ULP belum sepenuhnya menjabat sebagai Fungsional PPBJ.</li> <li>• Terbatasnya jumlah ASN yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.797.692.100,- dari target Rp.826.478.700,- atau sebesar 96,52%									
<b>BAGIAN ORGANISASI</b>			<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>						
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 dokumen	131.378.200	1 dokumen	129.554.700		
			Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja Kabupaten Flores Timur	1 dokumen	20.199.950	1 dokumen	18.489.450		
			Penyusunan LAKIP Kabupaten Flores Timur	1 dokumen	63.513.000	1 dokumen	59.708.551		
			Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	30 OPD	107.385.738	30 OPD	104.600.788		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10 dokumen	78.573.900	10 dokumen	77.640.850		
			Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 dokumen	25.640.500	1 dokumen	25.633.990		
			Penyusunan Dokumen Road Map Birokrasi	1 dokumen	49.253.000	1 dokumen	49.152.300		
			Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	86.183.500	1 dokumen	84.300.100		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.549.080.729,- dari target Rp.562.127.788,- atau sebesar 97,68%									

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	<b>BAGIAN HUKUM</b>		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>							
			Pembentukan Peraturan Daerah	12 produk hukum	367.133.800	13 produk hukum	359.198.511			
			Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	560 (550 LD, 10 BD)	157.653.200	560 (550 LD, 10 BD)	155.148.950			
			Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	393 (61 Perbup, 332 Keppup)	47.668.000	429 (68 Perbup, 364 Keppup)	45.463.000			
			Pembentukan Produk Hukum Desa	35 desa	35.930.000	35 desa	35.750.000			
			<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum</b>							
			Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	2 kali	50.014.300	2 kali	49.979.300			
			<b>Program Advokasi Hukum</b>							
			Pelayanan Bantuan Hukum (Ligitasi dan Non Ligitasi)	2 kasus	120.840.400	2 kasus	120.484.400			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.766.024.161,- dari target Rp.779.239.700,- atau sebesar 98,30 %										
	<b>BAGIAN UMUM</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.450.000	12 bulan	6.444.600			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	300.500.000	12 bulan	299.379.150			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	13.500.000	12 bulan	13.127.800			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	177.600.000	12 bulan	177.600.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	70.850.000	12 bulan	70.846.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	122.362.500	12 bulan	122.329.500			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	49.000.000	12 bulan	48.971.500			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	95.000.227	12 bulan	94.991.000			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	211.404.750	12 bulan	210.740.000			



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	34.805.000	12 bulan	34.182.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	426.250.000	12 bulan	426.247.450		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	1.040.082.375	12 bulan	1.039.956.300		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	121 orang	1.697.400.000	121 orang	1.662.900.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	228.090.000	12 bulan	227.665.500		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	371.500.000	20 unit	371.449.450		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	28.800.000	12 bulan	28.775.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	12 bulan	18.000.000	12 bulan	17.985.000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
			Kajian/Telaahan Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi-Keluangan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	12 bulan	24.200.000	12 bulan	23.754.800		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000		
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>									
			Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 kali	205.000.000	100 kali	204.850.000		
			Koordinasi dan Fasilitasi Tamu Pemda	25 kali	358.150.000	25 kali	357.360.250		

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.5.469.555.300,- dari target Rp.5.508.944.852,- atau sebesar 99,28%

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya						
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
KEPALA DAERAH			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar	2.400.000	200 lembar					2.400.000				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	322.400.000	12 bulan					322.359.329				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	5.000.000	4 unit					4.989.650				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31 jenis	68.119.200	31 jenis					68.118.004				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	45 jenis	72.976.500	45 jenis					72.972.000				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50 buku	55.680.000	50 buku					55.679.600				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30 jenis	69.279.447	30 jenis					69.276.500				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis	44.660.000	6 jenis					44.660.000				
			Penyediaan Makanan dan Minuman	7000 dos	860.200.000	7000 dos					860.196.500				
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	250 kali	456.300.000	250 kali					367.144.443				
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12 bulan	35.000.000	12 bulan					35.000.000				
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>												
			Pembangunan Rumah Jabatan	1 unit ruang rapat	88.275.058	1 unit ruang rapat					85.684.558				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1 unit	734.660.000	1 unit					734.653.250				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4 unit	255.195.000	4 unit					255.186.138				
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>												
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 paket	79.029.000	1 paket					76.144.000				
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>												
			Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	150 kali	310.700.000	150 kali					310.700.000				

No	OPD Pelaksana/ Urutan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya		
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.3.365.163.972,- dari target Rp.3.459.874.205,- atau sebesar 97,26%								
	WAKIL KEPALA DAERAH		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 kali	1.800.000	100 kali	1.800.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	215.212.000	12 bulan	214.835.414					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	5.700.000	4 unit	5.613.700					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31 jenis	48.925.500	31 jenis	48.925.000					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	45 jenis	19.912.000	45 jenis	19.912.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500 buku	25.400.000	500 buku	25.395.000					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor	8 jenis	51.284.444	8 jenis	51.284.000					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis	39.660.000	6 jenis	39.540.000					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	7000 dos	543.000.000	7000 dos	543.000.000					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	250 kali	353.325.000	250 kali	350.851.390					
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000					
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	25 unit	85.280.000	25 kali	84.936.500					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1 unit rumah jabatan	462.182.500	1 unit rumah jabatan	462.055.824					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4 unit	109.345.000	4 unit	109.313.600					
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 paket	58.860.000	1 paket	56.026.000					
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>							
		Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	150 kali	237.088.000	150 kali	237.000.000					

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.2.275.488.428,- dari target Rp.2.281.974.444,- atau sebesar 99,72 %										
26.	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b> (Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan)									
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	223 lembar	1.490.000	245 lembar	1.489.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	43.609.800	12 bulan	41.364.544			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19 unit	18.500.000	19 unit	14.635.650			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	55.200.000	12 bulan	53.400.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37 jenis	27.214.850	34 jenis	27.045.150			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	25 jenis	20.318.250	29 jenis	20.039.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12.933.950	12 bulan	11.052.400			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	11.990.700	12 bulan	11.952.500			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 jenis	33.250.000	9 jenis	27.076.500			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1534 kotak	69.027.500	1533 kotak	68.990.500			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 kali	122.792.600	4 kali	122.102.800			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	33 orang	449.450.000	33 orang	428.900.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 unit	10.000.000	1 unit	8.500.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	70.000.000	1 unit	67.296.500			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	3 unit	117.074.400	3 unit	115.088.518			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	61.930.200	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	61.665.860		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6 jenis	16.250.000	6 jenis	13.630.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3 jenis	18.500.000	3 jenis	18.500.000		
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali	14.227.490	1 kali	14.227.490		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	36.457.610	11 dokumen	36.202.200		
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>						
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 perda	477.654.802	8 perda	472.541.984		
			Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	12 kali	40.999.050	12 kali	40.850.600		
			Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	19.940	1.929.682.500	19.819	1.907.405.912		
			Rapat-Rapat Paripurna	120 kali	204.351.000	120 kali	203.150.500		
			Kegiatan Reses	3 kali	2.549.745.250	2 kali	2.549.353.000		
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	12 bulan	493.765.000	12 bulan	492.759.200		
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	30 orang	842.736.804	30 orang	835.949.862		
			Pembuatan Peraturan Daerah	3 perda	377.126.400	1 perda	375.236.785		
			Inisiatif DPRD						
			Rapat-rapat Fraksi	25 kali	36.068.650	25 kali	36.016.900		
<p>Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 8.076.423.355,- dari target Rp. 8.162.346.806,- atau sebesar 98,95%</p>									

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Penyisihan	Catatan																																																																																
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran																																																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																																																																
27.	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> (Fungsi Penunjang Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERDA Nomor 12 Tahun 2019 Tentang APBD Kab. Flores Timur TA. 2020 Tgl 17 Des 2019</li> <li>• PERBUB Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kab. Flores Timur TA. 2020 Tgl 18 Des 2019</li> <li>• PERDA Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD Kab. Flores Timur TA 2020 tgl 2 Nov 2020</li> <li>• PERBUB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Flores Timur ta 2020 tgl 3 Nov 2020</li> <li>• PERBUB Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERBUB Flores Timur No 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020 (khusus Silpa membiayai kegiatan lanjutan TA 2019) tgl 28 Feb 2020</li> <li>• PERBUB No 6 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian/pergeseran APBD TA 2020 untuk penanganan Covid-19 tgl 24 Maret 2020</li> <li>• PERBUB Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas</li> </ul>	<p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>1350 lembar</td> <td>12.600.000</td> <td>1350 lembar</td> <td>12.316.811</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</td> <td>12 bulan</td> <td>167.600.000</td> <td>12 bulan</td> <td>147.964.194</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</td> <td>12 bulan</td> <td>11.300.000</td> <td>12 bulan</td> <td>5.397.430</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</td> <td>12 bulan</td> <td>71.400.000</td> <td>12 bulan</td> <td>53.850.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</td> <td>12 kali</td> <td>16.460.500</td> <td>12 kali</td> <td>16.397.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Alat Tulis Kantor</td> <td>25 jenis</td> <td>143.011.700</td> <td>25 jenis</td> <td>142.939.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</td> <td>12 bulan</td> <td>124.501.000</td> <td>12 bulan</td> <td>114.978.850</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td> <td>12 bulan</td> <td>12.806.033</td> <td>12 bulan</td> <td>12.671.500</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</td> <td>4 jenis</td> <td>10.200.000</td> <td>4 jenis</td> <td>7.420.000</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Makanan dan Minuman</td> <td>700 dos</td> <td>42.500.000</td> <td>700 dos</td> <td>42.028.640</td> </tr> <tr> <td>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi</td> <td>2 jenis</td> <td>290.741.500</td> <td>2 jenis</td> <td>287.253.136</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran</td> <td>90 orang</td> <td>687.700.000</td> <td>90 orang</td> <td>509.450.000</td> </tr> </table> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Pengadaan Perlemengkapan Gedung Kantor</td> <td>10 unit</td> <td>2.934.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</td> <td>3 unit</td> <td>25.000.000</td> <td>1 unit</td> <td>21.410.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td> <td>66 unit</td> <td>88.550.000</td> <td>27 unit</td> <td>84.047.328</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</td> <td>25 unit</td> <td>40.400.000</td> <td>25 unit</td> <td>39.725.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</td> <td>70 unit</td> <td>10.000.000</td> <td>70 unit</td> <td>9.948.600</td> </tr> </table>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1350 lembar	12.600.000	1350 lembar	12.316.811	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	167.600.000	12 bulan	147.964.194	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	11.300.000	12 bulan	5.397.430	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	71.400.000	12 bulan	53.850.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 kali	16.460.500	12 kali	16.397.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25 jenis	143.011.700	25 jenis	142.939.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	124.501.000	12 bulan	114.978.850	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12.806.033	12 bulan	12.671.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	10.200.000	4 jenis	7.420.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	700 dos	42.500.000	700 dos	42.028.640	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 jenis	290.741.500	2 jenis	287.253.136	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	90 orang	687.700.000	90 orang	509.450.000	Pengadaan Perlemengkapan Gedung Kantor	10 unit	2.934.000	0	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 unit	25.000.000	1 unit	21.410.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	66 unit	88.550.000	27 unit	84.047.328	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25 unit	40.400.000	25 unit	39.725.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	70 unit	10.000.000	70 unit	9.948.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Refocusing dan Realokasi</li> <li>• Melakukan penyesuaian target anggaran dan output sesuai kemampuan Keuangan Daerah</li> </ul>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1350 lembar	12.600.000	1350 lembar	12.316.811																																																																																					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	167.600.000	12 bulan	147.964.194																																																																																					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	11.300.000	12 bulan	5.397.430																																																																																					
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	71.400.000	12 bulan	53.850.000																																																																																					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 kali	16.460.500	12 kali	16.397.000																																																																																					
Penyediaan Alat Tulis Kantor	25 jenis	143.011.700	25 jenis	142.939.000																																																																																					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	124.501.000	12 bulan	114.978.850																																																																																					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12.806.033	12 bulan	12.671.500																																																																																					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	10.200.000	4 jenis	7.420.000																																																																																					
Penyediaan Makanan dan Minuman	700 dos	42.500.000	700 dos	42.028.640																																																																																					
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 jenis	290.741.500	2 jenis	287.253.136																																																																																					
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	90 orang	687.700.000	90 orang	509.450.000																																																																																					
Pengadaan Perlemengkapan Gedung Kantor	10 unit	2.934.000	0	0																																																																																					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 unit	25.000.000	1 unit	21.410.000																																																																																					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	66 unit	88.550.000	27 unit	84.047.328																																																																																					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25 unit	40.400.000	25 unit	39.725.000																																																																																					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	70 unit	10.000.000	70 unit	9.948.600																																																																																					

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		PERBUB Flores Timur Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020 tgl 22 April 2020 • PERBUB Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PERBUB Flores Timur Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020 tgl 4 Juni 2020 • PERBUB Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PERBUB Flores Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 tgl 20 Juli 2020 • Nomor : <u>HK.04/NKB/PEMKA/BLT/2020/07</u> DPRD TAHUN 2020 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TAHUN 2020 • Nomor : <u>HK.03/NKB/PEMKA/BLT/2020/05</u> DPRD TAHUN 2020 Tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 • PERDA Kabupaten Flores Timur Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10 dokumen	105.576.500	10 dokumen	105.496.400			
			Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan	2 dokumen	283.092.000	2 dokumen	247.108.700			
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya	2 dokumen	52.016.500	2 dokumen	51.277.500			
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>							
			Pemeliharaan LPJU	400 titik lampu	512.010.000	96 titik lampu	497.878.525			
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							
			Penyusunan Standar Satuan Harga	1 dokumen	39.236.000	1 dokumen	36.940.800			
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.139.474.000	2 dokumen	948.865.744			
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	921.321.700	2 dokumen	919.695.540			
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	853.323.366	2 dokumen	808.906.725				

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pelaksanaan APBD TA 2019 • PERBUB Flores Timur Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 dokumen	118.427.500	6 dokumen	98.665.200		
			Sertifikasi Tanah Pemda	10 bidang	9.300.000	10 bidang	9.300.000		
			Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga	12 bulan	318.091.000	12 bulan	310.759.300		
			Penghapusan Barang Milik Daerah	40 unit	55.800.000	40 unit	48.526.500		
			Pembebasan Tanah Pemda	1 bidang	325.704.500	1 bidang	116.882.000		
			Pengamanan Aset Daerah	30 lokasi	698.500	30 lokasi	698.500		
			Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah	12 bulan	134.796.000	12 bulan	134.075.606		
			Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Keuangan Daerah	4 sistem aplikasi	613.682.500	4 sistem aplikasi	591.569.686		
			Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah	12 bulan	95.043.500	12 bulan	88.057.750		
			Penyusunan KUA dan PPAS	4 dokumen	533.257.000	4 dokumen	477.073.300		
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	18.780.500	-	0		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 6.999.575.265,- dari target Rp. 7.887.335.799,- atau sebesar 88.74%									
<b>28.</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b> (Fungsi Penunjang Pengawasan)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					• Kegiatan Ini Tidak Terlaksana karna adanya Refocusing dan Realokasi Anggaran Penangana COVID-19	• Dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 kali	2.965.000	100 kali	2.342.400		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	34.600.000	12 Bulan	34.594.700		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	2.355.500	13 Unit	2.182.700		



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	33.000.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6.842.500	12 Bulan	6.842.170		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	54 Jenis	65.676.600	54 Jenis	65.673.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46281 (606 LHP + 45.075 lembar penggandaan + 600 eksemplar penjilidan)	41.555.300	46281 (606 LHP + 45.075 lembar penggandaan + 600 eksemplar penjilidan)	39.900.418		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Komponen	7.335.960	5 Komponen	7.302.547		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	4.909.000	3 Jenis	4.779.950		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	7 OK	95.709.900	7 OK	92.719.600		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	17 Orang	262.200.000	17 Orang	255.300.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	14.950.000	1 Paket	14.299.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1 Unit	9.155.000	1 Unit	9.155.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	51.052.750	1 Unit	50.988.500		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	25.622.073	1 Unit	25.621.193		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21 Unit	10.300.000	21 Unit	10.297.750		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
			Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pegawai	1 Kali	121.255.700	1 Kali	117.087.500		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	29.162.750	9 Dokumen	29.057.000		

No (1)	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan (2)	Kebijakan (3)	Uraian Program/Kegiatan (4)	Target		Realisasi		Permasalahan (9)	Upaya mengatasinya (10)
				Kinerja (5)	Anggaran (6)	Kinerja (7)	Anggaran (8)		
			<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>						
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	587 Obrik	1.132.266.200	587 Obrik	1.107.406.050		
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	23 Kasus	218.129.000	23 Kasus	202.924.850		
			Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	2 Kali	88.788.700	2 Kali	88.788.700		
			Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	2 Obrik	223.151.000	2 Obrik	220.559.350		
			MONEV terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi	14 Kali	70.651.000	14 Kali	68.443.982		
			Koordinasi Pengawasan	14 Kali	130.000	0	-		
			Inventarisasi Temuan Pengawasan	50 LHP	6.733.000	45 LHP	6.733.000		
			Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)	16 Kali	111.466.391	16 Kali	111.245.141		
			<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>						
			Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1 Orang	31.576.000	1 Orang	31.576.000		
			Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	1 Orang	35.532.025	1 Orang	35.532.205		
			<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>						
			Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 Dokumen	24.926.000	3 Dokumen	24.912.000		
<p>Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 2.699.265.026,- dari target Rp.2.761.997.349,- atau sebesar 97,73%</p>									

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29.	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> (Fungsi Penunjang Kepegawaian)								
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan yaitu printer yang masa penggunaannya relatif singkat (cepat rusak) karena tingginya beban kerja sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan</li> <li>• Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan peningkatan kompetensi teknis PNS melalui diklat</li> <li>• Dukungan OPD/Instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian masih belum maksimal sehingga kadang menghambat pada proses administrasi berikutnya</li> <li>• Tingkat kedisiplinan para pegawai masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mutu dan jumlah sarana prasarana kebutuhan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas</li> <li>• Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan OPD lain yang terkait baik di pusat maupun di Regional X Denpasar, termasuk perubahan Regulasi</li> <li>• Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi yang baik dengan OPD lainnya dalam menata Manajemen Kepegawaian di Daerah</li> <li>• Peningkatan Kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis/fungsional maupun kepemimpinan dengan maksud untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan pegawai dalam meningkatkan pelayanan serta terbinanya administrasi yang tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	5.100.000	12 bulan	3.271.100		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	28.800.000	12 bulan	23.321.740		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	3.500.000	12 bulan	1.984.250		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	41.400.000	12 bulan	41.400.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	7.133.000	12 bulan	7.133.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	32.896.600	12 bulan	32.887.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	33.800.000	12 bulan	33.800.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3.920.118	12 bulan	3.397.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	3.240.000	12 bulan	2.395.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	9.750.000	12 bulan	9.750.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	36 kali	179.205.000	36 kali	176.634.000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	13.800.000	12 bulan	13.800.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	6.336.000	12 bulan	5.050.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	42.170.000	12 bulan	41.925.870		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	4.800.000	12 bulan	4.750.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	5.750.000	12 bulan	5.750.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	61.622.200	7 dokumen	61.522.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi anggaran lebih di tingkatkan lagi dalam memfasilitasi kegiatan kepegawaian baik peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kompetensi SDM Aparatur</li> <li>• Melakukan monitoring evaluasi kegiatan</li> <li>• Menerapkan sistem Reward dan Punishment yang lebih tegas lagi terhadap seluruh pegawai guna meningkatkan kedisiplinan</li> </ul>
			Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	206 jabatan	301.368.400	553 jabatan	295.627.200		
			Seleksi Penerimaan Calon PNS	54 CPNS	434.687.500	54 CPNS	432.280.991		
			Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	20 kasus	41.395.000	24 kasus	38.669.100		
			Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	115 orang	113.568.700	158 orang	111.925.000		
			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Mutasi PNSD	2.490 orang	50.393.000	2.604 orang	50.235.800		
			Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabhakti/Pensiun	175 orang	48.545.000	200 orang	44.859.300		
			Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi Kepegawaian	5.400 file	130.650.000	4.950 file	128.409.100		
			Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	100 orang	43.007.200	89 orang	39.708.300		
			Penataan Sistem Administrasi/Proses Penyesuaian Karpeg/Taspen dan Karis/Karsu	400 orang	18.715.500	216 orang	17.058.000		
			Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	20 orang	45.127.300	20 orang	44.250.400		
			Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	3 orang	240.899.300	3 orang	240.791.300		
			Penyusunan Rencana Formasi Pegawai dan Pemetaan Jabatan	400 formasi	20.984.867	519 orang	20.984.867		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 1.933.570.818,- dari target Rp. 1.972.564.685,- atau sebesar 98,02%									
30.	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> (Fungsi Penunjang Perencanaan)		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbup No.40 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata</li> </ul>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880 kali	4.700.000	155 kali	828.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	46.300.000	12 bulan	34.775.834		

No (1)	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan (2)	Kebijakan (3)	Uraian Program/Kegiatan (4)	Target		Realisasi		Permasalahan (9)	Upaya mengatasinya (10)	
				Kinerja (5)	Anggaran (6)	Kinerja (7)	Anggaran (8)			
		Kerja BPPPPD • Perbup No. 57 Tentang Uraian Tugas BPPPPD • Perbub No.33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kab.Flortim Tahun 2021 • Perbub No.47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kab. Flotim Tahun 2020 • Perbub No.27 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting • Perbub No.68 Tahun 2018 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18 unit	9.200.000	18 unit	6.456.025			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	44.530.000	12 bulan	44.530.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30 jenis	4.758.500	30 jenis	4.758.500			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 jenis	20.021.000	30 jenis	20.021.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2100 buku	62.845.000	2100 buku	62.845.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	2.700.830	8 jenis	2.700.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	830 eks	5.360.000	298 eks	1.920.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	2850 dos	29.000.000	2850 dos	29.000.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	36 kali	231.375.700	30 kali	147.683.736			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	19 orang	262.265.000	18 orang	219.167.390			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pengadaan Mebeleur	77 buah kursi rapat	40.000.000	77 buah kursi rapat	39.125.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	12.110.000	1 unit	11.600.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18 unit	51.695.000	18 unit	36.169.910			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	12 unit	12.280.000	12 unit	12.219.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	26 unit	28.600.000	26 unit	15.545.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	6 dokumen	35.404.500	6 dokumen	35.400.000			
			<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>							
			Penyusunan Profil Daerah	1 buku	93.174.000	1 buku	93.056.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>							
			Koordinasi Kerjasama Kemitraan dengan LSM/NGO	13 LSM	39.483.350	11 LSM	34.624.000			
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
			Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 orang	187.817.500	100 orang	130.687.900			
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
			Penyusunan Rancangan RKPD	3 dokumen	435.558.000	3 dokumen	433.833.700			
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 dokumen	145.663.000	1 dokumen	136.613.000			
			Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 dokumen	161.855.000	2 dokumen	127.735.100			
			Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	174.770.500	2 dokumen	155.523.400			
			Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 sistem aplikasi perencanaan	42.381.100	1 sistem aplikasi perencanaan	17.506.100			
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>							
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Bawah	1 dokumen	103.200.500	1 dokumen	99.628.674			
			<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>							
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	5 dokumen	139.756.500	5 dokumen	124.259.100			
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen	88.094.000	1 dokumen	28.779.000			
			<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>							
			Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah	1 dokumen	106.102.500	1 dokumen	93.126.200			
			Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	1 dokumen	357.341.000	1 dokumen	315.305.238			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>							
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah	1 paket	10.785.400	1 paket	10.785.400			
			<b>Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, dan Pemerintahan</b>							
			Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi	1 paket	12.433.000	1 paket	12.365.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.2.538.572.207,- dari target Rp. 3.001.560.880,- atau sebesar 84,58%										
<b>31.</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> (Fungsi Penunjang Keuangan)									
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan anggaran untuk Peningkatan Perencanaan Pengelolaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai akibat dari Refokusing anggaran terkait Penanganan Pandemi Covid-19.</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan skala prioritas</li> </ul>			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	5.050.000	12 bulan				4.768.600
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	42.865.800	12 bulan				33.115.800
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	9.750.000	1 paket				8.602.560
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	5.780.000	27 unit				5.123.900
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11 orang	52.100.000	8 orang				50.450.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	5.819.500	12 bulan				5.586.500
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	25 jenis	68.540.500	25 jenis				67.736.500
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	36.163.200	3 jenis				34.374.800
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38 jenis	5.444.027	38 jenis				4.191.188
			Penyediaan Makanan dan Minuman	370 dos	20.830.000	370 dos				19.479.550
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 kali	85.480.100	2 kali				85.314.700
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	59 orang	948.300.000	59 orang				929.900.000

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pengadaan Mebeleur	8 unit	41.990.000	8 unit	38.650.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	22.900.000	27 unit	22.898.734			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	26 unit	8.176.000	26 unit	8.090.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	70 unit	11.200.00	70 unit	11.061.000			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dok	26.587.000	10 dok	25.380.500			
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							
			Pengadaan Sarana Pungutan	50 jenis	172.780.000	50 jenis	172.776.000			
			Implementasi Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB	1 aplikasi	346.310.000	1 aplikasi	339.202.320			
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	2 dok	91.972.400	2 dok	85.362.600			
			Penatausahaan Pendapatan dan Penagihan Penerimaan Daerah	8 jenis	269.003.000	8 jenis	251.153.600			
			Pemeliharaan Pasar Daerah	2 pasar	78.890.010	2 pasar	75.615.475			
			Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	3 kali	7.212.500	3 kali	6.692.500			
			Pendataan/Pemutakhiran Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	307.000 OP	149.427.110	307.000 OP	146.085.400			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 2.431.612.227,- dari target Rp.2.512.571.147,- atau sebesar 96,78%										
32.	<b>KECAMATAN – KECAMATAN</b> (Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang)									
	<b>KECAMATAN WULANGGITANG</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165 Lembar	990.000	165 Lembar	990.000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	9.500.000	3 Jenis	9.500.000				



No (1)	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan (2)	Kebijakan (3)	Uraian Program/Kegiatan (4)	Target		Realisasi		Permasalahan (9)	Upaya mengatasinya (10)
				Kinerja (5)	Anggaran (6)	Kinerja (7)	Anggaran (8)		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	2.250.000	5 Unit	1.670.300		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 Orang	26.400.000	4 Orang	26.400.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23 Jenis	3.186.000	23 Jenis	3.186.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 Jenis	20.261.600	50 Jenis	20.258.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.371 Lembar. 100 Eksemplar	7.548.400	16.371 Lembar. 100 Eksemplar	7.544.800		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	3.401.390	7 Jenis	3.401.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1 Jenis	900.000	1 Jenis	900.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	316 OM	11.937.500	316 OM	11.937.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	401 Kali	76.935.000	401 Kali	75.872.500		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	7 orang	96.710.000	7 orang	96.710.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit	5.660.700	2 unit	5.652.500		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	8.700.000	5 unit	8.700.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	7.475.000	4 jenis	7.473.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3 jenis	5.785.000	3 jenis	5.780.000		
<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>									
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	13.250.000	1 kali	13.250.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	9 orang	56.400.000	8 orang	52.400.500		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	11 desa	29.363.000	11 desa	29.318.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya		
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wulanggitang dan telah ditetapkan dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp.380.944.100,- dari target Rp.386.654.090,- atau sebesar 98,52%								
	KECAMATAN TITEHENA		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	750.000	12 bulan	750.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	4.780.000	12 bulan	4.773.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	1.750.000	6 unit	1.531.120					
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	31.260.000	7 orang	31.260.000					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27 jenis	2.921.516	27 jenis	2.921.000					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis	14.250.000	50 jenis	14.250.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75 lembar, 76 buku	4.875.000	75 lembar, 76 buku	4.875.000					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	3.334.525	9 jenis	3.334.000					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	336 exemplar	1.920.000	336 exemplar	1.920.000					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	19.590.000	12 bulan	19.590.000					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	78.670.000	12 bulan	78.670.000					
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	9 orang	119.600.000	9 orang	119.600.000					
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit gedung	70.000.000	1 unit gedung	70.000.000					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit roda 2	3.940.000	7 unit roda 2	3.940.000					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 unit laptop, 2 unit printer	1.000.000	3 unit laptop, 2 unit printer	1.000.000					
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>							
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	13.371.500	12 dokumen	13.363.500					

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>							
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	15.900.000	1 kali	15.900.000			
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	70.606.500	12 bulan	70.601.500			
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14 desa	47.736.000	14 desa	47.691.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Titehena dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp.505.970.120,- dari target Rp. 505.255.041,- atau sebesar 99,94%										
	<b>KECAMATAN LARANTUKA</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	19.320.000	12 bulan	17.847.700			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	3.250.000	12 bulan	2.088.800			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	25.200.000	12 bulan	25.200.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	3.500.000	12 bulan	3.500.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	25.764.500	12 bulan	25.764.500			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	19.000.000	12 bulan	18.493.100			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.500.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12 bulan	1.740.000	12 bulan	1.110.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	24.800.000	12 bulan	24.800.000			
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	75.000.000	12 bulan	74.761.200			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	82.800.000	12 bulan	81.650.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	27.000.000	12 bulan	26.267.500			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>						
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 dokumen	10.895.000	7 dokumen	10.838.000		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	12 bulan	29.042.000	12 bulan	29.040.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	61.000.000	12 bulan	58.200.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	8.680.000	12 bulan	8.680.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Larantuka dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 416.340.800,- dari target Rp. 425.091.500,- atau sebesar 97,94%									
	<b>KECAMATAN ILE MANDIRI</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar	450.000	100 lembar	450.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit (roda 2)	1.500.000	3 unit (roda 2)	422.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	26.545.000	4 orang	26.545.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17 unit	3.000.000	17 unit	3.000.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	24 jenis	10.500.000	24 jenis	10.500.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000 lembar	8.000.000	30.000 lembar	8.000.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1 jenis	900.000	1 jenis	150.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	400 dos	13.500.000	400 dos	13.500.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 kali	70.815.000	60 kali	70.815.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	14 orang	193.320.000	14 orang	193.320.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit	11.200.000	2 unit	11.200.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1.000.000	1 unit	980.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	3 unit	7.600.000	3 unit	7.600.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dok	9.621.500	7 dok	8.371.500		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	16.900.000	1 kali	16.900.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	56.400.000	12 bulan	53.250.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	8 desa	30.771.000	8 desa	28.971.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ile Mandiri dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 465.974.500,- dari target Rp. 474.022.500,- atau sebesar 98,30%									
	<b>KECAMATAN TANJUNG BUNGA</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan belum tepat waktu</li> <li>• Pelaksanaan tugas belum maksimal</li> <li>• Belum ada pemahaman bersama dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan lebih mengutamakan pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Perlu adanya pelatihan dan arahan terkait capaian kinerja</li> <li>• Perlu adanya sosialisasi bersama masyarakat</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar	750.000	100 lembar	750.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	3.977.000	4 unit	3.030.100		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	25.260.000	4 orang	25.260.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9 jenis	2.000.000	9 jenis	2.000.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	18 jenis	5.050.000	18 jenis	5.050.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3000 lembar	4.550.000	3000 lembar	4.550.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	2.000.000	3 jenis	2.000.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	300 dos	14.098.000	300 dos	14.098.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	90 kali	68.020.000	90 kali	68.020.000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	18 orang	248.400.000	18 orang	248.400.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	31.000.000	4 unit	31.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	13.371.500	7 dokumen	13.371.500		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	17.950.000	1 kali	17.950.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	63.350.000	12 bulan	63.350.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16 Desa	15.450.000	16 Desa	15.450.000		
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Bunga dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp.537.479.600,- dari target Rp. 538.426.500,- atau sebesar 99,82%						
	<b>KECAMATAN SOLOR BARAT</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 lembar	900.000	150 lembar	900.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	15.600.000	12 bulan	15.587.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit	1.048.000	6 unit	1.048.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	26.510.000	12 bulan	26.510.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	2.862.350	1 paket	2.861.500		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket	6.658.900	1 paket	6.643.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	4.527.000	1 paket	4.527.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	2.450.000	1 paket	2.450.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket	14.700.000	1 paket	14.700.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 paket	111.825.000	1 paket	106.883.000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	96.655.000	12 bulan	96.655.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	17.100.000	1 paket	17.096.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 paket	13.371.500	1 paket	13.351.000		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 paket	19.435.000	1 paket	19.435.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	1 paket	55.459.500	1 paket	55.397.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 paket	19.445.150	1 paket	19.400.000		
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Solor Barat dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 410.943.500,- dari target Rp. 416.047.400,- atau sebesar 98,77%						
	<b>KECAMATAN SOLOR TIMUR</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	942.000	12 bulan	942.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12.000.000	12 bulan	11.773.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit	6.000.000	6 unit	1.947.750		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	25.200.000	4 orang	25.200.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	22.000.000	12 bulan	21.999.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000 Fc + 45 buku	8.300.000	16.000 Fc + 45 buku	8.300.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3.555.000	12 bulan	3.554.500		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	20.555.000	12 bulan	20.555.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	96.045.000	12 bulan	96.045.000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	5 orang	69.000.000	5 orang	56.350.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 unit	21.350.000	6 unit	21.350.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	10.795.000	1 unit	10.795.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	41.865.000	5 unit	41.665.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.840.000	12 bulan	2.840.000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	13.371.500	5 dokumen	13.231.500		
<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>									
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	17.775.000	1 kali	17.775.000		



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	56.400.000	12 bulan	53.250.000			
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	20.225.000	12 bulan	20.225.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Solor Timur dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 434.798.250,- dari target Rp. 455.218.500,- atau sebesar 95,51%										
KECAMATAN ADONARA BARAT			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar	810.000	100 lembar	809.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	8.500.000	12 bulan	8.448.000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda, 4 unit roda 2	2.400.000	1 unit roda, 4 unit roda 2	1.583.880			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	25.200.000	4 orang	25.200.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9 jenis	1.870.000	9 jenis	1.870.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	31 jenis	11.118.000	31 jenis	11.109.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000 lembar	10.000.000	45.000 lembar	9.999.950			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	2.000.000	8 jenis	2.000.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	360 dos	7.000.000	360 dos	7.000.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 kali	86.225.000	25 kali	85.525.898			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	4 orang	55.400.000	4 orang	55.400.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	7.500.000	1 unit	7.500.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	14.000.000	5 unit	14.000.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 jenis	1.000.000	2 jenis	1.000.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	10.861.500	7 dokumen	10.852.200		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	13.250.000	1 kali	13.250.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	59.115.000	12 bulan	59.115.000		
			Pendampingan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	18 desa	27.173.000	18 desa	27.172.850		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Adonara Barat dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 341.835.778,- dari target Rp. 343.422.500,- atau sebesar 99,54%									
	<b>KECAMATAN WOTAN ULUMADO</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 lembar	840.000	101 lembar	725.000		
			Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	9.400.000	12 bulan	9.390.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit roda 2	2.250.000	6 unit roda 2	637.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	17.620.000	4 orang	17.400.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 jenis	2.500.000	10 jenis	2.495.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	9.500.000	20 jenis	9.264.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000 lembar, 50 buku	5.551.500	11.492 lembar, 9 buku	4.687.900		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor/Bangunan Kantor	4 jenis	1.000.000	4 jenis	976.500		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	172 dos	8.000.000	172 dos	6.900.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	70 kali	90.875.000	60 kali	90.237.000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	7 orang	96.795.000	7 orang	96.660.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	Target		Realisasi		(9)	(10)
				Kinerja (5)	Anggaran (6)	Kinerja (7)	Anggaran (8)		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	3.000.000	2 unit	2.808.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	15.462.500	1 unit	15.187.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	6.500.000	8 unit	6.435.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 unit	1.500.000	2 unit	1.500.000		
<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>									
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	15.150.000	1 kali	14.285.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	59.400.000	12 bulan	48.150.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 desa	19.954.100	12 desa	19.140.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wotan ulumado dan telah ditetapkan dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 346.877.900,- dari target Rp. 365.298.100,- atau sebesar 94,96%									
<b>KECAMATAN ADONARA TIMUR</b>									
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 lembar	900.000	450 lembar	900.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung kantor camat tidak mampu menampung dan memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan tugas pelayanan bagi aparatur</li> <li>Belum ada koordinasi antar SKPD dan pihak Kecamatan dalam melakukan kegiatan pembangunan di Desa yang diselenggarakan oleh pihak SKPD</li> <li>Aparatur kecamatan belum semuanya memahami dan mel;aksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab</li> <li>Alokasi dana yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan anggaran untuk rehabilitasi gedung kantor</li> <li>Membangun koordinasi secara berjenjang</li> <li>Melaksanakan tupoksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing</li> <li>Pembangunan usaha di arahkan ke BUMDES/ Koperasi</li> </ul>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	24.500.000	12 bulan	24.455.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	2.600.000	9 unit	2.130.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 orang	26.400.000	3 orang	26.400.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21 jenis	3.512.785	21 jenis	3.512.500		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	15.000.150	40 jenis	14.822.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.997 lembar, 100 penjilitan, 12 buku	13.000.100	12.997 lembar, 100 penjilitan, 12 buku	12.998.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	6.656.125	11 jenis	6.656.000		

No (1)	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan (2)	Kebijakan (3)	Uraian Program/Kegiatan (4)	Target		Realisasi		Permasalahan (9)	Upaya mengatasinya (10)	
				Kinerja (5)	Anggaran (6)	Kinerja (7)	Anggaran (8)			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	menunjang pelaksanaan pembangunan Desa di salurkan ke Desa belum tepat waktu, mengakibatkan pertanggungjawaban oleh Desa tidak sesuai dengan dana-dana pemberdayaan yang bersifat hibah ke Desa yang sifatnya bergulir (Anggur Merah, PUAP) yang disalurkan ke Desa/ kelompok Masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang produktif		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	540 dos	27.000.000	540 dos	27.000.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	175 kali (perjalanan Dinas)	117.461.500	175 kali (perjalanan Dinas)	117.350.000			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	13 orang	179.510.000	13 orang	179.510.000			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	30.000.000	12 bulan	29.986.500			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	9 unit	23.499.800	9 unit	23.465.500			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000			
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>							
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	15.650.000	1 kali	15.650.000			
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	102.900.000	12 bulan	102.775.000			
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	19 Desa	240.000	19 Desa	240.000			
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Adonara Timur dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 589.751.000,- dari target Rp. 590.730.450,- atau sebesar 99,83%							
	<b>KECAMATAN KELUBAGOLIT</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 lembar	900.000	300 lembar	900.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	7.800.000	12 bulan	7.800.000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	1.063.500	9 unit	1.063.500			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	26.460.000	4 orang	26.460.000			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14 jenis	1.000.000	14 jenis	1.000.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	44 jenis	7.000.000	44 jenis	7.000.000			

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000 lembar 100 buku	8.500.000	15.000 lembar 100 buku	8.500.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	1.500.000	10 jenis	1.500.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	300 dos	11.000.000	300 dos	11.000.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	210 kali	94.200.000	210 kali	93.992.500		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12 bulan	220.950.000	12 bulan	220.950.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	3.500.000	1 unit	3.500.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	17.170.000	9 unit	17.170.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3 unit PC, 4 leptop	3.296.500	3 unit PC, 4 leptop	3.296.500		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	13.371.500	10 dokumen	13.371.500		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	17.900.000	1kali	17.900.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	68.900.000	12 bulan	68.900.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 desa	8.150.000	12 desa	8.150.000		
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelubagolit dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 512.454.000,- dari target Rp. 512.661.500,- atau sebesar 99,96%						
	<b>KECAMATAN WITIHAMA</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	700.000	12 bulan	700.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	10.512.000	12 bulan	10.512.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit roda 2	3.750.000	9 unit roda 2	1.448.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	25.260.000	4 orang	25.200.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22 jenis	2.211.750	22 jenis	2.211.750		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	44 jenis	22.050.750	44 jenis	21.507.457		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.113 lembar, 100 jilit	6.645.200	17.113 lembar, 100 jilit	6.645.200		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 komponen	1.236.566	5 komponen	1.236.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	150 OM	19.000.000	150 OM	19.000.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	106.910.000	12 bulan	106.617.600		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	13 orang	179.800.000	13 orang	179.800.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	21.500.000	1 unit	21.112.000		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13 jenis	31.150.000	13 jenis	31.150.000		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 unit	20.320.000	4 unit	20.320.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	65.000.000	1 paket	65.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	13.640.000	12 bulan	13.640.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	13.371.500	8 dokumen	13.371.500		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>							
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	11.722.750	1 kali	11.722.750			
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	9 orang	56.400.000	9 orang	56.400.000			
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16 desa	10.255.000	16 desa	10.255.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Witihamana dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 619.749.257,- dari target Rp. 623.335.516,- atau sebesar 99,42%										
	KECAMATAN ILE BOLENG		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 lembar	900.000	150 lembar	900.000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	2.800.000	8 unit	1.400.000				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	26.400.000	4 orang	26.400.000				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19 jenis	1.191.000	19 jenis	1.191.000				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	37 jenis	8.000.500	37 jenis	8.000.500				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000 lembar 150 buku	10.500.000	50.000 lembar 150 buku	10.500.000				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis	1.000.000	16 jenis	1.000.000				
		Penyediaan Makanan dan Minuman	500 OM	10.000.000	500 OM	10.000.000				
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	83.600.000	12 bulan	83.600.000				
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	7 orang	96.600.000	7 orang	96.600.000				
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	7.500.000	8 unit	7.500.000					

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	13.371.500	6 dokumen	13.371.500		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	15.350.000	1 kali	15.350.000		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	70.400.000	12 bulan	47.850.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	21 desa	13.150.000	12 desa	13.150.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ile Bolong dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 356.813.000,- dari target Rp. 380.763.000,- atau sebesar 93,71%									
	KECAMATAN DEMON PAGONG		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	9.600.000	12 bulan	9.600.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	600.000	-	0		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	5.034.000	12 bulan	5.034.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12.270.000	12 bulan	12.270.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	6.004.500	12 bulan	6.004.500		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.725.000	12 bulan	2.725.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000		
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 bulan	13.000.000	12 bulan	13.000.000		
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	12 bulan	104.865.500	12 bulan	104.040.500		



No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Dan Teknis Perkantoran	12 bulan	96.802.000	12 bulan	96.802.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	22.000.000	12 bulan	22.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	13.000.000	12 bulan	13.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	13.371.500	12 bulan	13.371.500		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	12 bulan	13.685.000	12 bulan	13.685.000		
			Fasilitasi Dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	61.410.000	12 bulan	57.360.000		
			Pendampingan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	27.694.000	12 bulan	21.169.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Demon Pagong dan telah ditetapkan dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 432.861.500,- dari target Rp. 444.861.500,- atau sebesar 97,30%									
	<b>KECAMATAN LEWOLEMA</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar	720.000	100 lembar	720.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	10.000.000	12 bulan	9.918.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	1.250.000	5 unit	1.237.350		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5 orang	30.060.000	5 orang	26.460.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9 jenis	1.400.000	9 jenis	1.399.500		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	21 jenis	12.300.000	21 jenis	12.300.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000 lembar	8.500.000	30.000 lembar	8.500.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	1.000.000	3 jenis	1.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	900.000	1 jenis	900.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	350 dos	11.000.000	350 dos	11.000.000		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40 kali	65.700.000	40 kali	65.650.000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Dan Teknis Perkantoran	6 orang	83.000.000	6 orang	83.000.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1 gedung	3.000.000	1 gedung	3.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	6.595.000	1 unit	6.595.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	4.000.000	4 unit	4.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 jenis	1.000.000	2 jenis	1.000.000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	13.371.500	10 dokumen	13.371.500		
<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>									
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	14.250.000	1 kali	14.250.000		
			Fasilitasi Dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	7 dokumen	60.400.000	7 dokumen	57.250.000		
			Pendampingan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	5.200.000	12 bulan	5.200.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lewolema dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 326.751.350,- dari target Rp. 333.646.500,- atau sebesar 97,93%									

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	KECAMATAN ILE BURA		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 lembar	720.000	120 lembar	720.000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	10.800.000	12 bulan	10.800.000				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	1.000.000	5 unit	1.000.000				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	26.400.000	4 orang	26.400.000				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25 jenis	2.000.000	25 jenis	2.000.000				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	39 jenis	21.000.000	39 jenis	21.000.000				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.200 lembar	5.600.000	11.200 lembar	5.600.000				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1.475.000	1 paket	1.475.000				
		Penyediaan Makanan dan Minuman	620 porsi	15.500.000	620 porsi	15.500.000				
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	200 OH	73.850.000	200 OH	73.840.500				
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Dan Teknis Perkantoran	5 orang	69.000.000	5 orang	69.000.000				
		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>								
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	44.049.000	2 unit	44.049.000				
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket	20.208.650	1 paket	20.208.650				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	6.525.000	1 paket	6.525.000				
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 paket	13.371.500	1 paket	13.371.500				

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Progam/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat</b>							
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	17.710.000	1 kali	17.710.000			
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	56.400.000	12 bulan	56.400.000			
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 desa	10.500.000	7 desa	10.500.000			
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ile Bura dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 406.099.650,- dari target Rp. 406.109.150,- atau sebesar 99,99%										
	KECAMATAN ADONARA		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	960.000	12 bulan	960.000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	8.800.000	12 bulan	8.800.000				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	1.150.000	12 bulan	1.150.000				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	25.200.000	12 bulan	25.200.000				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	2.205.000	12 bulan	2.205.000				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.695.000	12 bulan	9.695.000				
		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.825.000	12 bulan	5.825.000				
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.500.000				
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	12 bulan	82.700.000	12 bulan	82.700.000				
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Dan Teknis Perkantoran	12 bulan	138.200.000	12 bulan	138.200.000				
			<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>							
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	12 bulan	8.459.000	12 bulan	8.459.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000					

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	20.743.000	12 bulan	20.743.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	13.371.500	12 bulan	13.101.500		
			<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	12 bulan	10.350.000	12 bulan	10.350.000		
			Fasilitasi Dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	59.400.000	12 bulan	55.200.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Adonara dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 420.088.500,- dari target Rp. 425.558.500,- atau sebesar 98,95%									
	<b>KECAMATAN ADONARA TENGAH</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64 lembar	510.000	64 lembar	510.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	8.500.000	12 bulan	8.500.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit roda 2	1.500.000	6 unit roda 2	928.840		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 orang	26.510.000	4 orang	26.510.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13 jenis	5.000.000	13 jenis	5.000.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	67 jenis	10.000.000	67 jenis	10.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	19.250 lembar, 30 buku	10.125.000	19.250 lembar, 30 buku	10.125.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	4.000.000	7 jenis	4.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	1.020.000	12 bulan	1.020.000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	300 dos	18.365.000	300 dos	18.365.000		

No	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasinya
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	55 kali	82.850.000	55 kali	80.566.500		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	9 orang	124.695.000	9 orang	124.695.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit leptop, 1 printer	24.500.000	2 unit leptop, 1 printer	24.500.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit gedung	5.000.000	1 unit gedung	5.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit roda 2	6.000.000	6 unit roda 2	6.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 unit	1.635.000	6 unit	1.635.000		
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dokumen	10.521.500	13 dokumen	10.081.500		
			<b>Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat</b>						
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	11.200.000	1 kali	11.200.000		
			Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	12 bulan	57.900.000	12 bulan	55.650.000		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	13 desa	22.750.000	13 desa	22.748.000		
			Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Adonara Tengah dan telah ditetapkan dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 427.034.840,- dari target Rp. 432.581.500,- atau sebesar 98,72%						
	<b>KECAMATAN SOLOR SELATAN</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 lembar	840.000	120 lembar	840.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	18.240.000	12 bulan	18.240.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit (roda 2)	1.500.000	5 unit (roda2)	1.050.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 orang	19.800.000	3 orang	19.800.000		

(1)	OPD Pelaksana/ Urusan Pemerintahan (2)	Kebijakan (3)	Uraian Program/Kegiatan (4)	Target		Realisasi		Permasalahan (9)	Upaya mengatasinya (10)
				Kinerja (5)	Anggaran (6)	Kinerja (7)	Anggaran (8)		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20 jenis	1.161.500	20 jenis	1.161.500		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	52 jenis	15.276.500	52 jenis	15.276.500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500 lbr, 30 buku	8.580.000	16.500 lbr, 30 buku	8.580.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	1.357.500	7 jenis	1.357.500		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	300 dos	18.000.000	360 dos	18.000.000		
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	55 kali	82.881.500	55 kali	82.881.500		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	6 orang	83.300.000	6 orang	83.300.000		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket (AC)	8.130.000	1 paket (AC)	8.130.000		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit laptop, 1 unit printer	28.100.000	2 unit laptop, 1 unit printer	28.100.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	24.620.000	1 unit	24.620.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit (roda 2)	8.310.000	6 unit (roda 2)	8.310.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 unit	2.950.000	6 unit	2.950.000		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dokumen	2.800.000	13 dokumen	2.800.000		
<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat</b>									
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	15.550.000	1 kali	15.550.000		
			Fasilitasi Dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	12 bulan	61.079.500	12 bulan	61.079.500		
			Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 desa	8.200.000	7 desa	8.200.000		
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Solor Selatan dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 410.226.500,- dari target Rp. 410.676.500,- atau sebesar 99,89%									

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program kerja kepala daerah yang akan digunakan sebagai acuan sekaligus arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari masing-masing unit kerja. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan tahun 2020 sebagai tahun ketiga dalam periode RPJMD 2017-2022 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

Dengan melihat berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi selama tahun 2020 dengan berbagai dinamika dalam pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19, maka beberapa kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis adalah sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pembentukan Tim Penanganan Pasien Covid-19 di ruang isolasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 170 Tahun 2020. -Keputusan Bupati Flores Nomor 192 Tahun 2020.	Penanganan Pasien Covid-19
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan tertib	Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.
3	Bantuan bagi Penyandang Disabilitas sebagai dampak dari Pandemi Covid-19	Surat Pernyataan Bupati Flores Timur Nomor : BPBD.360/52/Bid.KL/2020	Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Kegiatan Pendampingan penyerahan bantuan



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			sosial, asistensi penyandang disabilitas dan penyerahan bantuan sosial LU bagi lanjut usia luar panti akibat Covid-19.
4	Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19	Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 225 Tahun 2020, Tanggal 20 Juli 2020, Tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Tahap I Dampak Covid-19 Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.	Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
5	Surat Pernyataan Bencana Non Alam Wabah Penyakit akibat Virus Corona`	-SK Bupati Flores Timur Nomor 183 Tahun 2020, tanggal 26 Mei 2020, tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen pendaftaran Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial bagi Mahasiswa Asal Flores Timur di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang tidak kembali ke Flores Timur dalam masa pandemi Covid-19. -SK Bupati Flores Timur Nomor 203 Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Penerima	Melalui Jaring Pengaman Sosial diharapkan dapat membantu dan meringankan beban mahasiswa asal Flores Timur yang melaksanakan kuliah diluar selama masa pandemi Covid-19.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Bantuan Jaring Pengaman Sosial bagi Mahasiswa Asal Flores Timur di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang tidak kembali ke Flores Timur dalam masa pandemi Covid-19.	
6	Pedoman Tatanan Normal Baru	Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2020, Tanggal 29 Juni 2020, tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Kabupaten Flores Timur.	Diterbitkan Peraturan Bupati ini sebagai upaya untuk mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19.
7	Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan	Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 49 Tahun 2020, Tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Flores Timur.	Diterbitkan Peraturan Bupati ini sebagai upaya untuk pencegahan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Flores Timur.
8	Pembatasan Kegiatan masyarakat dimasa pandemi Covid-19	Surat Edaran Bupati Flores Timur Nomor : Satgas.Covid/06/FLT/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, tentang Panduan	Tujuannya adalah untuk pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Flores Timur.	Covid-19, serta meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan.
9	Sejak Tahun 2020, pungutan retribusi pengganti biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sudah tidak dipungut lagi, dalam arti untuk semua urusan jenis dokumen kependudukan sudah GRATIS	Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Mendorong masyarakat untuk mengurus pemenuhan hak-hak masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta menghindari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu.
10	Pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah program pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tahun 2020	Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 221 Tahun 2020, tentang Penetapan penerima dan besaran insentif/bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah program Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19	Membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak Covid-19 yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat.
11	Pemberian subsidi terhadap sembilan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan melalui gelar pasar murah di 10 (sepuluh) lokasi pada 9 kecamatan	Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 247 Tahun 2020 tentang Penetapan lokasi gelar pasar murah bersubsidi program Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19	Akses pangan/sembilan bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat dan untuk menstabilkan harga sembilan bahan pokok.

### 3.3. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada sistematika penyusunan LKPJ pada Bab III Poin 3.3 yang berkenaan dengan tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya serta mencermati Rekomendasi DPRD Kabupaten Flores Timur terhadap LKPJ Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor: DPRD.FLT 188.47/18/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2019; maka terhadap hal dimaksud dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Rekomendasi DPRD seperti tergambar dalam BAB III LKPJ Bupati Flores Timur Tahun 2019 terkait kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah pada Sub A tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah agar lebih akurat dan valid dalam menetapkan target Pendapatan daerah khusus PAD dengan mengukur target pendapatan dan konsisten dalam penagihan dan pemungutannya. Bahwa Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD baru harus berperan maksimal dalam pengelolaan PAD agar permasalahan yang selama ini terus berulang terkait rendahnya realisasi PAD dapat diatasi	Terhadap hal ini, pemerintah sudah mengambil langkah kongkrit dengan pembuatan Basis Data Pendataan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan telah mengambil langkah kongkrit dan cermat dalam penghitungan, penilaian dan penetapan obyek pajak daerah, akan tetapi upaya untuk meningkatkan PAD pada tahun 2020 masih terganjal oleh adanya Pandemi Covid-19 dengan melemahnya aktifitas perekonomian yang tentunya sangat berdampak pada sisi pendapatan daerah pada keseluruhan maupun secara khusus pada aspek pendapatan asli daerah. Komponen pajak yang sangat terdampak oleh pandemi adalah pajak hotel dengan realisasi 56,81% dan pajak mineral bukan logam dengan realisasi sebesar 34,49%	Adanya data obyek pajak yang akurat yang dipakai sebagai potensi dan penetapan pajak daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>Terhadap target dan realisasi belanja daerah khususnya belanja tidak langsung pada komponen belanja bantuan sosial, realisasinya masih sangat rendah, maka perlu disosialisasikan secara baik ketentuan peraturan tentang bantuan sosial sehingga pihak yang membutuhkan dapat mengetahuinya.</p>	<p>Belanja Bantuan Sosial yang pencapaiannya hanya 38,81% dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2019, belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000,-, dengan tujuan melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari resiko sosial akibat dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam yang tidak dapat diperkirakan. Namun dalam pelaksanaannya, pagu tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 349.300.000,- atau 38,81% sesuai dengan perkembangan kondisi riil yang terjadi di daerah ini sepanjang tahun 2019.</p>	<p>Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial yang terjadi.</p>
	<p>Berkaitan dengan belanja, khusus pada komponen belanja modal, lembaga DPRD merekomendasikan agar pemerintah terus berupaya mendorong realisasi belanja modal pada belanja langsung.</p>	<p>Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, akan tetapi upaya pemerintah untuk mendorong belanja modal pada tahun anggaran 2020 masih terkendala pada pandemi covid-19 dimana sepanjang tahun 2020, terjadi 4 (empat) kali <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran yang sangat mengganggu konsentrasi perangkat daerah dalam merealisasikan belanja khususnya belanja modal pada belanja langsung. Realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2020 sebesar 71,91% atau lebih rendah dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar 81,46%.</p>	<p>Mengoptimalkan belanja modal</p>

2	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	<p>Terhadap program pembangunan jalan dan jembatan, menunjukkan bahwa sebagian besar paket pekerjaan jalan dan jembatan yang dilaksanakan telah diselesaikan dan tentunya diapresiasi, namun paket pekerjaan pada ruas jalan Lamawohong-Lewotanaoleh-Tanah Lein tidak dapat diselesaikan bahkan dilakukan PHK dan fisik pekerjaan dibawah 50% karena ketidakmampuan pihak kontraktor.</p>	<p>Diupayakan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.</p>	
3	<b>Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan</b>		
	<p>Berkaitan dengan dukungan dari Pansus DPRD terhadap perbaikan rumah tidak layak huni dan rencana kebijakan dinas dalam memotivasi pemerintah desa untuk wajib mengalokasikan dana desa untuk bantuan stimulus</p>	<p>Program dan kegiatan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu akan terus diperjuangkan, baik melalui APBD II maupun bantuan dari APBN dan berkaitan dengan bantuan stimulus dari Dana Desa, pihak Dinas telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar alokasi dana desa dapat diperuntukan bagi pembangunan rumah tidak layak huni sesuai aturan yang berlaku.</p>	<p>Mengurangi jumlah unit rumah tidak layak huni dan mendukung program pemerintah gempur stunting dengan menyediakan rumah layak huni.</p>
	<p>Rekomendasi terkait kegiatan fasilitasi penyelesaian kasus tanah di masyarakat hendaknya dilakukan secara baik dengan melibatkan stakeholder terkait agar tidak mengarah ke hal-hal yang sifatnya anarkhis.</p>	<p>Terhadap hal ini, pemerintah sudah berupaya agar penyelesaian kasus tanah di masyarakat tetap dan terus melibatkan semua stakeholder.</p>	<p>Mengurangi konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat.</p>

4	<b>Urusan Pariwisata dan Kebudayaan</b>		
	<p>Terkait Penulisan Buku "Sejarah Lewo" dari Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Naskah Kuno, Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur merekomendasikan agar dilaksanakan seminar Bedah Buku</p>	<p>Tindak lanjut dari penulisan Buku "Sejarah Lewo" dengan dilaksanakan beberapa yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada tanggal 28 Mei 2019 dengan peserta terdiri dari penuls buku, narasumber, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan daerah.</li> <li>-Seminar Bedah Buku "Sejarah Lewo" yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2019 di Aula Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan peserta terdiri dari penuls buku, narasumber, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan daerah.</li> </ul>	<p>Seminar Bedah Buku bertujuan untuk menyatukan pikiran dari berbagai unsur elemen sebelum buku tersebut dipublikasikan agar tidak terjadi pro kontra dikalangan masyarakat tentang buku "Sejarah Lewo"</p>
5	<b>Urusan Pertanian</b>		
	<p>Berkaitan dengan kegiatan peremajaan, pemangkasan dan penjarangan jambu mente bahwa realisasi luasan areal pemangkasan dan penjarangan jambu mente tidak sesuai target sehingga perencanaan lebih matang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum penetapan lokasi dan alokasi luasan, dilaksanakan identifikasi dan pengukuran secara faktual terhadap lahan milik petani.</li> <li>- Sebaran lokasi diperbanyak mencakup 8 kecamatan (tahun 2019, terdiri dari 5 kecamatan), namun target luasan dikurangi dari 1000 Ha (2019) menjadi 800 Ha (2020) dan mengalami penurunan kerana <i>refocusing</i> anggaran menjadi 480 Ha.</li> <li>- Pendampingan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan secara terus menerus sepanjang tahun 2020.</li> </ul>	<p>Luasan areal pemangkasan dan penjarangan jambu mente sesuai target.</p>

<p>Rekomendasi terkait inventarisasi penggunaan gergaji mesin/<i>chain saw</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap rekomendasi ini, dalam tahun 2020 telah dilakukan monitoring penggunaan peralatan di kelompok.</li> <li>- Menginventarisasi dan telah melakukan pemutakhiran data gergaji mesin yang ada di kelompok</li> </ul>	<p>Untuk memonitor dan mengontrol penggunaan gergaji mesin agar sesuai peruntukannya</p>
<p>Perlu dilakukan evaluasi dampak kegiatan terhadap peningkatan produksi jambu mente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan evaluasi secara estimasi statistik karena pada umumnya didesa tidak memiliki data produksi</li> <li>- Penyusunan database perkebunan termasuk produksi jambu mente akibat kegiatan manja mente diusulkan dalam program kegiatan tahun 2021</li> </ul>	<p>Meningkatkan produksi jambu mente.</p>
<p><b>6 Urusan Kelautan dan Perikanan</b></p>		
<p>Penegasan terkait dinas terkait agar pemberian sarana dan prasarana untuk para nelayan(kelompok nelayan) hendaknya diseleksi secara baik sasarannya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan diantara nelayan. Terkait persoalan dengan kelompok nelayan yang melibatkan oknum di Dinas Kelautan dan Perikanan, Pansus merekomendasikan untuk mempercepat pemeriksaan terhadap dugaan penyalagunaan wewenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkaitan dengan pemberian bantuan sarana perikanan, pihak dinas telah melakukan evaluasi dan seleksi secara baik.</li> <li>- Terkait persoalan dengan kelompok nelayan yang melibatkan oknum Dinas, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan bagi oknum PNS yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Bidang Perijinan Usaha dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan menjadi Pelaksana, dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur, Nomor : BKPSDMD.820/287/PD/2020, tanggal 5 Oktober dibagi siplin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkaitan dengan bantuan sarana dan prasarana diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan.</li> <li>- Terkait dengan tindak lanjut terhadap oknum PNS, diberikan hukuman disiplin sehingga adanya efek jera bagi yang bersangkutan</li> </ul>



7	<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>  Khusus kegiatan pengembangan/pendampingan Wirausaha Muda, hendaknya pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder/OPD terkait.	- Telah dilakukan pendampingan kepada Wirausaha pemula/wirausaha baru bagi orang muda Flores Timur dengan melibatkan OPD teknis seperti : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Mengurangi pengangguran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bidang Perkoperasian Membuka lapangan kerja baru bagi orang muda Flores Timur Meningkatkan keahlian/skill bagi orang muda Flores Timur.
8	<b>Urusan Pendidikan</b>  Berkaitan dengan seleksi penerimaan baru bagi Guru kontrak, hal ini menjadi kebutuhan dan dilakukan secara lebih selektif dari berbagai aspek terutama aspek kualifikasi tenaga yang dibutuhkan	Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka salah satu kebijakan yang diambil terkait tenaga pendidikan adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan, khususnya tenaga pendidikan non ASN yang telah lama mengabdikan pada satuan pendidikan. Artinya pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas teknis tidak melakukan perekrutan baru tenaga pendidik, tetapi mengangkat tenaga pendidikan yang sudah ada menjadi tenaga kontrak daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah terus berupaya mengusulkan formasi baru tenaga pendidik untuk menjawab kekurangan Tenaga Pendidik di Flores Timur .	Untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik pada lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Flores Timur.

9	<b>Urusan Kesehatan</b>		
	<p>Lembaga merekomendasikan terkait pelayanan bagi masyarakat/pasien yang menggunakan SKTM, pemerintah lebih proaktif mendorong, memotivasi serta membuka ruang bagi masyarakat mampu untuk menjadi peserta BPJS Mandiri, sementara keluarga tidak mampu yang belum di cover menjadi peserta BPJS tanggungan pemerintah perlu difasilitasi dengan melakukan identifikasi yang cermat dan akurat sehingga menghasilkan data yang benar-benar valid sesuai kriteria yang ditetapkan untuk diusulkan ke pemerintah pusat.</p>	<p>Terhadap hal ini, Dinas Kesehatan tetap merencanakan penganggaran terhadap jaminan kesehatan setelah mendapat jumlah kepesertaan dari Dinas Sosial dan koordinasi juga terus dibangun sehingga dalam tahun 2020 telah dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi pemegang KIS APBD untuk diusulkan ke pemerintah pusat menjadi KIS APBN.</p>	<p>Mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.</p>
	<p>Penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Adonara agar dilaksanakan secara baik tanpa meninggalkan masalah baru dan terus ditargetkan pemanfaatannya.</p>	<p>Proses pembangunan akan terus dilakukan oleh pemerintah dan akan kembali dianggarkan pada tahun 2021 ini agar dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.</p>	<p>Mendekatkan pelayanan</p>
10	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
	<p>Lembaga menyoroti keberadaan BUMDES yang kini sudah tumbuh disebagian besar desa di Kabupaten Flores Timur. Nampak ada yang sangat berhasil namun sebagian kadang mekar di awal sesudahnya meredup. Aspek manajemen usaha masih menjadi kendala disamping kelayakan usaha tidak melalui study bisnis yang memadai. Hal ini tentu sangat disayangkan karena tidak kecil anggaran dana</p>	<p>Terhadap Rekomendasi yang diberikan, dari pihak Pemerintah telah melakukan study kelayakan dimaksud tetapi banyak kendala dan permasalahan yang ditemui di desa seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kemampuan SDM pengurus BUMDesa dalam merencanakan usaha yang dapat menangkap peluang usaha sesuai potensi yang dimiliki Desa dan kebutuhan Masyarakat (konsumen).</li> </ol> <p>Tindak lanjutnya :</p>	<p>- Pengurus BUMDesa menjadi Profesional sehingga mampu mengelola BUMDesa, usaha yang dilaksanakan BUMDesa mendatangkan keuntungan yang maksimal serta mampu memberikan pelayanan</p>

<p>desa dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMDES. Untuk itu Pansus merekomendasikan kepada pemerintah agar BUMDES yang penyertaan modalnya melalui Dana Desa hendaknya terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan usaha secara lebih profesional, sehingga strategi bisnis yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan usaha tersebut layak untuk dijalankan</p>	<p>Melakukan kegiatan pelatihan manajemen kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi pengurus BUMDesa</p> <p>2. Rendahnya tanggungjawab dan komitmen pengurus dalam melaksanakan tugasnya</p> <p>Tindak lanjutnya : Pembinaan Revolusi mental</p> <p>3. Belum optimalnya Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dari pemerintah desa sebagai pemilik BUMDesa terhadap pengelolaan BUMDesa</p> <p>Tindak lanjut : Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan BUMDesa dilakukan secara rutin setiap bulan</p> <p>4. Belum berperannya pengawas BUMDesa pada tingkat desa dalam melakukan evaluasi kinerja pengurus dalam pengelolaan BUMDesa</p>	<p>sosial terhadap kebutuhan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam mengelolah BUMDesa.</li> <li>- Hambatan/ masalah yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa dapat diketahui dan diselesaikan secara berjenjang.</li> <li>- Adanya pengawasan yang melekat untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDesa</li> </ul>
<p>Masalah perangkat desa terutama proses pengangkatan dan pemberhentian/ pergantiannya di beberapa desa yang bermasalah hendaknya diselesaikan sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku</p>	<p>Terhadap rekomendasi yang diberikan terkait proses pengangkatan dan pemberhentian/ penggantian perangkat desa yang terjadi di beberapa desa telah diselesaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD kabupaten Flores Timur</p>	<p>Untuk mendapatkan alasan atas pemberhentian perangkat desa.</p>
<p><b>11 Urusan Perencanaan dan Keuangan Daerah</b></p>		
<p>Terkait mekanisme dan perencanaan dan penganggaran terutama pengajuan dokumen rencana KUA, PPAS maupun APBD yang selama ini berjalan namun belum mengikuti</p>	<p>Pemerintah tentu akan mencermati tahapan-tahapan pengajuan dokumen terkait dan dalam tahun 2021 ini, mulai dilakukan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),</p>	<p>Agar semua tahapan dalam perencanaan dan penganggaran dapat dijalankan sesuai ketentuan yang</p>

	<p>tahapan waktu sesuai ketentuan aturan yang berlaku sehingga lembaga dalam fungsi anggarannya tidak memiliki cukup waktu untuk mencermati dan mendalami dokumen dimaksud. Lembaga merekomendasikan agar jadwal pengajuan dokumen sebagaimana tersebut mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>baik dalam perencanaan maupun penganggaran semua OPD maupun kecamatan dengan adanya batas waktu dalam setiap tahapan yang diatur dalam aplikasi, sehingga semua tahapan waktu akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>berlaku.</p>
<b>12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya</b>		
	<p>Konsisten dengan target pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang dijalankan sesuai target kinerja dalam RPJMD</p>	<p>Terhadap hal ini, pemerintah tentu berterimakasih atas apresiasi dari lembaga dewan yang terhormat dan pemerintah akan tetap bekerja sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD</p>	<p>Agar Program dan kegiatan sesuai rencana yang termuat dalam RPJMD.</p>
<b>13</b>	<b>Urusan Tugas Pembantuan</b>		
	<p>Lembaga mendorong untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait agar alokasi dana Tugas Pembantuan ditahun-tahun mendatang lebih ditingkatkan</p>	<p>Terhadap hal ini, pemerintah tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah ditingkat atas, namu masih terganjal oleh adanya Pandemi Covid-19, sehingga berdampak pula pada proyek infrastruktur ke daerah-daerah, namun kita juga bersyukur bahwa ditengah pandemi Covid-19, pada tahun 2020, masih ada dana Tugas Pembantuan yang disalurkan dalam bentuk sarana dan pra sarana pertanian dengan tujuan pemulihan ekonomi masyarakat. dan untuk tahun 2021 ini, dana Tugas Pembantuan masih dapat kita peroleh dengan rencana pembangunan Pasar Rakyat Modern di Kecamatan Wulanggintang</p>	

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

### 4.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dari Pemerintah Pusat ada pada Urusan Pertanian, yaitu pada Bidang Tanaman Pangan dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pra Sarana dan Sarana Pertanian.

#### A. Urusan Pertanian (Bidang Tanaman Pangan)

- a) Program/Kegiatan :
  1. Pengembangan Budidaya Jagung Hibrida
  2. Budidaya Padi Lahan Kering
  3. Pengembangan Budidaya Padi Hibrida Sawah
  4. Pengembangan Pangan Alternatif Sorghum
  5. Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu
  6. Pengembangan Cabe Rawit
  7. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pengolahan Hasil
- b) Dasar Hukum :

Nomor DIPA : SP.DIPA.018.03.4.249158/2020 (Revisi 03)  
Tanggal : 17 Maret 2020
- c) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- d) Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur
- e) Dana :
  - Jumlah Anggaran : Rp.2.994.100.000,-
  - Realisasi : Rp.2.994.100.000,-
- f) Sumber Dana : DIPA Tugas Pembantuan
- g) Sasaran Penerima Bantuan : Kelompok Tani, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kegiatan Pengembangan Budidaya Jagung Hibrida
    - Jumlah Kelompok Tani: 215 Kelompok Tani
    - Jumlah Benih: 30.000 kg untuk 2000 Ha
  2. Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering (400 Ha)
    - Jumlah Kelompok Tani : 80 Kelompok Tani
    - Jenis Bantuan :

- Jumlah Benih : 16.000 kg
  - Pupuk NPK (Nitrogen Pospor dan Kalium) : 20.000 kg
  - Pupuk Pembenhah Tanah : 200 kg
  - Herbisida : 800 liter
3. Kegiatan Pengembangan Budidaya Padi Inbrida Sawah
    - Jumlah Kelompok Tani : 21 Kelompok Tani
    - Jumlah Benih : 12.500 kg untuk 500 Ha (Target yang dicapai)
  4. Kegiatan Pengembangan Pangan Alternatif Sorghum
    - Jumlah Kelompok Tani : 99 Kelompok Tani
    - Jenis Bantuan :
      - Jumlah Benih : 8.000 kg
      - Jumlah Pupuk Npk : 100.000 kg
    - Hasil yang dicapai : untuk 1.000 Ha
  5. Kegiatan Peningkatan Produktifitas Ubi Kayu
    - Jumlah Kelompok Tani : 36 Kelompok Tani
    - Pupuk Organik Humat Pro (merk pupuk) : 1.000 kg
    - Benih/Stek swadaya Petani
    - Hasil yang dicapai : untuk 100 Ha
  6. Kegiatan Pengembangan Cabe Rawit
    - Jumlah Kelompok Tani : 12 Kelompok Tani
    - Jenis Bantuan :
      - Jumlah Benih : 375 bungkus
      - Pupuk Hayati : 125 Bungkus
      - FeromEn Sex (Perangkap hama): 700 set
    - Hasil yang dicapai untuk : 25 Ha
  7. Bantuan Alsintan Pengolahan Hasil
    - Jumlah Kelompok Tani : 4 (empat) Kelompok Tani
    - Jenis Bantuan : 4 (empat) unit mesin pemipil jagung (*corn sheller*)

Semua jenis bantuan dalam bentuk Transfer Barang

h) Permasalahan dan Kendala :

1. Adanya Bencana Non Alam Nasional (Covid-19) yang mempengaruhi seluruh aktivitas perekonomian dan pengembangan pada berbagai sektor usaha termasuk sektor pertanian.

2. Adanya kesenjangan ketersediaan anggaran penunjang untuk mendukung kegiatan fisik dan Tugas Pembantuan yang mempengaruhi monitoring dan evaluasi di lapangan.

- i) Saran dan Tindak lanjut  
Perlu adanya dana pendamping fisik kegiatan Tugas Pembantuan dalam rangka meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi dan pembinaan ke kelompok tani penerima bantuan untuk tercapainya output.

#### **B. Urusan Pertanian (Bidang Prasana dan Sarana Pertanian)**

- a) Program/Kegiatan : Pengembangan Sumber-sumber Air.  
b) Dasar Hukum : Nomor DIPA : SP.DIPA.018.08.4.249165/2020 Tanggal 12 November 2019  
c) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Pertanian Republik Indonesia  
d) Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur  
e) Dana :  
- Target : Rp.1.077.500.000,-  
- Realisasi : Rp.1.077.500.000,-  
f) Sumber Dana : DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia  
g) Sasaran Penerima Bantuan : Tiga (3) kelompok tani, dengan rincian sebagai berikut :  
1. Jenis Bantuan : Perpompaan 3 (tiga) Paket dan kelengkapannya untuk mengairi lahan seluas 30 Ha  
2. Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) : 2 (dua) Kelompok Tani untuk mengairi areal persawahan seluas 350 Ha  
3. Hasil yang dicapai : Tersedianya mesin pompa air beserta kelengkapannya dan terbangunnya jaringan irigasi tersier.  
h) Permasalahan dan Kendala :  
1. Masalah Teknis :  
- Rendahnya SDM petani dalam memahami dokumen perencanaan (Gambar di RAB).  
- Keterlambatan proses keuangan akibat pandemi Covid-19  
- Pelaksanaan dilakukan melalui virtual meeting dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaannya semakin berkurang. &

- Tidak tersedianya dana SID untuk melakukan identifikasi.
2. Masalah Non Teknis
- Lemahnya koordinasi dari Satuan Kerja Propinsi dan Kabupaten khususnya dalam urusan administrasi dokumen Bantuan Pemerintah dan Administrasi Keuangan sehingga menghambat kegiatan pembangunan fisik di lapangan.
  - Adanya restrukturisasi pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten yang berpengaruh pada penetapan KPA/PPK serta petugas terkait.
  - Terjadi revisi DIPA/POK sebanyak 4 (empat) kali.
- i) Saran dan Tindak lanjut
1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna mendukung pelaksanaan kegiatan untuk tercapainya output.
  2. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dengan meningkatkan frekuensi monev dan pembinaan ke penerima/kelompok tani pelaksana kegiatan.
  3. Memberikan sosialisasi terkait pertanggungjawaban penggunaan dana dan terkait juknis kegiatan yang dilaksanakan.

#### **4.1.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

Dalam Tahun Anggaran 2020, tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.



## BAB V P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019, yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya, yang meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Flores Timur yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari semua stakeholders pembangunan di daerah ini, termasuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur. Meski demikian, sangat disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Untuk itu, kedepannya harus dianalisis dan dievaluasi secara menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* dan *clean goverment* di masa mendatang.

Kami memiliki harapan besar bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai bahan berbagi dalam memberikan saran dan masukan, agar kinerja pemerintah ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian untuk mewujudkan Flores Timur & Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.

  
BUPATI FLORES TIMUR,  
*[Handwritten Signature]*  
ANTON H. GEGE HADJON, ST